KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

Direktorat
Jenderal
Infrastruktur
Digital

LAPORAN KINERJA 2025

Loka Monitor SFR Kendari



Disusun Oleh:
Loka Monitor SFR Kendari

RINGKASAN EKSEKUTIF



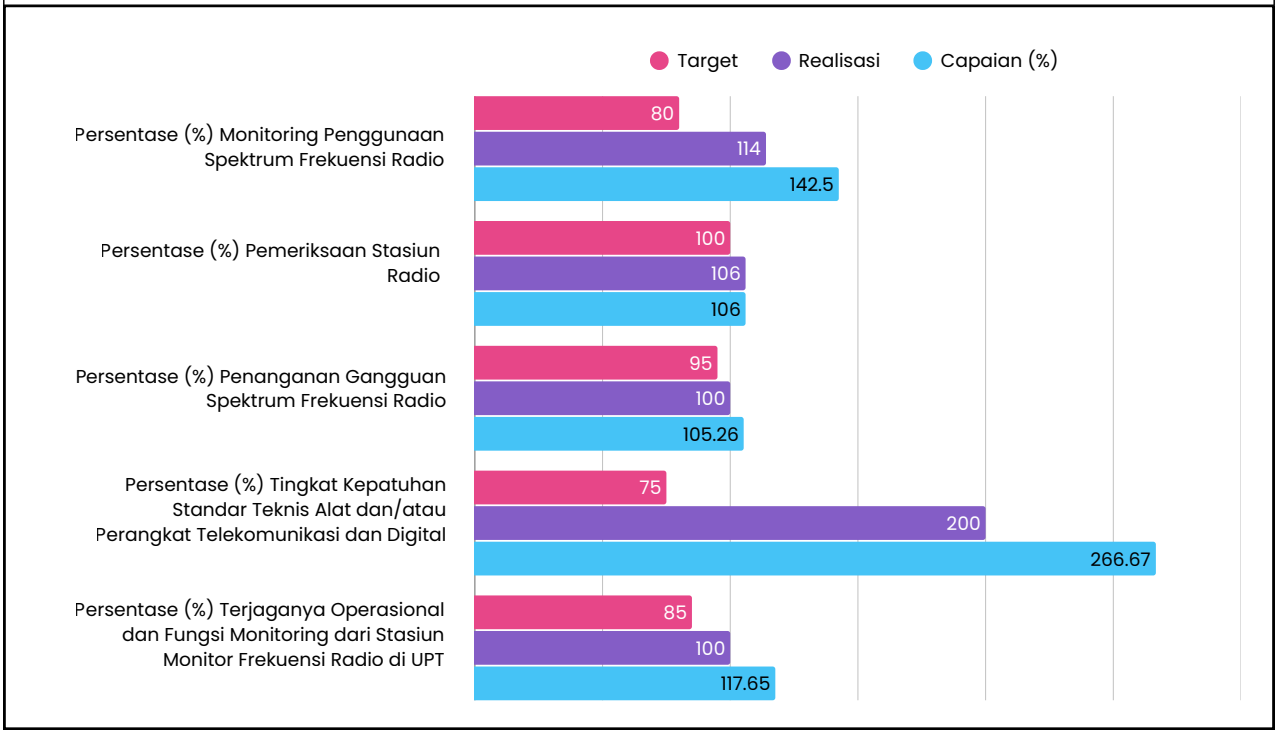
Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari adalah administrator terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio yang memberikan pelayanan, pemantauan, pengukuran, inspeksi, dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati bersama serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat. Penilaian capaian Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari dapat dilihat dari indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.

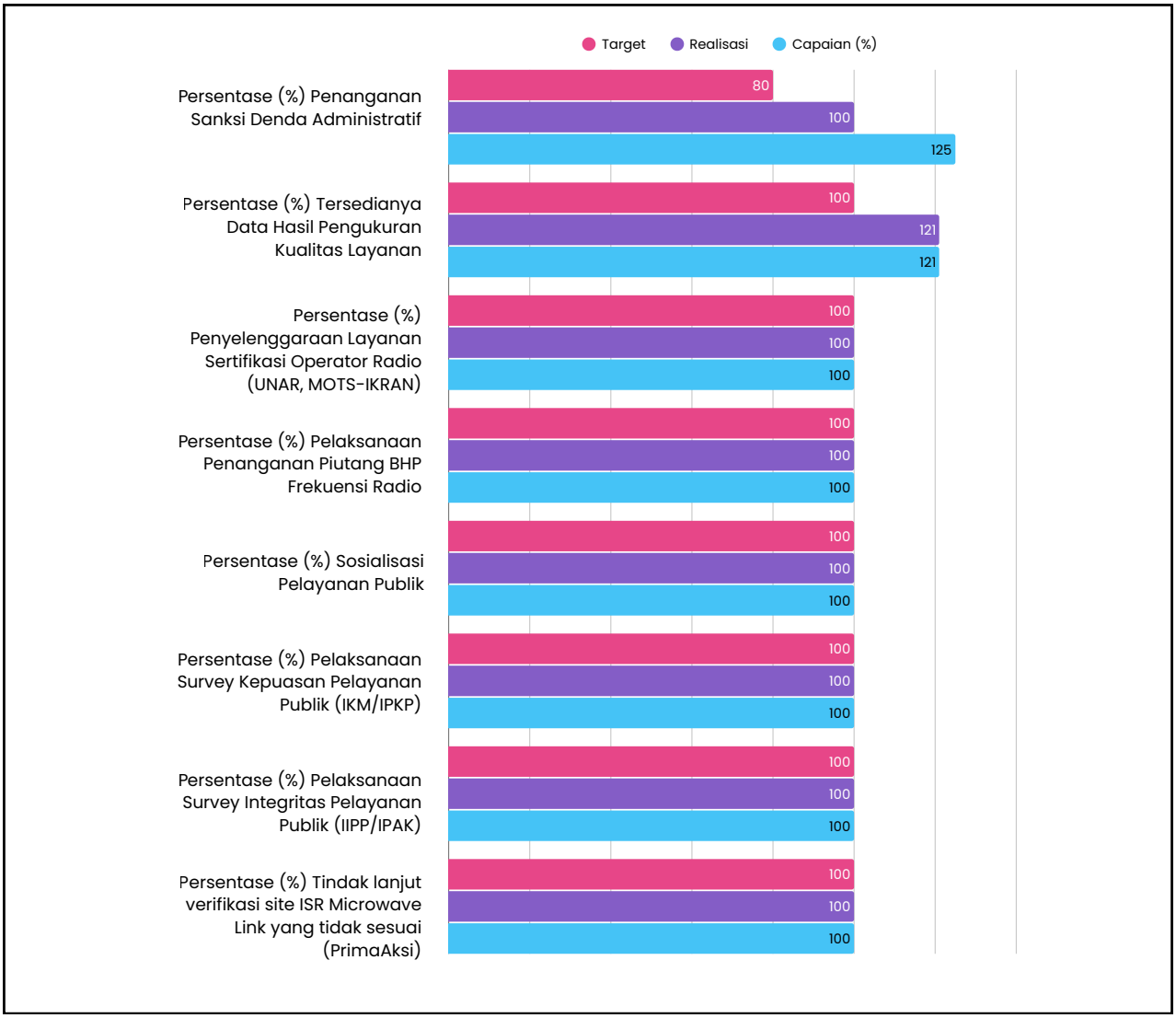
Laporan Kinerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari tahun 2025 ini disusun untuk melengkapi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah pusat kepada masyarakat.

Capaian indikator kinerja dan pencapaian target dimaksud terdapat dalam grafik di bawah ini:

Sasaran Kinerja

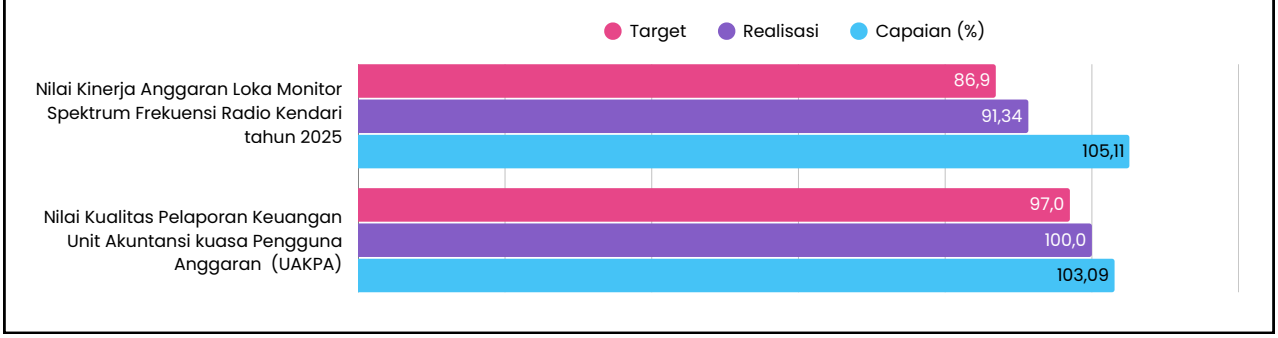
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi





Gambar 1.1 Sasaran Kinerja dan Realisasi di Tahun 2025

Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien



Gambar 1.2 Sasaran Kinerja Kualitas Tata Kelola Birokrasi 2025

BENCHMARK

Loka Monitor SFR Kendari juga melakukan benchmarking capaian kinerja dengan beberapa UPT lain yang sejenis seperti Loka Monitor SFR Mamuju dan Loka Monitor SFR Gorontalo. Hasil benchmark tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

UPT	Target	Capaian
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi		
IK-1.1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/kota di Wilayah Kerja		
Loka Monitor SFR Mamuju	80%	100%
Loka Monitor SFR Kendari	80%	114%
Loka Monitor SFR Gorontalo	80%	100%
IK-1.2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio		
Loka Monitor SFR Mamuju	100%	100%
Loka Monitor SFR Kendari	100%	106%
Loka Monitor SFR Gorontalo	100%	100%
IK-1.3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio		
Loka Monitor SFR Mamuju	95%	100%
Loka Monitor SFR Kendari	95%	100%
Loka Monitor SFR Gorontalo	95%	100%
IK-1.4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital		
Loka Monitor SFR Mamuju	75%	100%

UPT	Target	Capaian
Loka Monitor SFR Kendari	75%	100%
Loka Monitor SFR Gorontalo	75%	100%
IK-1.5 Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT		
Loka Monitor SFR Mamuju	85%	100%
Loka Monitor SFR Kendari	85%	95%
Loka Monitor SFR Gorontalo	85%	94.45%
IK-1.6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif		
Loka Monitor SFR Mamuju	80%	100%
Loka Monitor SFR Kendari	80%	100%
Loka Monitor SFR Gorontalo	80%	100%
IK-1.7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan		
Loka Monitor SFR Mamuju	100%	120%
Loka Monitor SFR Kendari	100%	121%
Loka Monitor SFR Gorontalo	100%	100%
IK-1.8 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)		
Loka Monitor SFR Mamuju	100%	158%
Loka Monitor SFR Kendari	100%	100%
Loka Monitor SFR Gorontalo	100%	100%

UPT	Target	Capaian
IK-1.9 Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio		
Loka Monitor SFR Mamuju	100%	100%
Loka Monitor SFR Kendari	100%	100%
Loka Monitor SFR Gorontalo	100%	100%
IK-1.10 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik		
Loka Monitor SFR Mamuju	100%	100%
Loka Monitor SFR Kendari	100%	100%
Loka Monitor SFR Gorontalo	100%	100%
IK-1.11 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)		
Loka Monitor SFR Mamuju	100%	100%
Loka Monitor SFR Kendari	100%	122.3%
Loka Monitor SFR Gorontalo	100%	100%
IK-1.12 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)		
Loka Monitor SFR Mamuju	100%	100%
Loka Monitor SFR Kendari	100%	106%
Loka Monitor SFR Gorontalo	100%	100%

UPT	Target	Capaian
IK-1.13 Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)		
Loka Monitor SFR Mamuju	100%	100%
Loka Monitor SFR Kendari	100%	100%
Loka Monitor SFR Gorontalo	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien		
IK-2.1 Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari tahun 2025		
Loka Monitor SFR Mamuju	86.95	84.48%
Loka Monitor SFR Kendari	86.95	91.34%
Loka Monitor SFR Gorontalo	86.95	91.34%
IK-2.2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)		
Loka Monitor SFR Mamuju	97%	100%
Loka Monitor SFR Kendari	97%	100%
Loka Monitor SFR Gorontalo	97%	100%

SASARAN KINERJA I

Meningkatnya Layanan Monitoring, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat telekomunikasi. Indikator Kinerja tersebut antara lain:

1. **Persentase (%) Monitoring penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota**

   Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari telah melaksanakan kegiatan observasi monitoring di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang meliputi 17 Kab/Kota dengan capaian sebesar 142.50%.

2. **Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio**

   Loka Monitor Spektum Frekuensi Radio Kendari melakukan kegiatan pemeriksaan Stasiun Radio pada tahun 2025 yang terdiri atas kegiatan remote site, inspeksi, pengukuran radio siaran dan monitoring perangkat telekomunikasi. Adapun target yang ditetapkan adalah 100% dengan capaian sampai desember 2025 yaitu 106.00%.

3. **Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio**

   Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari melakukan kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada tahun 2025. Target penanganan gangguan spektrum frekuensi radio 100% dengan capaian 105.26%.

4. **Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital**

   Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari melakukan Operasi Penertiban pada tahun 2025 yang dilaksanakan serentak oleh 35 UPT di seluruh Indonesia, dengan rincian 4 (empat) kali yaitu Penertiban Nasional Tahap I, Penertiban Nasioal Tahap II, Penertiban Nasional Tahap III, Penertiban Nasional Tahap IV. Dengan demikian capaian penertiban spektrum frekuensi radio dengan target PK 75% dengan capaian 266.67%.

5. **Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT**

   Target Indikator Kinerja Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT adalah sebesar 85%. Adapun capaian Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari sebesar 117.65%.

6. **Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif**

   Target Indikator Kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif adalah sebesar 100%. Adapun realisasi Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari terhadap indikator ini adalah 100%.

7. **Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan**

   Target Indikator Kinerja Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas

Layanan adalah sebesar 100%. Adapun realisasi Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari terhadap indikator ini adalah 121%

8. **Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)**

   Capaian Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) adalah 100% dari target 100% sehingga Persentase capaian terhadap target adalah sebesar 100%.

9. **Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio**

   Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio Target Indikator Kinerja Persentase sebesar 100%. Adapun persentase capaian terhadap target sebesar 100%.

10. **Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik**

    Target Indikator Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik adalah sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

11. **Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)**

    Capaian Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) adalah 100% dari target 100% sehingga Persentase capaian terhadap target adalah sebesar 100%.

12. **Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)**

    Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) adalah sebesar 100%. Adapun capaian terhadap target adalah sebesar 100%.

13. **Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (Prima Aksi)**

    Target Indikator Kinerja Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (Prima Aksi) adalah sebesar 100%. Adapun capaian terhadap target adalah sebesar 100%.

SASARAN KINERJA II

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien:

1. **Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari tahun 2025.**
2. **Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)**

KATA PENGANTAR



KEPALA LOKA MONITOR SFR KENDARI



Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala Rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (IKIP) tahun 2025 Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (IKIP) Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari tahun 2025, merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintahan kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, serta sebagai wujud pelaporan dari hasil pelaksanaan Perjanjian Kinerja antara direktur jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) dan Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari T.A 2025. Laporan ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik atau auto correction untuk masuk tahun berikutnya, sehingga dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja.

Sebagai sebuah laporan pertanggungjawaban kinerja, IKIP Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya serta sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas, efisiensi, dan produktivitas instansi kami. IKIP ini telah disusun dengan cermat, tepat, dan terukur dengan melibatkan seluruh komponen yaitu Tim Umum dan Rumah Tangga, Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi, Tim Kerja Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Tim Kerja Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio dan Konsultasi Publik.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2025. Kami mengetahui masih ada kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas, tetapi kekurangan tersebut akan kami jadikan acuan perbaikan pada tahun berikutnya.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

KEPALA LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KENDARI



BOBY SATRIYO

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif i

Kata Pengantar ix

Daftar Isi xi

Bab I Pendahuluan 1

- Latar Belakang 2
- Tugas, Fungsi & Struktur Organisasi 3
- Potensi & Permasalahan Strategis 3
- Sistematika Laporan 4

Bab II Perencanaan Kinerja 5

- Rencana Strategis 6
- Sasaran Kegiatan 6
- Perjanjian Kinerja 7

Bab III Akuntabilitas Kinerja 9

Bab IV Penutup 98

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

Direktorat Jenderal
Infrastruktur Digital



BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas yang perlu diatur dan dimanfaakan dengan sebaik-baiknya karerna apabila tidak diatur dan dimanfaatkan dengan benar dapat merugikan negara. Karena sifatnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui lagi, maka pemanfaatannya sepenuhnya diatur untuk kepentingan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 45 pasal 33 ayat 3 yaitu "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring perkembangan teknilogi informatika spektrum frekuensi radio makin banyak dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Agar pemanfaatan frekuensi radio tertib, teratur dan efisien (tidak boros) dan untuk mencegah timbulnya gangguan, karena propagansi gelombang radio merambat tanpa mengenal batas wilayah/negara, maka pemanfaatan frekuensi radio perlu diatur.

Dalam hal ini pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio, pemerintah mendelegasikan kepada Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai Lembaga negara yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil Langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun.



Gambar 1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi



Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana diatur dalam Bab II dan bagian kedua pasal 7. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan frekuensi radio.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari menyelenggarakan fungsi sesuai Bab I pasal :

1. Penyusunan rencana dan program.
2. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio.
3. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap pengguna spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika.
4. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.
5. Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio.
6. Pelayanan pengaduan Masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio.
7. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio.
8. Pelaksanaan ujian negara amatir radio, dan
9. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan dan hubungan Masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi di Wilayah Sulawesi Tenggara, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari dihadapkan dengan beberapa permasalahan yaitu:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada , Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas sehingga perlu dilakukan pengembangan SDM baik secara jumlah maupun peningkatan kompetensi.
2. Kondisi geografis pada wilayah Sulawesi Tenggara yang beragam, terdiri dari pegunungan dan kepulauan. Hal ini menjadi tantangan mengingat akses transportasi ke seluruh wilayah Kabupaten/Kota menjadi beragam, baik transportasi darat, laut dan udara. Adanya daerah perbatasan dengan alur transportasi yang terbatas menjadi tantangan tersendiri.
3. Masih terdapat pengguna frekuensi radio dan alat / perangkat telekomunikasi yang belum memiliki kesadaran dalam mematuhi regulasi terkait. Hal ini berdampak pada proses pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi yang harus dilakukan secara terus menerus untuk menjamin penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib dan sesuai peruntukannya.

SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan laporan Kinerja Loka Monitor Kendari Tahun 2025 berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ruang Lingkup Laporan Kinerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari Tahun 2025 meliputi:

1. PENDAHULUAN
   Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
2. PERENCANAAN KINERJA
   Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
3. AKUNTABILITAS KINERJA
   Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.
4. PENUTUP
   Penutup berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

Direktorat Jenderal
Infrastruktur Digital



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen Infrastruktur Digital Menyusun rencana program untuk mendukung sepenuhnya rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2020-2025. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital , agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian-pencapaian Pembangunan nasional yang telah dicanangkan yaitu percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintah dan masyarakat serta peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik.

Sasaran Kegiatan

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah sasaran kegiatan yang merupakan tolak ukur untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan kegiatan untuk 1 (satu) tahun.

Pada 2025 telah ditetapkan 2 sasaran kegiatan yang menjadi sasaran kegiatan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari dengan rincian masing-masing indikator kinerja dan target sebagai berikut:

I. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

1. IK-1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/kota di Wilayah Kerja dengan target 80%
2. IK-2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio dengan target 100%
3. IK-3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio dengan target 100%
4. IK-4 Persentase (%) Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital target 75%
5. IK-5 Persentase % Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT target 85%
6. IK-6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif target 80%
7. IK-7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan target 100%
8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN) target 100%
9. IK-9 Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio target 100%
10. IK-10 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik target 100%.
11. lK-11 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) target 100%
12. IK-12 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)) target 100%
13. IK-13 Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi) target 100%

II. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

1. IK-1 Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 dengan target 86.95
2. IK-2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan target 97.00

Perjanjian Kinerja

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, maka Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja.

Sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja Ditjen Infrastruktur Digital tahun 2025 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	80%
	2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%
	3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%
	4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%
	5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%
	6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%
	7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%
	8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%

	9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%
	10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%
	11. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%
	12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%
	13. Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari tahun 2025	86.9
	2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

Direktorat Jenderal
Infrastruktur Digital



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan kinerja (LAKIN) Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari Tahun 2025 difokuskan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam sasaran program Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID). Penyusunan laporan ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga merupakan alat strategis untuk mengukur efektivitas, efisiensi, serta konsistensi capaian kinerja terhadap rencana yang telah ditetapkan. Seluruh capaian dalam laporan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap misi percepatan transformasi digital nasional, khususnya dalam pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio serta perangkat telekomunikasi di wilayah kerja.

Capaian Kinerja Organisasi

Secara lengkap capaian kerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	80%	114%	142.5%
	2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	106%	106%
	3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	105.26%
	4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	100%	133.33%
	5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	95%	111.76%
	6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	100%	125%

	7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	121%	121%
	8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%	100%	100%
	9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%
	10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%
	11. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	122.30%	122.30%
	12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	106%	106%
	13. Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari tahun 2025	86.9	91.34	105.11%
	2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97.00	100	103.09%

Pada sasaran kegiatan I "Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban, serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi" terdapat 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Sasaran Program, berikut pencapaian masing-masing indikator:

IK-1.1 Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

I. Latar Belakang

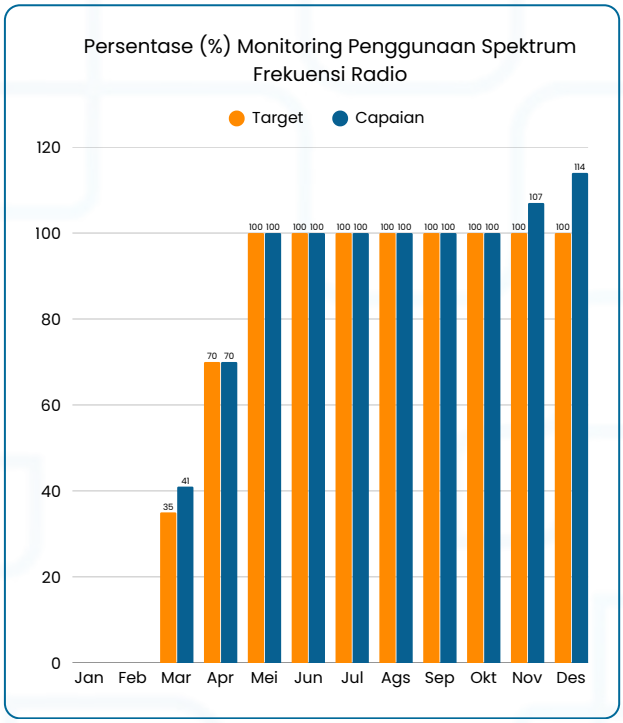
Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai layanan telekomunikasi, penyiaran, dan komunikasi publik. Pengelolaan spektrum yang tertib dan efisien menjadi kunci untuk menjamin kualitas layanan komunikasi serta mencegah terjadinya gangguan interferensi yang dapat merugikan masyarakat maupun penyelenggara layanan. Oleh karena itu, monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di tingkat kabupaten/kota menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pengawasan dan pelayanan publik di bidang telekomunikasi.

Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pengguna spektrum mematuhi ketentuan izin stasiun radio (ISR) maupun izin pita frekuensi radio (IPFR), serta menggunakan perangkat yang sesuai standar teknis. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai upaya preventif terhadap potensi pelanggaran, seperti penggunaan frekuensi tanpa izin, pergeseran frekuensi, atau daya pancar yang melebihi ketentuan.

Dengan cakupan wilayah kerja yang luas (17 kabupaten/kota), indikator ini mencerminkan komitmen Loka Monitor SFR Kendari dalam menjaga keteraturan penggunaan spektrum di seluruh kabupaten/kota. Hasil monitoring tidak hanya menjadi dasar evaluasi kepatuhan pengguna, tetapi juga menjadi tolak ukur kualitas layanan publik yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan masyarakat dari gangguan komunikasi.

II. Capaian

Kegiatan Monitoring atau okupansi spektrum secara umum dapat didefinisikan sebagai pengamatan terhadap satu atau beberapa kanal frekuensi yang sedang digunakan (used) atau tidak digunakan (unused), dalam durasi tertentu, untuk mengetahui pendudukan spektrum frekuensi pada pita frekuensi atau band tertentu dan sekaligus mengetahui sisa dari frekuensi dari pita tersebut yang tidak digunakan.



Gambar 3.1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Keterangan Capaian:

Kab/Kota Termonitor : 16
Jumlah Kab/Kota Wilayah Kerja UPT : 17
Target Kab/Kota : 14 Kab/Kota
Capaian : 16 / 14 = 114%

III. Analisa

Pelaksanaan monitoring di Kab/Kota Sulawesi Tenggara relatif cukup baik seperti yang tertulis pada keterangan capaian di atas (16/17) yakni 90% dari seluruh wilayah kerja UPT Loka Monitor Kendari. Adapun untuk data per-kab/kota bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Capaian Pelaksanaan PK Monitoring per-Kab/Kota

Kab/Kota	ISR Monitoring (Target/Realisasi)	OCC (Target/Realisasi)	IDEN (Target/Realisasi)	Capaian Tindak Lanjut	Capaian PK Observasi
Bombana	10/10	15/15	86/108	1	1
Buton	8/11	15/15	58/72	1	1
Buton Selatan	2/3	15/15	46/58	1	1
Buton Tengah	8/7	15/15	85/106	1	1
Buton Utara	0/0	0/0	0/0	0	0
Kolaka	55/75	15/15	142/177	1	1
Kolaka Timur	1/2	15/15	37/46	1	1
Kolaka Utara	8/12	15/15	90/113	1	1
Konawe	46/60	15/15	101/126	1	1
Konawe Kepulauan	13/21	15/15	50/63	1	1
Konawe Selatan	31/49	15/15	817/977	1	1
Konawe Utara	44/68	15/15	94/117	1	1
Kota Bau-Bau	27/26	15/15	450/562	1	1
Kota Kendari	83/136	15/15	1360/1698	1	1
Muna	12/20	15/15	91/114	1	1
Muna Barat	2/4	15/15	94/117	1	1
Wakatobi	9/12	15/15	66/82	1	1

Isu/Resiko:

Terdapat 1 kab/kota yang tidak tercover untuk kegiatan Okupansi 15 pita yaitu Kab Buton Utara berhubung tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan tidak memungkinkan untuk digabung dengan kab/kota yang lain berhubung jarak dan akses yang jauh.
Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota, terdiri dari:

1. **Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kab/Kota**

Monitoring Pita Frekuensi Radio oleh Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari pada tahun 2025 dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh wilayah kerja. Kegiatan ini mencakup pemantauan spektrum menggunakan perangkat SMFR Tetap, Transportable, maupun Jinjing/Bergerak di 17 Kabupaten/Kota dengan komponen perhitungan sebagai berikut:

- 100% Kabupaten/Kota Termonitor
- 15 Pita Frekuensi Radio dilakukan Observasi dan Identifikasi
- 50% ISR Termonitor
- 70% Hasil Monitor SFR harus teridentifikasi

Secara spesifik, kegiatan monitoring dilakukan dengan pendekatan yang terfokus dan sesuai mandat organisasi. Kinerja ini juga sepenuhnya terukur, sebagaimana dibuktikan melalui capaian indikator utama, yaitu:

- Okupansi 17 Pita Kab/Kota :
- ISR Termonitor :
- Hasil Monitor Teridentifikasi :
- Drive test :

Capaian tersebut menunjukkan bahwa program kerja tidak hanya dapat dicapai, tetapi juga sangat relevan terhadap tugas pokok dan fungsi Loka Monitor dalam bidang pengawasan spektrum.
Secara keseluruhan, kinerja Monitoring Pita Frekuensi Radio Loka Monitor SFR Kendari tahun 2025 telah berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel. Capaian ini menunjukkan perencanaan yang matang, sinergi pelaksanaan, serta pengukuran kinerja yang terstandar mampu menghasilkan dampak nyata dalam pengawasan spektrum frekuensi radio. Untuk tahun mendatang, disarankan agar pelaksanaan drive test diperluas ke seluruh wilayah kerja, kapasitas dan kompetensi SDM terus ditingkatkan, serta pemanfaatan teknologi monitoring



Gambar 3.2 Persiapan Monitoring Pita Frekuensi Radio

dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio secara nasional.

Berikut grafik capaian IK-1.1 5 Tahun Terakhir



Gambar 3.3 Capaian IK-1.1 5 Tahun Terakhir

Berdasarkan gambar di atas, selama 5 tahun terakhir Loka Monitor SFR Kendari secara konsisten mencapai/melewati target Indikator Kinerja 1.1 Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota.

2. **Monitoring Pita Frekuensi Marabahaya**

Monitoring pita frekuensi marabahaya yang dilaksanakan setiap hari pada tahun 2025 menggunakan SMFR Tetap/ Transportable : 100%.
Monitoring pita frekuensi marabahaya merupakan salah satu kegiatan prioritas Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari yang bertujuan untuk menjamin tersedianya kanal komunikasi darurat secara efektif, khususnya untuk kebutuhan keselamatan dan kebencanaan.egiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap hari menggunakan perangkat SMFR Tetap dan/atau

Transportable yang tersebar di wilayah kerja. Berdasarkan perencanaan kinerja 2025, target monitoring rutin ditetapkan sebanyak 14 kali dalam setiap bulan untuk masing-masing SMFR, dengan fokus observasi dan identifikasi pada 5 (lima) pita frekuensi marabahaya.
Kegiatan ini telah dirancang secara spesifik untuk memantau pita frekuensi yang bersifat kritikal bagi layanan darurat. Target kinerja bersifat terukur dengan indikator yang jelas, yaitu pelaksanaan monitoring harian selama 11 bulan dari target 11 bulan. Hal ini menunjukkan ketercapaian sebesar 100% terhadap indikator waktu (time-bound). Monitoring mencakup hasil observasi terhadap 5 pita frekuensi utama yang dipantau secara konsisten, menunjukkan bahwa kegiatan ini bersifat achievable dan relevan terhadap tugas pokok UPT dalam menjaga ketertiban dan fungsi vital spektrum frekuensi nasional. Secara umum, pelaksanaan kegiatan ini terintegrasi dalam sistem pengawasan nasional ditjen infrastruktur digital dan mendukung pencapaian transformasi digital serta kesiapsiagaan nasional terhadap bencana.

IV. Dampak Kinerja

Pelaksanaan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio oleh Loka Monitor SFR Kendari memberikan dampak langsung yang positif bagi masyarakat di 17 kabupaten/kota wilayah kerja. Dengan adanya monitoring yang rutin dan terukur, masyarakat memperoleh jaminan bahwa layanan komunikasi berjalan tertib, stabil, dan bebas dari gangguan interferensi. Hal ini sangat penting karena kualitas komunikasi mempengaruhi banyak aspek kehidupan, mulai dari akses informasi, kegiatan ekonomi, hingga pelayanan publik yang berbasis teknologi.
Selain itu, monitoring mendorong kepatuhan pengguna frekuensi terhadap regulasi, sehingga tercipta keteraturan dalam pemanfaatan spektrum. Dampaknya, masyarakat dapat menikmati layanan telekomunikasi yang lebih adil dan merata, termasuk di daerah terpencil. Data hasil monitoring juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan infrastruktur komunikasi, sehingga masyarakat memperoleh manfaat nyata berupa peningkatan akses informasi, peluang usaha, dan dukungan terhadap aktivitas sosial.Dengan demikian, kegiatan monitoring tidak hanya menjaga aspek teknis, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan.



Gambar 3.4 Monitoring Pita Frekuensi Radio

V. Tindak Lanjut

Pelaksanaan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di kabupaten/kota dengan target 80% dan berhasil direalisasikan hingga 114% memberikan bukti nyata atas efektivitas kerja tim Loka Monitor SFR Kendari. Sebagai tindak lanjut, capaian ini perlu dijadikan momentum untuk memperkuat konsistensi pelaksanaan monitoring di periode berikutnya, sehingga standar kinerja yang tinggi dapat terus dipertahankan. Selain itu, evaluasi mendalam terhadap faktor keberhasilan seperti metode kerja, koordinasi tim, dan dukungan teknologi harus dilakukan agar praktik terbaik dapat diidentifikasi dan direplikasi pada kegiatan serupa di wilayah lain.
Langkah berikutnya adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis maupun manajerial, sehingga tim semakin siap menghadapi tantangan monitoring yang lebih kompleks. Hasil pencapaian juga perlu dipublikasikan kepada masyarakat dan stakeholder melalui laporan resmi,

infografis, atau sosialisasi publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Dengan tindak lanjut tersebut, pencapaian 114% tidak hanya menjadi angka keberhasilan, tetapi juga menjadi landasan untuk memperkuat sistem monitoring, meningkatkan kualitas layanan publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap peran Loka Monitor SFR Kendari.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Adapun beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dimasukkan dalam laporan ini adalah Pertama, perlu dilakukan perencanaan anggaran yang lebih komprehensif dengan memastikan alokasi dana mencakup seluruh wilayah target. Hal ini dapat dilakukan melalui koordinasi lebih awal dengan pihak terkait agar kebutuhan monitoring di setiap kabupaten/kota dapat diakomodasi secara proporsional. Kedua, instansi dapat menyusun strategi prioritas wilayah dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan potensi gangguan frekuensi, sehingga daerah yang belum terjangkau tetap masuk dalam rencana tindak lanjut.
Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme alternatif monitoring seperti pemanfaatan teknologi remote sensing atau kerja sama dengan instansi lokal untuk mengurangi biaya operasional di daerah dengan akses sulit. Langkah ini akan memastikan bahwa keterbatasan jarak dan akses tidak menjadi hambatan mutlak dalam pelaksanaan tugas.
Terakhir, hasil pencapaian yang melampaui target harus dijadikan momentum untuk memperkuat advokasi anggaran di tahun berikutnya, dengan menekankan pentingnya monitoring spektrum sebagai bagian dari pelayanan publik yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan rekomendasi tersebut, capaian tinggi yang telah diraih tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi pijakan untuk memperbaiki sistem perencanaan, memperluas jangkauan monitoring, dan meningkatkan kualitas layanan di seluruh wilayah kerja Loka Monitor SFR Kendari.

VI. Efisiensi

Pelaksanaan monitoring tetap berjalan optimal meskipun terdapat wilayah yang tidak dapat diakses kendaraan darat. Hal ini dicapai dengan memanfaatkan stasiun monitoring transportable yang mampu dipindahkan sesuai kebutuhan, sehingga cakupan wilayah tetap luas tanpa memerlukan penambahan infrastruktur baru atau sumber daya tambahan yang signifikan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga meningkatkan ketepatan waktu pelaksanaan monitoring dan memperluas cakupan pengawasan secara berkelanjutan



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

Seluruh proses monitoring dilakukan dengan mengutamakan kebutuhan pengguna spektrum, baik instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Monitoring dilakukan secara rutin dan menyeluruh agar tercipta keteraturan penggunaan spektrum frekuensi yang aman, tertib, dan tidak saling mengganggu sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan publik.

Akuntabel

Setiap kegiatan monitoring dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan. Hasil kegiatan terdokumentasi dengan baik dalam sistem pelaporan yang transparan, serta dilengkapi bukti administratif dan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kompeten

Petugas monitoring menggunakan perangkat SMFR Tetap, Transportable, dan Jinjing yang sesuai standar teknis serta teknis serta terus mengembangkan kemampuan melalui pelatihan dan pemutakhiran pengetahuan teknologi spektrum frekuensi. Ini mencerminkan semangat pembelajaran berkelanjutan.

Harmonis

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan kolaborasi yang baik antara anggota tim serta koordinasi lintas sektor, termasuk dukungan dari stakeholder local (pemda, TNI, Polri, Basarnas). Ini menunjukkan sinergi dalam menjalankan tugas.

Loyal

ASN menunjukkan kesetiaan terhadap tugas dan tanggung jawab negara dengan melaksanakan monitoring secara konsisten, bahkan dalam kondisi cuaca ekstrem atau medan yang sulit demi memastikan frekuensi radio digunakan secara legal dan tertib.

Adaptif

Tim monitoring menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika dilapangan, seperti perubahan teknologi komunikasi, kebutuhan dinamis masyarakat pengguna frekuensi, serta kondisi geografis yang menantang di wilayah Sulawesi Tenggara.

Kolaboratif

Kegiatan monitoring pita frekuensi, terutama pita marabahaya yang digunakan oleh dinas keselamatan, dilakukan secara kolaboratif dengan instansi pengguna seperti SAR, TNI, Polri, AirNav dan pihak lainnya, guna memastikan komunikasi keselamatan berjalan optimal tanpa gangguan.

I. Latar Belakang

Stasiun radio merupakan salah satu pengguna spektrum frekuensi yang wajib diawasi agar operasionalnya sesuai dengan izin yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemeriksaan stasiun radio menjadi indikator penting dalam pengelolaan spektrum frekuensi karena berfungsi memastikan kepatuhan terhadap parameter teknis, seperti frekuensi kerja, daya pancar, koordinat lokasi, serta konfigurasi perangkat. Dengan adanya pemeriksaan, potensi pelanggaran seperti penggunaan frekuensi tanpa izin, pergeseran frekuensi, atau penggunaan perangkat tidak bersertifikat dapat dicegah sejak dini.

Selain aspek teknis, pemeriksaan stasiun radio juga berperan dalam menjaga kualitas layanan komunikasi publik dan komersial. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya interferensi yang dapat mengganggu layanan masyarakat maupun penyelenggara telekomunikasi. Pemeriksaan yang dilakukan secara rutin dan terukur menjadi bentuk komitmen instansi dalam menegakkan aturan, meningkatkan kepatuhan, serta melindungi kepentingan publik.

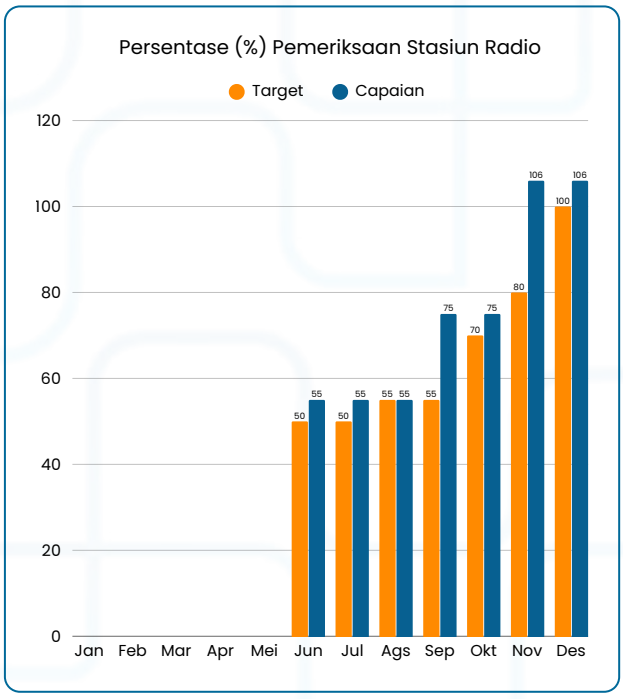
Indikator ini sekaligus mencerminkan efektivitas pengawasan di lapangan, karena hasil pemeriksaan dapat dijadikan dasar evaluasi terhadap tingkat kepatuhan pengguna spektrum di wilayah kerja. Dengan demikian, pemeriksaan stasiun radio tidak hanya berfungsi sebagai kontrol teknis, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga integritas, akuntabilitas, dan kualitas layanan komunikasi di tingkat kabupaten/kota.

II. Capaian

Pemeriksaan Stasiun Radio, terdiri dari :

1. Pemeriksaan Microwave link, melalui :

- Remote site : Akses NOC dan/atau NMS (Target : 100% diperiksa)
- Inspeksi Open Shelter (Target : 100% diperiksa)



Gambar 3.5 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

Keterangan Capaian:

A. Pemeriksaan Remote Site : 2574 data

- Data Remote Site pada Aplikasi Apstard : 2906 Data ISR
- Target Pemeriksaan Remote Site : 80%
- Capaian = 2574/2906 = 89% = 89 % > 80%
- Capaian Pemeriksaan Remote SIte target ISR = 100%



B. Pemeriksaan Open Shelter : 146 data

- Data Open Shelter pada Aplikasi Apstard : 194 Data
- Target Pemeriksaan Open Shelter : 60%
- Capaian = 146/194 = 72% = 72% > 60%
- Capaian Pemeriksaan Open Shelter : 100%

C. Pengukuran Parameter Teknis (Radio FM dan TV Digital)

1. Target Pengukuran Stasiun Radio FM : 18 Stasiun Radio
Pengukuran Stasiun Radio FM : 18 Stasiun Radio
Capaian : 18 /18 = 100%

2. Target Pengukuran Stasiun TV/DVBT : 10
Pengukuran Stasiun TV/DVBT : 10
Capaian : 10 /10 = 100%

Capaian Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio :
= (89 + 60 + 100 + 100) / (80+60+100+100)
= 361 / 340
= 106%

Isu/Risiko:

Hasil Inspeksi MW LInk baik Remote site dan Open Shelter belum mencapai hasil yang maksimal disebabkan terdapat data anomali yaitu data wilayah lain yang diluar data UPT Kendari.

III. Analisa

Berikut grafik capaian IK-1.2 5 Tahun Terakhir



Gambar 3.6 Capaian IK-1.2 5 Tahun Terakhir

Pemeriksaan stasiun radio merupakan salah satu kegiatan strategis Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari dalam rangka menjamin kesesuaian antara penggunaan spektrum frekuensi radio dengan izin yang telah diberikan oleh pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui dua pendekatan teknis, yakni metode remote site dan open shelter, yang masing-masing memiliki mekanisme pemeriksaan tersendiri.
Data capaian pemeriksaan stasiun radio microwave link baik melalui Remote Site dan Open Shelter tahun 2025.
Remote Site :
Open Shelter :
Metode remote site dilakukan dengan mengakses sistem jaringan seperti Network Monitoring System (NMS), Virtual Private Network (VPN), atau platform teknis lainnya yang terintegrasi dengan perangkat stasiun radio. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperoleh data teknis secara jarak jauh, yang kemudian dibandingkan dengan data yang tercantum pada Izin Stasiun Radio (ISR) dan/atau Sistem Informasi Manajemen Spektrum Frekuensi Radio (SIMS). Pada tahun 2025, pemeriksaan dengan metode ini menargetkan 100% dari 1797 ISR yang menjadi sasaran, dengan tingkat ketercapaian yang sangat tinggi berkat kemudahan akses sistem monitoring secara daring serta efisien waktu dan sumber daya.
Sementara itu, metode open shelter dilaksanakan melalui pemeriksaan langsung di lokasi fisik stasiun pemancar. Tim teknis melakukan verifikasi terhadap perangkat, parameter teknis, dan koordinator lokasi stasiun radio, untuk memastikan kesesuaian data lapangan ini memerlukan dukungan logistik dan koordinasi intensif, terutama di wilayah yang memiliki kondisi geografis menantang.
Secara keseluruhan, dengan pendekatan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Pemeriksaan dirancang secara spesifik dan menyasar langsung pada objek ISR yang telah ditetapkan. Indikator capaian terukur secara kuantitatif (ISR Remote Site dan ISR Open Shelter), dengan target ketercapaian 100% untuk memastikan kepatuhan pengguna spektrum. Target ini bersifat realistis dan dapat dicapai dengan dukungan sumber daya manusia dan teknologi yang tersedia, serta sangat relevan terhadap tugas pokok UPT dalam mengawasi kepatuhan perizinan frekuensi. Proses ini juga dilakukan dalam batas waktu tahun anggaran 2025, menjadikannya berbasis waktu yang jelas.

2. Pemeriksaan Stasiun Siaran, melalui :

- Pengukuran parameter teknis dan karakteristik radio FM (Target : Seluruh Stasiun Siaran Radio FM); dan
- Pengukuran parameter teknis dan karakteristik TV Digital (Target : Seluruh Stasiun Siaran TV Digital Terestrial)

Pengukuran parameter teknis dan karakteristik radio FM merupakan kegiatan strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio oleh penyelenggara siaran berjalan sesuai ketentuan teknis dan regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan dalam waktu mewujudkan tatanan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan bebas gangguan, khususnya dalam layanan penyiaran radio di wilayah Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2025, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari menetapkan target sebanyak 19 Izin Stasiun Radio (ISR) yang menjadi sasaran pengukuran. Target ini disusun dengan pendekatan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), dimana kegiatan ditujukan secara spesifik dengan stasiun radio FM aktif, dapat diukur secara kuantitatif, realistis untuk dicapai dalam satu tahun anggaran, serta relevan dalam konteks tugas pengawasan spektrum frekuensi radio dan dilakukan secara berkala dalam periode waktu yang terjadwal.

Pengukuran Stasiun Radio FM :

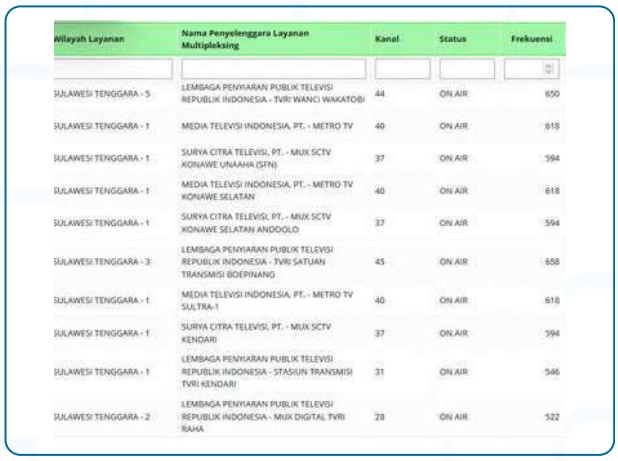
Pengukuran Stasiun TV DVBT :

Seiring perkembangan teknologi, radio FM kini berada dalam fase transisi dari sistem analog menuju ekosistem digital berbasis internet. Kondisi ini berdampak pada penurunan jumlah stasiun radio FM aktif di wilayah Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, pengukuran menjadi penting tidak hanya sebagai kegiatan teknis, tetapi juga sebagai upaya pemutakhiran data dan pemetaan eksistensi layanan radio yang masih beroperasi (on-air), sehingga pengawasan dapat dilakukan secara akurat dan tepat sasaran.



Gambar 3.7 Data Radio FM

Selain pengukuran radio FM, Loka Monitor juga melaksanakan pengukuran frekuensi radio untuk layanan televisi siaran digital terestrial, yang mencakup pengukuran parameter teknis layanan multiplexing, identifikasi penyelenggara program siaran, serta pengukuran kuat medan (field strength). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat pemancar dan siaran digital dapat dinikmati secara merata oleh Masyarakat. Target kegiatan ini ditetapkan sebanyak 10 ISR, yang seluruhnya telah dirancang dan dieksekusi secara terukur, sesuai prinsip SMART, serta relevan dalam rangka mendukung kebijakan nasional terkait migrasi penyiaran dari analog ke digital (Analog Switch Off).



Gambar 3.8 Data TV Digital

Kegiatan ini memiliki kekuatan (Strengths) berupa dukungan perangkat ukur yang memadai dan kompetensi teknis petugas pengukuran yang terus ditingkatkan. Selain itu, kegiatan ini mendukung kebijakan strategis nasional seperti transformasi digital dan penyebaran informasi yang merata. Namun demikian, terdapat kelemahan (Weaknesses) yaitu terbatasnya jumlah stasiun radio yang masih aktif serta akses geografis terhadap titik pengukuran siaran televisi digital yang tersebar di wilayah kepulauan dan pegunungan. Peluang (Opportunities) yang dapat dimanfaatkan Adalah peningkatan kerja sama dengan Lembaga penyiaran dan pemerintah daerah untuk mendukung digitalisasi penyiaran. Sementara itu, ancaman (Threats) meliputi percepatan pergeseran teknologi yang mengakibatkan layanan konvensional seperti radio FM menjadi kurang diminati. Serta potensi interferensi spektrum akibat pemanfaatan perangkat siaran tanpa izin di wilayah terpencil.

3. Monitoring Perangkat:

- 16 Target Jenis Perangkat yang Menjadi Prioritas
- Jumlah kegiatan monitoring Alat Perangkat Telekomunikasi (APT) 8 (delapan) kali pelaksanaan dalam 1(satu) tahun
- Jumlah jenis perangkat prioritas yang dimonitor dalam setiap kegiatan minimum 3 (tiga) jenis perangkat prioritas

Setiap alat dan /atau perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan, dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi standar teknis yang dibuktikan melalui sertifikat resmi. Ketentuan ini merupakan bahwa perangkat yang beredar tidak menimbulKan gangguan yang merugikan Masyarakat dan infrastruktur komunikasi nasional.
Namun, dalam prakteknya, peredaran alat/perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis masih kerap ditemukan, baik karena belum bersertifikat, tidak memiliki label resmi, maupun tidak terintegrasi dengan sistem QR Code yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan monitoring perangkat secara rutin. Pada tahun 2025, ditetapkan target 13 kegiatan pemeriksaan, dengan capaian 100% kegiatan terlaksana. Pemeriksaan tersebut mencakup 234 alat/perangkat telekomunikasi (APT) yang telah dimonitor, dimana 227 perangkat (96,99%) terkonfirmasi bersertifikat dan sesuai spesifikasi teknis, serta 7 perangkat (3,01%) ditemukan tidak bersertifikat, tidak berlabel, atau tidak memiliki QR Code.
Dengan capaian ini, Loka Monitor SFR Kendari telah menunjukkan akuntabilitas dalam menjalankan pengawasan perangkat telekomunikasi, sekaligus berperan aktif menjaga kualitas dan ketertiban penggunaan spektrum frekuensi di wilayah Sulawesi Tenggara.

IV. Dampak Kinerja

Pelaksanaan Pemeriksaan Stasiun Radio oleh Loka Monitor SFR Kendari memberikan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah kerja yang mencakup 17 kabupaten/kota.
Pemeriksaan ini memastikan bahwa setiap stasiun radio beroperasi sesuai izin yang diberikan dan mematuhi regulasi penggunaan spektrum frekuensi. Dampaknya, masyarakat dapat menikmati siaran radio yang lebih tertib, bebas dari gangguan interferensi, dan memiliki kualitas audio yang lebih baik.
Selain itu, pemeriksaan stasiun radio juga meningkatkan kepatuhan penyelenggara terhadap aturan yang berlaku. Hal ini mendorong terciptanya ekosistem komunikasi yang sehat, di mana masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan layanan siaran yang lebih profesional. Pemeriksaan yang konsisten turut memperkuat kepercayaan publik terhadap peran pemerintah dalam menjaga keteraturan penggunaan frekuensi, sehingga masyarakat merasa lebih terlindungi dan mendapatkan manfaat maksimal dari layanan komunikasi. Dengan demikian, kegiatan pemeriksaan bukan hanya aspek teknis, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan informasi di daerah.

V. Tindak Lanjut

Pelaksanaan Pemeriksaan Stasiun Radio dengan target 100% dan berhasil direalisasikan hingga 106% menunjukkan capaian yang melampaui ekspektasi serta komitmen kuat dalam menjaga ketertiban penggunaan spektrum frekuensi. Sebagai tindak lanjut, pencapaian ini perlu dijadikan momentum untuk memperkuat sistem pengawasan agar kualitas pemeriksaan tetap konsisten di periode berikutnya. Evaluasi terhadap faktor keberhasilan, seperti efektivitas koordinasi tim, dukungan teknologi, serta strategi lapangan, harus dilakukan untuk memastikan praktik terbaik dapat diidentifikasi dan diterapkan kembali. Selain itu, pencapaian yang melebihi target dapat dijadikan dasar untuk menyusun strategi peningkatan, misalnya dengan memperluas cakupan pemeriksaan ke wilayah yang lebih menantang atau berisiko tinggi. Langkah ini sekaligus menjadi bahan advokasi dalam perencanaan anggaran dan kebijakan, sehingga dukungan terhadap kegiatan pemeriksaan semakin kuat. Hasil capaian juga perlu dipublikasikan kepada masyarakat dan stakeholder sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, serta untuk memperkuat kepercayaan

publik terhadap kinerja Loka Monitor SFR Kendari. Dengan tindak lanjut tersebut, pencapaian 106% tidak hanya menjadi angka keberhasilan, tetapi juga pijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang frekuensi radio.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Sebagai rekomendasi atas pelaksanaan Pemeriksaan Stasiun Radio yang berhasil melampaui target hingga 106%, namun masih terdapat isu pada hasil inspeksi MW Link baik di Remote Site maupun Open Shelter karena muncul data anomali dari wilayah lain di luar cakupan UPT Kendari, maka beberapa langkah perbaikan perlu dilakukan. Pertama, perlu dilakukan penyempurnaan sistem validasi data agar hasil inspeksi benar-benar sesuai dengan wilayah kerja yang ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat mekanisme filter data, sehingga anomali dari wilayah lain tidak masuk ke dalam laporan UPT Kendari.

Kedua, instansi dapat mengembangkan koordinasi lintas wilayah dengan UPT lain untuk memastikan data yang masuk sesuai dengan batas administrasi masing-masing. Dengan adanya koordinasi ini, potensi tumpang tindih data dapat diminimalisasi dan hasil inspeksi menjadi lebih akurat. Ketiga, perlu dilakukan peningkatan kapasitas teknis tim pemeriksa, khususnya dalam penggunaan perangkat monitoring dan sistem pencatatan, agar mampu mendeteksi serta mengeliminasi data yang tidak relevan sejak awal.

Selain itu, hasil capaian yang melampaui target harus dijadikan momentum untuk memperkuat perencanaan kegiatan di periode berikutnya, termasuk penyesuaian anggaran dan strategi pemeriksaan agar seluruh aspek teknis dapat tercakup dengan baik. Dengan rekomendasi tersebut, pelaksanaan pemeriksaan tidak hanya berhasil secara kuantitatif, tetapi juga semakin berkualitas, akurat, dan berintegritas dalam mendukung ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Loka Monitor SFR Kendari.

VII. Efisiensi

Pelaksanaan Pemeriksaan Stasiun Radio dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dapat dilakukan melalui pemanfaatan sistem digital yang sudah tersedia, seperti ROL, sehingga proses pencatatan dan analisis hasil pemeriksaan dapat dilakukan secara otomatis dan real-time. Pemeriksaan di lapangan tetap menyeluruh, namun efisiensi dicapai dengan memanfaatkan data awal dari sistem monitoring untuk menentukan prioritas site yang perlu diverifikasi lebih detail. Selain itu, koordinasi lintas kabupaten/kota dengan standar pelaporan yang seragam akan mempercepat proses tindak lanjut dan mengurangi duplikasi pekerjaan. Di sisi internal, efisiensi juga dapat diperkuat melalui pelatihan teknis berkelanjutan bagi tim pemeriksa agar kompetensi tetap terjaga meskipun teknologi komunikasi terus berkembang. Dengan langkah-langkah tersebut, pemeriksaan stasiun radio dapat dilakukan secara menyeluruh, konsisten, dan transparan, sekaligus lebih efisien dalam penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya.



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

Petugas pemeriksa berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada pengguna frekuensi, baik operator maupun Masyarakat, dengan memastikan perangkat dan sistem komunikasi bekerja sesuai regulasi. Pemeriksaan dilakukan secara cepat, akurat, dan ramah demi menjaga kualitas layanan publik.

Akuntabel

Setiap hasil pemeriksaan dan pengukuran dilaporkan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai prosedur yang berlaku. Petugas menjunjung tinggi integritas dan memastikan bahwa setiap tindakan teknis terdokumentasi dengan benar, termasuk pengelolaan data pada perangkat yang dimonitor.

Kompeten

ASN melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan bekal keahlian teknis dibidang frekuensi dan perangkat komunikasi. Mereka terampil dalam mengoperasikan alat ukur, membaca parameter teknis siaran, serta memahami sistem transmisi microwave link dan perangkat siaran digital.

Harmonis

Pelaksanaan tugas melibatkan kerja sama lintas tim serta komunikasi yang baik dengan penyelenggara jaringan, pemilik stasiun siaran, dan mitra kerja lainnya. Kolaborasi yang harmonis ini menjaga hubungan profesional dan memperkuat sinergi lintas sektor.

Loyal

ASN menunjukkan loyalitas dengan melaksanakan tugas secara disiplin, patuh pada aturan, serta menjaga nama baik instansi. Meskipun dalam kondisi geografis dan teknis yang menantang, mereka tetap melaksanakan pemeriksaan hingga tuntas.

Adaptif

Dalam menghadapi migrasi teknologi dari analog ke digital, serta berbagai jenis perangkat baru yang muncul di pasar, ASN senantiasa meningkatkan kapasitas diri, beradaptasi dengan sistem dan perangkat modern, serta sigap terhadap perubahan regulasi.

Kolaboratif

Kegiatan ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti penyedia layanan siaran, pemilik ISR, dan tim pengawasan internal. Pendekatan kolaboratif mempercepat proses pemeriksaan dan memastikan pengawasan berjalan efektif dan menyeluruh.

I. Latar Belakang

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya strategis yang mendukung berbagai layanan komunikasi, mulai dari telekomunikasi, penyiaran, hingga sistem keselamatan publik. Karena sifatnya yang terbatas dan rentan terhadap interferensi, diperlukan pengawasan yang ketat agar penggunaannya tetap tertib dan efisien. Salah satu indikator penting dalam pengelolaan spektrum adalah penanganan gangguan frekuensi radio, yaitu upaya mendeteksi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan interferensi yang dapat mengganggu kualitas layanan komunikasi.

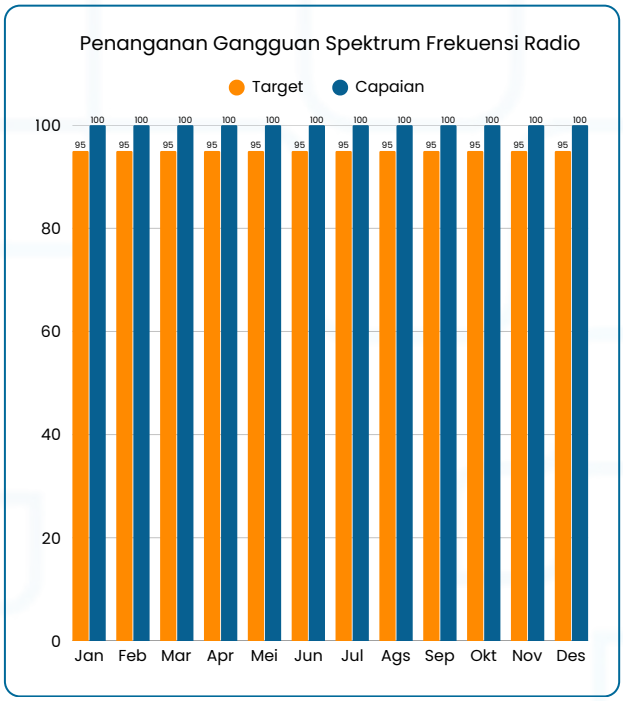
Loka Monitor SFR Kendari, dengan wilayah kerja mencakup 17 kabupaten/kota, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap gangguan frekuensi yang terjadi dapat ditangani secara cepat dan tepat. Penanganan gangguan dilakukan melalui kegiatan monitoring, verifikasi teknis, serta koordinasi dengan pengguna frekuensi terkait. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelancaran komunikasi publik, melindungi kepentingan masyarakat, dan mendukung keberlangsungan layanan telekomunikasi yang vital bagi pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, Loka Monitor SFR Kendari berhasil mencapai target penanganan gangguan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan efektivitas strategi pengawasan serta komitmen ASN di lingkungan Loka Monitor dalam menjaga kualitas layanan. Keberhasilan memenuhi target juga menjadi bukti bahwa sistem monitoring dan tindak lanjut yang diterapkan mampu memberikan hasil nyata, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi.

II. Capaian

Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio merupakan bagian krusial dari fungsi pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum yang sah dan efisien. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan sistem yang memiliki izin (ISR) dapat mengoperasikan perangkatnya tanpa mengalami gangguan dari pengguna lain, baik yang tidak sah maupun tidak sesuai peruntukan. Selain itu, kegiatan ini menjadi bentuk pelayanan publik dan tanggung jawab negara dalam menjaga keteraturan penggunaan spektrum.

Pada tahun 2025, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari telah menerima empat laporan aduan gangguan spektrum frekuensi radio dari pengguna yang sah. Seluruh laporan telah ditindaklanjuti dengan status clear 100%, yang dibuktikan melalui dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) serta hasil penanganan teknis di lapangan.



Gambar 3.9 Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Keterangan Capaian:

Jumlah Gangguan SFR yang ditangani : 3 Aduan Gangguan
Jumlah Total Gangguan SFR: 3 Aduan Gangguan

Capaian :
(Jumlah Gangguan SFR yang ditangani/Jumlah Total Gangguan SFR) x 100%
= (3/3) x 100% = 100%

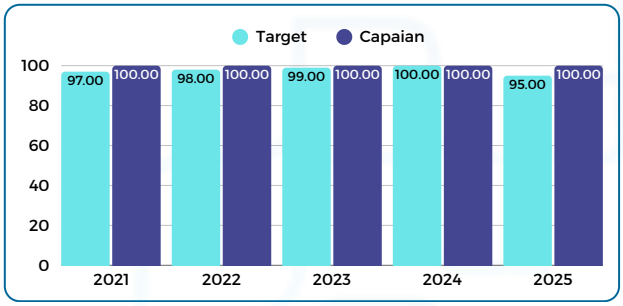
Rekapitulasi Penanganan Aduan Gangguan SFR Tahun 2025:

1. Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Airband Airnav Bandara Haluoleo Kendari di kabupaten Konawe Selatan (Status Clear)
2. Penanganan Gangguan Frekuensi Repeater Denhubrem 143, korem 143/HO di Kabupaten Konawe dan Kota Kendari (Status Clear)
3. Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Sekda Baubau di Kota Baubau (Status: clear)

Isu/Risiko:
Terdapat 3 Kegiatan Penanganan Gangguan yang telah ditindaklanjuti di Tahun 2025

III. Analisa

Berikut Capaian IK-1.3 5 Tahun Terakhir



Gambar 3.10 Capaian IK-1.3 5 Tahun Terakhir

Penangan gangguan spektrum frekuensi radio dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 100% gangguan SFR tertangani dibuktikan dengan terbitnya surat perintah tugas (SPT), khusus untuk gangguan SFR pada dinas keselamatan, batas maksimal waktu terbitnya Surat Perintah Tugas (SPT) adalah 1x24 jam.
- Gangguan pada frekuensi HF, perbatasan dan internasional dilaporkan / dikoordinir oleh kantor pusat (Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital).
- Penanganan gangguan SFR dilakukan terhadap seluruh dinas.
- Prioritas penanganan gangguan SFR pada dinas keselamatan.
- Gangguan SFR wajib memperhatikan kualitas waktu penanganan.

Tahun 2025, penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dilakukan atas 4 (empat) laporan aduan yang masuk dengan status clear 100% sebagaimana yang telah disebutkan dalam keterangan capaian di atas.

Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio oleh Loka Monitor SFR Kendari pada tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan SMART yang terstruktur. Secara spesifik (Specific), kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti seluruh laporan gangguan frekuensi yang berasal dari pengguna sah yang telah memiliki izin stasiun radio (ISR), dengan prioritas utama pada dinas keselamatan.

Dari sisi terukur (Measurable), keberhasilan kegiatan ini dibuktikan dengan tercapainya target 100% penyelesaian aduan gangguan, yang didokumentasikan melalui penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) serta hasil akhir penanganan teknis di lapangan dengan status CLEAR. Kegiatan ini tergolong dapat dicapai (Achievable) karena didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, peralatan pengukuran dan pelacakan gangguan yang memadai, serta sistem administrasi digital yang mendukung efisiensi pelaksanaan. Dari sisi relevansi (Relevance), DJID dalam mewujudkan keteraturan dan kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi di seluruh wilayah Indonesia. Terakhir, aspek batasan waktu (Time-Bound) ditegaskan melalui ketentuan bahwa penanganan gangguan, khususnya yang terkait dengan dinas keselamatan, wajib dilaksanakan maksimal dalam waktu 1x24 jam sejak laporan diterima.

IV. Dampak Kinerja

Pelaksanaan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio oleh Loka Monitor SFR Kendari memberikan dampak yang sangat penting bagi masyarakat di wilayah kerja yang mencakup 17 kabupaten/kota. Dengan adanya penanganan gangguan, masyarakat dapat menikmati layanan komunikasi yang lebih stabil, jernih, dan bebas dari interferensi yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Hal ini berdampak langsung pada kelancaran komunikasi, baik untuk kebutuhan pribadi, bisnis, maupun pelayanan publik yang berbasis teknologi.

Selain itu, penanganan gangguan juga meningkatkan rasa aman dan kepastian hukum bagi pengguna frekuensi. Masyarakat dan penyelenggara telekomunikasi merasa lebih terlindungi karena setiap gangguan segera ditindaklanjuti sesuai prosedur. Dampaknya, kualitas layanan komunikasi di daerah semakin meningkat dan mendukung keterhubungan masyarakat dengan informasi serta peluang ekonomi. Dengan demikian, kegiatan penanganan gangguan bukan hanya aspek teknis, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, menjaga keteraturan penggunaan spektrum, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peran negara dalam bidang komunikasi.

V. Tindak Lanjut

Pelaksanaan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio dengan target 95% dan berhasil direalisasikan hingga 100% menunjukkan komitmen kuat Loka Monitor SFR Kendari dalam menjaga ketertiban penggunaan frekuensi. Sebagai tindak lanjut, capaian ini perlu dijadikan momentum untuk memperkuat sistem penanganan gangguan agar kualitas layanan tetap konsisten dan berkelanjutan. Evaluasi terhadap faktor keberhasilan, seperti efektivitas koordinasi tim, kecepatan respon, serta dukungan teknologi, harus dilakukan untuk memastikan praktik terbaik dapat diidentifikasi dan diterapkan kembali.
Selain itu, pencapaian penuh ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun strategi peningkatan di periode berikutnya, misalnya dengan memperluas cakupan penanganan gangguan ke wilayah yang lebih rawan atau berisiko tinggi. Langkah ini sekaligus menjadi bahan advokasi dalam perencanaan anggaran dan kebijakan, sehingga dukungan terhadap kegiatan penanganan gangguan semakin kuat. Hasil capaian juga perlu dipublikasikan kepada masyarakat dan stakeholder sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, serta untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Loka Monitor SFR Kendari. Dengan tindak lanjut tersebut, pencapaian 100% tidak hanya menjadi angka keberhasilan, tetapi juga pijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang spektrum frekuensi radio.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Pelaksanaan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio dengan target 95% dan berhasil direalisasikan hingga 100% merupakan capaian yang sangat baik karena tidak ditemukan isu atau kendala dalam pelaksanaannya. Sebagai rekomendasi perbaikan, langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat sistem penanganan agar capaian maksimal ini dapat terus dipertahankan di periode berikutnya. Hal ini dapat diwujudkan dengan menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang lebih rinci, sehingga setiap tahapan penanganan gangguan memiliki panduan yang jelas dan konsisten.
Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas tim melalui pelatihan teknis maupun simulasi penanganan gangguan, agar kecepatan dan ketepatan respon tetap terjaga. Penggunaan teknologi monitoring yang lebih canggih juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mendeteksi serta menyelesaikan gangguan. Terakhir, hasil capaian yang optimal ini sebaiknya dipublikasikan kepada masyarakat dan stakeholder sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Loka Monitor SFR Kendari. Dengan rekomendasi tersebut, pencapaian 100% tidak hanya menjadi keberhasilan kuantitatif, tetapi juga menjadi pijakan untuk menjaga kualitas layanan publik yang berkelanjutan.

VII. Efisiensi

Pelaksanaan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dapat dilakukan melalui pemanfaatan sistem digital seperti ROL untuk deteksi dini gangguan secara real-time, sehingga tim dapat segera mengetahui lokasi dan jenis gangguan tanpa harus melakukan inspeksi manual yang memakan waktu. Setelah gangguan teridentifikasi, langkah efisien berikutnya adalah melakukan analisis cepat berbasis data guna menentukan prioritas penanganan, sehingga sumber daya difokuskan pada gangguan yang paling berdampak terhadap layanan masyarakat. Koordinasi lintas unit dan stakeholder juga perlu diperkuat agar tindak lanjut dapat dilakukan secara serentak dan konsisten.

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

Kegiatan ini menunjukkan komitmen tinggi dalam melayani Masyarakat pengguna spektrum frekuensi radio secara cepat dan tuntas. Tindakan penanganan gangguan dilakukan secara responsif, bahkan untuk gangguan pada dinas keselamatan diberi prioritas penanganan maksimal dalam 1x24 jam, mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan public.

Akuntabel

Setiap laporan aduan yang masuk ditindaklanjuti secara administratif dan teknis dengan bukti Surat Perintah Tugas (SPT) sebagai dokumentasi penanganan. Capaian 100% gangguan tertangani menunjukkan ASN bekerja bertanggung jawab dan transparan terhadap tugas yang diemban.

Kompeten

Penanganan gangguan dilaksanakan oleh SDM yang profesional dan berkompeten di bidangnya, dengan penggunaan perangkat monitoring dan analisis gangguan yang tepat serta penguasaan teknis terhadap spektrum frekuensi dan perangkat penyebab gangguan.

Harmonis

Dalam proses penanganan, ASN membangun sinergi dan kerja sama lintas lembaga, terutama dengan pemangku kepentingan terkait seperti TNI, Polri, dan instansi pengguna dinas keselamatan, serta koordinasi dengan direktorat pengendalian infrastruktur digital.

Loyal

Seluruh proses dilaksanakan dalam rangka loyalitas terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk pemenuhan kewajiban melindungi spektrum nasional dari gangguan, serta melaksanakan arahan pimpinan secara profesional.

Adaptif

ASN tanggap terhadap dinamika gangguan yang makin kompleks akibat pesatnya perkembangan perangkat nirkabel dan teknologi digital. Mereka terus menyesuaikan cara kerja dan teknologi yang digunakan dalam mendeteksi dan menangani gangguan secara efisien.

Kolaboratif

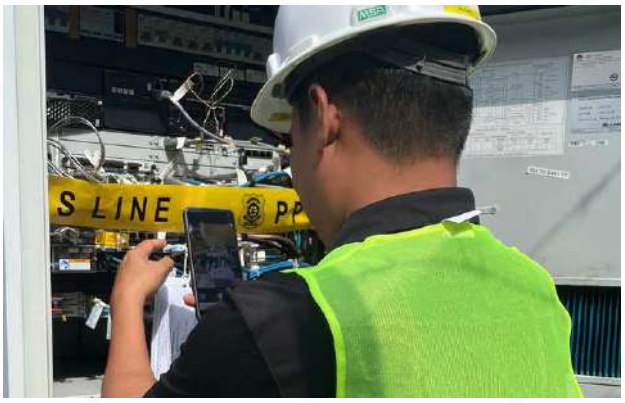
Pelaksanaan kegiatan ini mencerminkan kerja kolaboratif antar unit dan pemangku kepentingan untuk menciptakan tata kelola spektrum frekuensi yang tertib, aman, dan andal demi mendukung transformasi digital nasional.

I. Latar Belakang

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas yang harus dikelola secara tertib dan efisien untuk mendukung kelancaran komunikasi publik, telekomunikasi, dan penyiaran. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan penggunaan frekuensi tanpa izin, pergeseran frekuensi dari ketentuan, maupun penggunaan alat/perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan interferensi, menurunkan kualitas layanan, serta merugikan masyarakat dan penyelenggara layanan.
Untuk itu, penertiban spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi menjadi indikator penting dalam pengawasan. Kegiatan penertiban dilakukan melalui inspeksi lapangan, verifikasi izin, serta tindakan administratif terhadap pelanggaran yang ditemukan.



Gambar 3.11 Penertiban SFR dan APT di Kota Kendari

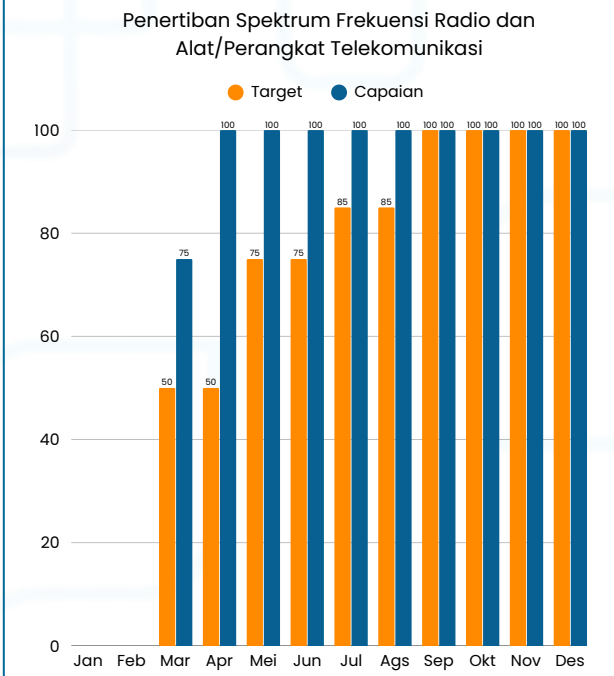


Gambar 3.12 Pemasangan PPNS Line

Selain memastikan kepatuhan terhadap regulasi, penertiban juga berfungsi sebagai langkah preventif agar penggunaan spektrum tetap sesuai aturan dan perangkat yang beredar memenuhi standar teknis yang ditetapkan.
Di wilayah kerja Loka Monitor SFR Kendari yang mencakup 17 kabupaten/kota, penertiban ini menjadi wujud komitmen instansi dalam menjaga keteraturan penggunaan spektrum dan melindungi masyarakat dari gangguan komunikasi. Pencapaian indikator sesuai target menunjukkan efektivitas strategi pengawasan serta dedikasi ASN dalam menegakkan aturan. Dengan demikian, penertiban bukan hanya tindakan korektif, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan integritas layanan publik, akuntabilitas pengelolaan spektrum, dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang telekomunikasi.

II. Capaian

Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi dilakukan dalam rangka pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat telekomunikasi di wilayah Sulawesi Tenggara serta terpenuhinya standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang digunakan tidak menimbulKan gangguan spektrum frekuensi yang merugikan kepada Masyarakat atau penyelenggaraan telekomunikasi lainnya. Dari kegiatan itu diharapkan terciptanya tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi di wilayah Sulawesi Tenggara sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku



Gambar 3.13 Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan APT

Keterangan Capaian:

- Perangkat Termonitor : 489
- Perangkat Bersertifikat : 476
- Pelanggaran Perangkat yang Ditindaklanjuti : 13
- Target Perangkat Termonitor : 300 Jenis/Type APT

Capaian Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital Tahun 2025
= (Jumlah Perangkat Bersertifikat Termonitor + Jumlah Pelanggaran Perangkat Ditindaklanjuti) / Jumlah Perangkat Termonitor
= (476 + 13) / 489
= 100%

- Jumlah Kegiatan Monitoring APT : 19 SPT
- Target Kegiatan Monitoring APT = 8 Kegiatan

Capaian : 200%

Perangkat Termonitor : 476
Target Perangkat Termonitor : 300
Capaian : 159%

Isu/Resiko:
Kegiatan Monitoring APT dilaksanakan paralel dengan kegiatan Monitoring dan Pengukuran, karena tidak tersedia anggaran khusus untuk Monitoring APT

III. Analisa

Berikut Capaian IK-1.4 5 Tahun Terakhir



Gambar 3.14 Capaian IK-1.4 5 Tahun Terakhir

Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Target Penertiban SFR sebesar 91%.
2. Jumlah data ilegal merupakan jumlah data temuan SFR dengan status ilegal pada kegiatan Penertiban Nasional (Tibnas) maupun penertiban skala regional UPT.
3. Jumlah ilegal menjadi off air dibuktikan dari surat pernyataan, surat teguran atau berita acara.
4. Target penertiban APT sebesar 96%.
5. Melaksanakan penertiban alat telekomunikasi dan perangkat telekomunikasi yaitu dilakukan minimal 3 (tiga) kali kegiatan dalam setahun yang dibuktikan dengan surat teguran, surat pernyataan dan berita acara pengamanan/penyegelan.

Tahun 2025, Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yang terbagi di beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Tenggara.

1. Waktu dan tempat pelaksanaan penertiban SFR dan APT
2. Penertiban Frekuensi
3. Penertiban Alat/Perangkat

Pelaksanaan kegiatan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi dirancang secara terukur dan sistematis. Secara spesifik, kegiatan ini menyasar penggunaan spektrum frekuensi dan perangkat telekomunikasi ilegal atau yang tidak sesuai standar teknis, dengan tujuan menciptakan keteraturan dalam penggunaan spektrum di wilayah Sulawesi Tenggara. Dari sisi measurable atau terukur, target pelaksanaan ditetapkan

dengan capaian sebesar 91% untuk penertiban spektrum frekuensi radio dan 96% untuk alat/perangkat telekomunikasi, dengan indikator kinerja berupa surat teguran, berita acara penyegelan, atau pernyataan off-air dari pengguna.
Kegiatan ini achievable atau dapat dicapai karena didukung oleh sumber daya manusia teknis yang kompeten, peralatan monitoring, serta kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Dari sisi relevansi, kegiatan ini sejalan dengan sasaran strategis Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, khususnya dalam memastikan keamanan dan keteraturan komunikasi nasional. Akhirnya, kegiatan ini bersifat time-bound karena dilaksanakan minimal tiga kali dalam satu tahun dengan tindak lanjut administratif setiap kali kegiatan berlangsung.

IV. Dampak Kinerja

Pelaksanaan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi oleh Loka Monitor SFR Kendari memberikan dampak langsung yang besar terhadap masyarakat di 17 kabupaten/kota wilayah kerja. Penertiban ini memastikan bahwa setiap penggunaan frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi sesuai dengan izin dan standar teknis yang berlaku. Dampaknya, masyarakat dapat menikmati layanan komunikasi yang lebih tertib, aman, dan bebas dari gangguan interferensi yang sering muncul akibat penggunaan perangkat ilegal atau tidak sesuai ketentuan.
Selain itu, penertiban juga meningkatkan kesadaran masyarakat dan penyelenggara telekomunikasi akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini menciptakan ekosistem komunikasi yang sehat, di mana masyarakat memperoleh layanan yang lebih berkualitas dan merata. Penertiban perangkat ilegal turut melindungi masyarakat dari potensi kerugian, baik berupa gangguan komunikasi maupun risiko keamanan. Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya menjaga keteraturan teknis, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap peran pemerintah dalam menghadirkan layanan telekomunikasi yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

V. Tindak Lanjut

Pelaksanaan Penertiban Spektrum



Gambar 3.15 Penertiban Alat Perangkat Telekomunikasi

Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi dengan target 75% dan berhasil direalisasikan hingga 100% menunjukkan komitmen Loka Monitor SFR Kendari dalam menjaga ketertiban penggunaan frekuensi serta memastikan perangkat telekomunikasi yang beroperasi sesuai regulasi. Sebagai tindak lanjut, capaian ini perlu dijadikan momentum untuk memperkuat sistem penertiban agar kualitas pengawasan tetap konsisten dan berkelanjutan. Evaluasi terhadap faktor keberhasilan, seperti efektivitas koordinasi tim, dukungan teknologi, serta strategi lapangan, harus dilakukan untuk memastikan praktik terbaik dapat diidentifikasi dan diterapkan kembali.
Selain itu, pencapaian penuh ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun strategi peningkatan di periode berikutnya, misalnya dengan memperluas cakupan penertiban ke wilayah yang lebih rawan atau berisiko tinggi. Langkah ini sekaligus menjadi bahan advokasi dalam perencanaan anggaran dan kebijakan, sehingga dukungan terhadap kegiatan penertiban semakin kuat. Hasil capaian juga perlu dipublikasikan kepada masyarakat dan stakeholder sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, serta untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Loka Monitor SFR Kendari. Dengan tindak lanjut tersebut, pencapaian 100% tidak hanya menjadi angka keberhasilan, tetapi juga pijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Sebagai rekomendasi perbaikan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penyusunan perencanaan anggaran yang lebih detail dan terintegrasi, sehingga kegiatan Monitoring APT dapat memiliki alokasi dana tersendiri tanpa harus digabung dengan kegiatan lain.
Selain itu, perlu dilakukan advokasi anggaran kepada pihak terkait dengan menekankan pentingnya Monitoring APT sebagai bagian dari penertiban spektrum yang berkelanjutan. Dengan adanya dukungan anggaran khusus, kegiatan dapat dilaksanakan lebih fokus dan hasilnya lebih optimal. Rekomendasi berikutnya adalah menyusun jadwal pelaksanaan yang terpisah dan terstruktur, agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan yang berpotensi mengurangi efektivitas monitoring.
Di sisi teknis, instansi dapat mempertimbangkan pemanfaatan teknologi monitoring yang lebih efisien untuk mengurangi beban biaya operasional, sehingga kegiatan tetap berjalan meskipun anggaran terbatas. Dengan rekomendasi tersebut, pelaksanaan penertiban tidak hanya berhasil secara kuantitatif, tetapi juga semakin berkualitas, terencana, dan berkelanjutan dalam mendukung ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di wilayah kerja Loka Monitor SFR Kendari.

VII. Efisiensi

Pelaksanaan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dapat dilakukan melalui pemanfaatan sistem digital seperti ROL untuk mendeteksi penggunaan frekuensi dan perangkat yang tidak sesuai izin secara real-time. Dengan sistem ini, tim dapat segera mengidentifikasi potensi pelanggaran tanpa harus melakukan pemeriksaan manual yang berulang, sehingga waktu dan tenaga dapat dihemat. Selanjutnya, penertiban dilakukan dengan prioritisasi kasus pelanggaran berdasarkan tingkat risiko dan dampaknya terhadap layanan masyarakat, sehingga sumber daya difokuskan pada penanganan yang paling mendesak.
Efisiensi juga dapat diperkuat melalui koordinasi lintas unit dan stakeholder agar proses penertiban berjalan serentak, konsisten, dan sesuai regulasi. Di sisi internal, tim perlu dibekali dengan pelatihan teknis berkelanjutan untuk memastikan kompetensi tetap terjaga dalam menghadapi perkembangan teknologi perangkat telekomunikasi. Dengan langkah-langkah tersebut, penertiban tidak hanya lebih cepat dan efisien, tetapi juga transparan, akuntabel, dan mampu menjaga keteraturan penggunaan spektrum frekuensi radio serta perangkat telekomunikasi di seluruh wilayah kerja Loka Monitor SFR Kendari.



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

Petugas penertiban selalu mengedepankan pelayanan publik dengan pendekatan yang humanis dan solutif. Masyarakat atau pelaku usaha yang perangkatnya tidak sesuai standar diberikan penjelasan, edukasi, serta dibimbing agar memahami pentingnya legalitas dan kepatuhan terhadap regulasi, bukan hanya langsung diberikan sanksi.

Akuntabel

Setiap proses penertiban didokumentasikan secara lengkap dan transparan melalui berita acara, surat teguran, dan surat pernyataan. Bukti tindak lanjut seperti penyegelan atau penghentian penggunaan perangkat illegal dilakukan secara administratif dan teknis sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Kompeten

ASN yang bertugas dalam kegiatan penertiban dibekali keahlian teknis yang memadai, mulai dari identifikasi frekuensi illegal, pengukuran teknis perangkat, hingga pemahaman terhadap regulasi. Kompetensi ini terus ditingkatkan melalui pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan.

Harmonis

Dalam menjalankan tugas, petugas penertiban membangun kerja sama yang baik dengan instansi lain seperti kepolisian, pemerintah daerah, dan Masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini menciptakan sinergi dan menghindari gesekan dalam proses pengawasan.

Loyal

ASN yang terlibat menunjukkan loyalitas tinggi terhadap kebijakan Kementerian Komdigi dan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Mereka menjalankan penertiban sesuai aturan, tanpa intervensi pribadi atau tekanan pihak lain, dan tetap berkomitmen menjaga kepentingan nasional.

Adaptif

Tim penertiban cepat menyesuaikan diri dengan tantangandi lapangan, seperti perubahan teknologi perangkat, metode distribusi perangkat illegal melalui online, maupun pergeseran pola pelanggara. Mereka juga adaptif dalam mengolah data digital dan pemantauan berbasis sistem.

Kolaboratif

Kegiatan ini tidak dijalankan secara parsial. Tim bekerja Bersama antar instansi, UPT lain, dan aparat penegak hukum untuk memperluas jangkauan dan efektivitas penertiban. Kolaborasi juga dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran.

I. Latar Belakang

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas yang harus dijaga pemanfaatannya secara tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perizinan. Untuk memastikan hal tersebut, keberadaan stasiun monitor frekuensi radio di Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi sangat vital. Stasiun monitor berfungsi sebagai pusat pengawasan teknis yang melakukan pemantauan, pencatatan, dan analisis terhadap penggunaan spektrum di wilayah kerja masing-masing. Operasional stasiun monitor yang terjaga dengan baik menjamin tersedianya data akurat mengenai kondisi lapangan, sehingga mendukung penegakan aturan dan penanganan gangguan secara cepat dan tepat.

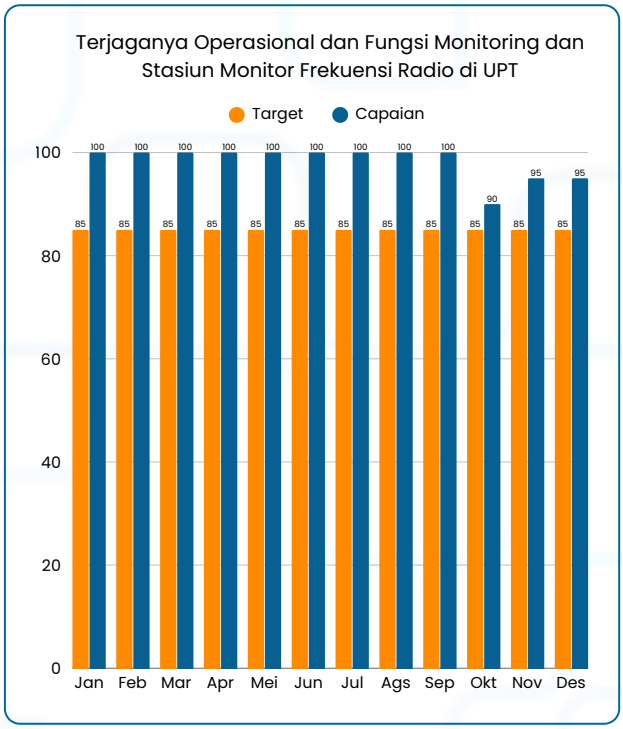
Indikator ini menekankan pentingnya keberlangsungan fungsi monitoring, baik dari sisi kesiapan perangkat, sistem, maupun sumber daya manusia yang mengoperasikan stasiun monitor. Dengan operasional yang terjaga, UPT dapat melaksanakan tugas pengawasan secara berkesinambungan, mendeteksi potensi pelanggaran, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut yang sesuai. Hal ini tidak hanya mendukung efektivitas pengelolaan spektrum, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan publik di bidang telekomunikasi.

Pencapaian indikator sesuai target menunjukkan bahwa UPT mampu menjaga kesiapan operasional stasiun monitor sepanjang tahun, sehingga fungsi pengawasan tetap berjalan optimal. Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen instansi dalam memastikan keteraturan penggunaan spektrum frekuensi radio, melindungi masyarakat dari gangguan komunikasi, serta mendukung pembangunan sektor telekomunikasi yang berintegritas dan berkelanjutan.

II. Capaian

Stasiun monitor yang dimaksud Adalah stasiun monitor tetap atau transportable yang tercatat dan terintegrasi dalam aplikasi Sistem Monitoring Spektrum Nasional (SMSN) dan Report Online (ROL). Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari saat ini memiliki 2 (dua) stasiun Monitor transportable, yaitu :

1. Site Ambaipua yang berlokasi di Kabupaten Konawe Selatan, dan
2. Site Bau-bau yang berlokasi di Bau-bau.



Gambar 3.16 Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dan Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Keterangan Capaian:

- Jumlah SLA Stasiun Monitor Tetap/Transportable : 180%
- Jumlah Stasiun Monitor Tetap/Tramsportable : 2
- Jumlah SLA Stasiun Bergerak : 200%
- Jumlah SLA Stasiun Bergerak : 2

Capaian :
=((Jumlah SLA Sta.Mon.Tetap_Transportable/Jumlah Sta.Mon Tetap_Transportable) + (Jumlah SLA Sta.Mon Bergerak/Jumlah Sta.Mon Bergerak)) / 2
= ((180/2) + (200/2)) / 2
= (90% + 100%) / 2 = 95%

Keterangan :
SLA Sta.Mon Transportable Ambaipua : 100%
SLA Sta Mon. Transportable Baubau : 80%*
Jumlah SLA Sta. Mon Transportable = 180%

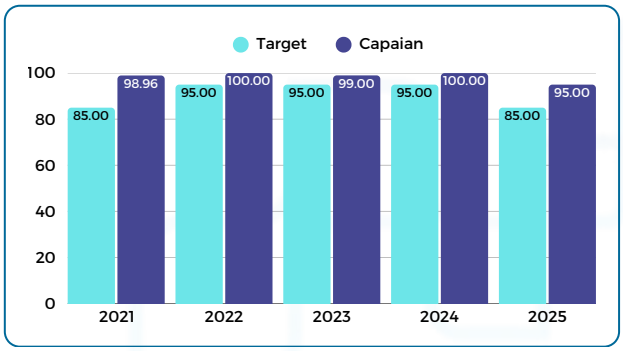
*Sta Mon Transportable Baubau masih dalam proses perbaikan

SLA Mobil Mon DF1 (DDF 205) : 100%
SLA Mobil Mon DF2 (DDF 255) : 100%
Jumlah SLA Sta Mon Bergerak : 200%

Isu/Resiko:
Stasiun Monitor Transportable Site Baubau masih dalam proses perbaikan dan telah dilaporkan melalui Nodin No. 682/Lokmon.74/SP.02.10/11/2025 tanggal 5 Nopember 2025 perihal: Penyampaian status Offline stasiun monitor Transportable. Ditargetkan Kondisi Normal pada Bulan Januari 2026

III. Analisa

Berikut Capaian IK-1.5 5 Tahun Terakhir



Gambar 3.17 Capaian IK-1.5 5 Tahun Terakhir

Keberfungsian dan kesiapan operasional kedua stasiun monitor ini merupakan bagian penting dalam mendukung kegiatan pemantauan spektrum frekuensi radio secara efektif. Penilaian terhadap operasional stasiun monitor dilakukan berdasarkan beberapa syarat sebagai berikut :

- Stasiun monitor siap operasional apabila tidak mengalami kondisi OFF secara penuh dalam periode 1 bulan, serta menyampaikan hasil data monitoring secara rutin melalui aplikasi ROL.
- Total stasiun monitor Adalah seluruh stasiun aktif yang tidak mengalami kondisi OFF Penuh.
- Stasiun monitor dengan status OFF warna jingga (misalnya karena perawatan atau kendala teknis minor) tidak dimasukkan dalam perhitungan performa operasional.

Pada tahun 2025, kedua stasiun monitor, yaitu Site Ambaipua dan Site Bau-bau, menunjukkan performa yang baik dan siap operasional sepanjang tahun, dengan status aktif dan menyampaikan hasil monitoring rutin melalui ROL tanpa gangguan mayor.

III. Dampak Kinerja

Pelaksanaan Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring serta Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT oleh Loka Monitor SFR Kendari memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat di wilayah kerja. Dengan operasional yang terjaga, masyarakat memperoleh jaminan bahwa pengawasan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan secara berkesinambungan dan profesional. Hal ini memastikan layanan komunikasi tetap stabil, tertib, dan bebas dari gangguan yang dapat menghambat aktivitas sehari-hari, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun pelayanan publik.
Selain itu, keberlangsungan fungsi monitoring dan stasiun monitor memperkuat kepatuhan pengguna frekuensi terhadap regulasi yang berlaku. Masyarakat merasakan manfaat berupa keteraturan dalam penggunaan spektrum, sehingga kualitas layanan telekomunikasi semakin meningkat dan merata hingga ke daerah terpencil. Data hasil monitoring juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan infrastruktur komunikasi, yang pada akhirnya memberikan akses informasi lebih luas bagi masyarakat. Dengan demikian, terjaganya operasional monitoring bukan hanya menjaga aspek teknis, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap peran pemerintah dalam menghadirkan layanan komunikasi yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.

V. Tindak Lanjut

Pelaksanaan Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring serta Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT dengan target 85% dan berhasil direalisasikan hingga 95% menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam menjaga kesiapan sarana dan prasarana monitoring. Sebagai tindak lanjut, capaian ini perlu dijadikan momentum untuk memperkuat sistem pemeliharaan dan operasional agar kualitas monitoring tetap konsisten dan berkelanjutan. Evaluasi terhadap faktor keberhasilan, seperti efektivitas koordinasi tim, kesiapan perangkat,serta dukungan teknis, harus dilakukan untuk memastikan praktik terbaik dapat



diidentifikasi dan diterapkan kembali.
Selain itu, pencapaian yang melampaui target dapat dijadikan dasar untuk menyusun strategi peningkatan di periode berikutnya, misalnya dengan memperluas cakupan monitoring ke wilayah yang lebih rawan atau berisiko tinggi. Langkah ini sekaligus menjadi bahan advokasi dalam perencanaan anggaran dan kebijakan, sehingga dukungan terhadap kegiatan operasional stasiun monitor semakin kuat. Hasil capaian juga perlu dipublikasikan kepada masyarakat dan stakeholder sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, serta untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Loka Monitor SFR Kendari. Dengan tindak lanjut tersebut, pencapaian 95% tidak hanya menjadi angka keberhasilan, tetapi juga pijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang spektrum frekuensi radio.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Sebagai rekomendasi perbaikan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah peningkatan sistem pemeliharaan preventif agar kondisi perangkat dapat terpantau secara berkala dan potensi gangguan dapat diminimalisasi sebelum terjadi.
Selain itu, perlu disusun mekanisme backup operasional dengan menyiapkan perangkat cadangan atau alternatif monitoring, sehingga ketika satu stasiun mengalami kendala, fungsi pengawasan tetap berjalan tanpa terhenti. Rekomendasi berikutnya adalah memperkuat koordinasi teknis dan manajerial untuk memastikan proses perbaikan dapat dilakukan lebih cepat, termasuk penyiapan anggaran khusus untuk pemeliharaan darurat. Di sisi teknis, pemanfaatan sistem monitoring berbasis digital juga dapat membantu mendeteksi kondisi perangkat secara real-time, sehingga gangguan dapat segera diidentifikasi dan ditangani.
Dengan rekomendasi tersebut, capaian 95% tidak hanya menjadi bukti keberhasilan, tetapi juga menjadi pijakan untuk memperbaiki sistem operasional agar lebih tangguh, berkelanjutan, dan mampu menjaga kualitas pengawasan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Loka Monitor SFR Kendari.

VII. Efisiensi

Pelaksanaan Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring serta Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dapat dilakukan melalui pengelolaan sistem monitoring yang terstruktur, pemeliharaan perangkat secara berkala, serta manajemen sumber daya manusia yang tepat. Operasional stasiun monitor harus dijaga dengan memastikan perangkat selalu dalam kondisi optimal melalui pemeliharaan terjadwal dan berbasis kebutuhan, sehingga mengurangi risiko downtime. Selain itu, efisiensi dapat dicapai dengan pengaturan tugas tim secara bergantian, pelatihan teknis berkelanjutan, serta penerapan standar pelaporan yang seragam untuk mempercepat tindak lanjut hasil monitoring. Koordinasi lintas kabupaten/kota juga penting agar hasil pengawasan lebih konsisten dan tidak terjadi duplikasi pekerjaan. Dengan langkah-langkah tersebut, operasional dan fungsi monitoring dapat terus berjalan secara menyeluruh, efisien, dan transparan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja UPT dalam menjaga keteraturan penggunaan spektrum frekuensi radio.

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

Petugas memastikan bahwa stasiun monitor (Site Ambaipua dan Site Bau-bau) selalu siap operasional guna memberikan pelayanan pengawasan spektrum frekuensi yang responsif dan proaktif. Pengiriman data monitoring dilakukan secara berkala melalui Report Online (ROL) sebagai bentuk layanan berbasis data yang transparan.

Akuntabel

Kegiatan monitoring dilakukan secara terjadwal dan dilaporkan melalui sistem nasional seperti SMSN dan ROL. Setiap kondisi operasional stasiun tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam bentuk data, dokumentasi, maupun hasil pengawasan teknis.

Kompeten

SDM teknis yang menangani stasiun monitor dibekali pengetahuan dan keterampilan khusus dalam pengoperasian sistem monitoring, pengolahan data frekuensi, serta troubleshooting perangkat untuk menjaga kinerja stasiun tetap optimal.

Harmonis

Koordinasi antara petugas lapangan, pengelola sistem, dan manajemen dilakukan secara sinergis untuk menjaga keberlangsungan operasional dua stasiun monitor. Nilai kebersamaan menjadi kunci dalam menyelesaikan kendala teknis secara cepat dan tepat.

Loyal

Seluruh pelaksana kegiatan berkomitmen terhadap tugas dan fungsi pengawasan spektrum frekuensi, menjaga integritas, serta menjunjung tinggi misi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dalam mewujudkan keteraturan pemanfaatan spektrum.

Adaptif

Petugas selalu mengikuti perkembangan teknologi sistem monitoring nasional dan terus menyesuaikan prosedur kerja, termasuk dalam menghadapi tantangan seperti gangguan jaringan, cuaca ekstrem, atau akses lokasi.

Kolaboratif

Dalam menjaga fungsi operasional stasiun monitor, dilakukan kolaborasi dengan tim internal, teknisi pusat, serta mitra penyedia jaringan dan infrastruktur guna memastikan dukungan penuh terhadap keberlangsungan monitoring spektrum frekuensi.

Nilai-nilai BerAKHLAK menjadi fondasi etika kerja dan moral aparatur negara dalam memastikan kesiapsiagaan operasional stasiun monitor frekuensi radio sebagai instrumen pengawasan yang andal. Hal ini dilakukan demi menjamin keteraturan pemanfaatan spektrum frekuensi radio secara efisiensi, berkelanjutan, dan akuntabel di wilayah Sulawesi Tenggara.

I. Latar Belakang

Denda administratif merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi. Penerapan denda ini ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pelanggaran yang dapat dikenakan denda administratif antara lain penggunaan frekuensi tanpa izin, pengoperasian stasiun radio di luar parameter teknis yang ditetapkan, serta penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikat.

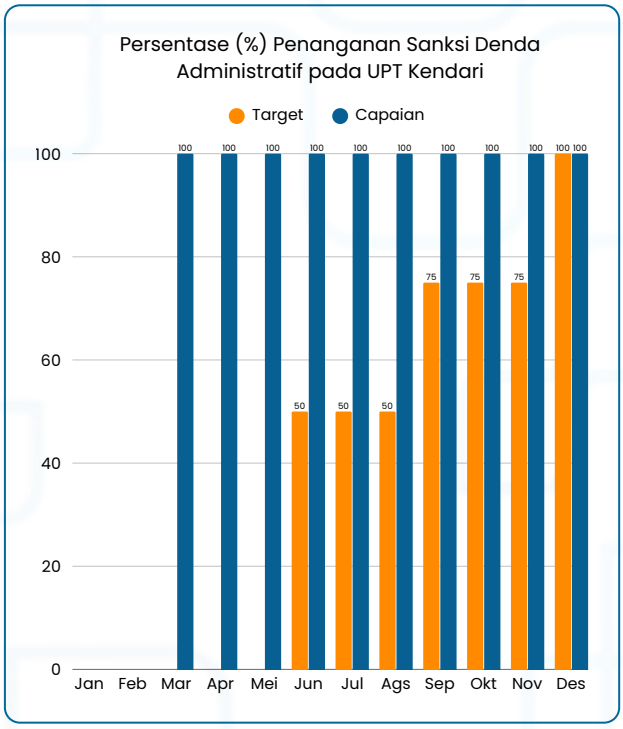
Indikator penanganan denda administratif mencerminkan komitmen instansi dalam menegakkan aturan secara konsisten dan transparan. Proses penanganan dilakukan melalui tahapan verifikasi pelanggaran, penetapan sanksi sesuai ketentuan, serta tindak lanjut pembayaran denda oleh pihak yang melanggar. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan tercipta keteraturan penggunaan spektrum frekuensi radio, peningkatan kepatuhan, serta perlindungan masyarakat dari gangguan komunikasi.

Di wilayah kerja Loka Monitor SFR Kendari, penanganan denda administratif telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan efektivitas pengawasan serta keseriusan instansi dalam menindak pelanggaran secara tegas namun tetap berlandaskan prinsip akuntabilitas dan keadilan. Keberhasilan memenuhi target penanganan denda administratif juga menjadi indikator bahwa sistem pengawasan berjalan baik, serta mendukung terciptanya layanan publik yang berintegritas dan berkelanjutan.



II. Capaian

Berdasarkan PK tahun 2025, target Penanganan Denda Administratif adalah 80%. Dan realisasi Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari terhadap target indikator ini adalah 100%. Terbukti dari grafik pencapaian di bawah ini.



Gambar 3.18 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif pada UPT Kendari

Keterangan Capaian:

- Total Invoice Terbayar : 14
- Tindak Lanjut Invoice belum terbayarkan Bobot : 0
- Total Invoice Baru belum Jatuh Tempo : 0
- Total Invoice Denda Adm : 14

Pengenaan Sanksi Denda Administratif = (jumlah invoice terbayar + (bobot x TL invoice belum terbayar)+ Jumlah invoice baru belum jatuh tempo)/jumlah invoice denda adm
Capaian = (14+0+0)/14 = 100%

III. Analisa

Berdasarkan grafik menunjukkan bahwa kinerja penanganan sanksi denda administratif di UPT Kendari sepanjang tahun konsisten berada di atas target yang ditetapkan. Pada bulan Januari hingga April serta November–Desember, target ditetapkan 100% dan capaian berhasil memenuhi sepenuhnya. Menariknya, pada bulan Mei hingga Juli target diturunkan menjadi 50%, namun capaian tetap 100%, sehingga terjadi kelebihan pencapaian yang signifikan. Hal serupa terlihat pada Agustus hingga Oktober, di mana target hanya 75% tetapi capaian tetap 100%. Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan bahwa capaian selalu melampaui target, mencerminkan efektivitas, konsistensi, dan komitmen tinggi dalam pelaksanaan penanganan sanksi administratif di UPT Kendari.

IV. Dampak Kinerja

Pelaksanaan Penanganan Denda Administratif oleh Loka Monitor SFR Kendari memberikan dampak penting bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga keteraturan penggunaan spektrum frekuensi radio. Dengan adanya penegakan denda administratif, masyarakat dan penyelenggara telekomunikasi terdorong untuk lebih patuh terhadap aturan yang berlaku. Hal ini menciptakan rasa disiplin dan tanggung jawab dalam memanfaatkan frekuensi, sehingga kualitas layanan komunikasi dapat terjaga dengan baik. Selain itu, penanganan denda administratif memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Mereka mengetahui bahwa setiap pelanggaran akan ditindak sesuai prosedur, sehingga tercipta rasa keadilan dan transparansi dalam pengelolaan spektrum. Dampaknya, masyarakat memperoleh layanan komunikasi yang lebih stabil, aman, dan bebas dari gangguan akibat penggunaan frekuensi yang tidak sesuai ketentuan. Dengan demikian, pelaksanaan penanganan denda administratif tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai instrumen edukasi dan penguatan kepercayaan publik terhadap peran pemerintah dalam menjaga keteraturan dan kualitas layanan telekomunikasi.

V. Tindak Lanjut

Pelaksanaan Penanganan Denda Administratif dengan target 80% dan berhasil direalisasikan hingga 100% menunjukkan komitmen Loka Monitor SFR Kendari dalam menegakkan aturan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio. Sebagai tindak lanjut, capaian ini perlu dijadikan momentum untuk memperkuat mekanisme penanganan denda agar kualitas pengawasan tetap konsisten dan berkelanjutan. Evaluasi terhadap faktor keberhasilan, seperti efektivitas koordinasi tim, kecepatan proses administrasi, serta transparansi dalam penanganan kasus, harus dilakukan untuk memastikan praktik terbaik dapat diidentifikasi dan diterapkan kembali.
Selain itu, pencapaian penuh ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun strategi peningkatan di periode berikutnya, misalnya dengan memperluas sosialisasi kepada pengguna frekuensi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi agar potensi pelanggaran semakin berkurang. Langkah ini sekaligus menjadi bahan advokasi dalam perencanaan kebijakan dan anggaran, sehingga dukungan terhadap kegiatan penanganan denda administratif semakin kuat. Hasil capaian juga perlu dipublikasikan kepada masyarakat dan stakeholder sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, serta untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Loka Monitor SFR Kendari. Dengan tindak lanjut tersebut, pencapaian 100% tidak hanya menjadi angka keberhasilan, tetapi juga pijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang spektrum frekuensi radio.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Sebagai rekomendasi perbaikan dari pelaksanaan Penanganan Denda Administratif yang berhasil mencapai 100% dari target 80%, langkah strategis yang dapat dilakukan ke depan adalah memperkuat sistem pencegahan pelanggaran melalui sosialisasi yang lebih intensif kepada pengguna frekuensi radio mengenai aturan dan konsekuensi administratif. Dengan demikian, jumlah pelanggaran dapat ditekan sehingga penanganan denda tidak hanya bersifat

tetapi juga proaktif dalam membangun kepatuhan.

Selain itu, perlu dilakukan digitalisasi proses administrasi agar penanganan denda lebih cepat, transparan, dan mudah dipantau. Sistem berbasis teknologi akan meminimalisasi potensi kesalahan pencatatan sekaligus meningkatkan akuntabilitas. Rekomendasi berikutnya adalah memperkuat koordinasi lintas unit dan stakeholder untuk memastikan setiap proses penanganan berjalan sesuai regulasi dan tidak menimbulkan hambatan birokrasi.

Terakhir, hasil capaian yang optimal ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun strategi peningkatan kualitas layanan, termasuk advokasi anggaran dan kebijakan agar kegiatan penanganan denda administratif semakin terdukung. Dengan rekomendasi tersebut, pelaksanaan ke depan tidak hanya mempertahankan capaian 100%, tetapi juga meningkatkan kualitas, efisiensi, dan integritas dalam mendukung ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio.

VII. Efisiensi

Pelaksanaan Penanganan Denda Administratif dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dapat dilakukan melalui penerapan prosedur yang terstruktur, transparan, dan berbasis digital.

Efisiensi dicapai dengan memastikan setiap proses penanganan denda dimulai dari verifikasi pelanggaran yang cepat dan akurat, sehingga tidak terjadi duplikasi pemeriksaan. Selanjutnya, penggunaan sistem pencatatan dan pelaporan digital akan mempercepat proses administrasi sekaligus meminimalkan kesalahan manual. Prinsip efisiensi juga diwujudkan dengan penyederhanaan alur pembayaran melalui mekanisme yang jelas, mudah diakses, dan terintegrasi dengan sistem keuangan negara.

Selain itu, koordinasi lintas unit dan stakeholder perlu diperkuat agar tindak lanjut penanganan denda dapat dilakukan secara konsisten dan serentak, tanpa menghambat proses pelayanan publik lainnya. Di sisi internal, efisiensi dapat ditingkatkan melalui pelatihan teknis berkelanjutan bagi tim agar kompetensi tetap terjaga dalam menghadapi kompleksitas regulasi dan teknologi. Dengan langkah-langkah tersebut, penanganan denda administratif dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

Dalam penanganan denda administratif, Loka Monitor SFR Kendari tetap mengedepankan prinsip pelayanan publik yang berkualitas. Meskipun berhubungan dengan pelanggaran, setiap proses dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh pengguna frekuensi. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya menerima sanksi, tetapi juga memahami aturan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kepatuhan di masa mendatang. Dengan demikian, penegakan aturan tetap berjalan seiring dengan pelayanan yang ramah dan edukatif.

Akuntabel

Setiap langkah dalam penanganan denda administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Proses verifikasi pelanggaran, penetapan sanksi, hingga tindak lanjut pembayaran dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan hasil penanganan juga disusun secara sistematis agar dapat diaudit dan ditinjau kembali bila diperlukan. Dengan akuntabilitas yang terjaga, instansi menunjukkan komitmen untuk melaksanakan tugas secara jujur, transparan, dan berintegritas.

Kompeten

Petugas yang menangani denda administratif dibekali dengan pengetahuan teknis dan administratif memahami prosedur hukum, serta memberikan solusi yang sesuai dengan peraturan. Kompetensi ini terus ditingkatkan melalui pelatihan dan pengalaman lapangan agar penanganan kasus berjalan profesional. Dengan SDM yang kompeten, penegakan aturan dapat dilakukan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi pengguna frekuensi.

Harmonis

Dalam melaksanakan penanganan denda administratif, Loka Monitor SFR Kendari tetap menjaga komunikasi yang baik dengan pengguna frekuensi. Meskipun berada dalam konteks penegakan aturan, sikap adil, tidak diskriminatif, dan menghargai pihak yang dikenai sanksi selalu dikedepankan. Hal ini menciptakan suasana yang kondusif sehingga proses penanganan tidak menimbulkan konflik, melainkan menjadi sarana pembelajaran bersama. Dengan pendekatan harmonis, hubungan antara instansi dan masyarakat tetap terjaga dengan baik.

Loyal

Penanganan denda administratif dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk loyalitas terhadap negara dan kepentingan publik. Petugas menunjukkan komitmen untuk menegakkan aturan tanpa kompromi terhadap pelanggaran yang merugikan masyarakat. Loyalitas ini tercermin dalam konsistensi pelaksanaan tugas, meskipun

menghadapi tantangan di lapangan. Dengan sikap loyal, instansi memastikan bahwa kepentingan negara dan keteraturan penggunaan spektrum selalu menjadi prioritas utama.



Adaptif

Loka Monitor SFR Kendari senantiasa menyesuaikan metode penanganan denda dengan perkembangan teknologi dan regulasi terbaru. Pemanfaatan sistem digital dalam verifikasi dan tindak lanjut denda menjadi salah satu bentuk adaptasi yang meningkatkan efisiensi. Selain itu, prosedur penanganan juga disesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat agar tetap relevan. Dengan sikap adaptif, instansi mampu menjaga efektivitas penegakan aturan di tengah perubahan lingkungan kerja.

Kolaboratif

Penanganan denda administratif tidak dilakukan secara terpisah, melainkan melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Instansi berkoordinasi dengan penyelenggara layanan, aparat hukum, maupun masyarakat untuk memastikan keteraturan penggunaan spektrum. Kolaborasi ini memperkuat efektivitas penegakan aturan sekaligus membangun kesadaran bersama akan pentingnya kepatuhan. Dengan semangat kolaboratif, penanganan denda administratif menjadi lebih komprehensif dan berdampak positif bagi semua pihak.

I. Latar Belakang

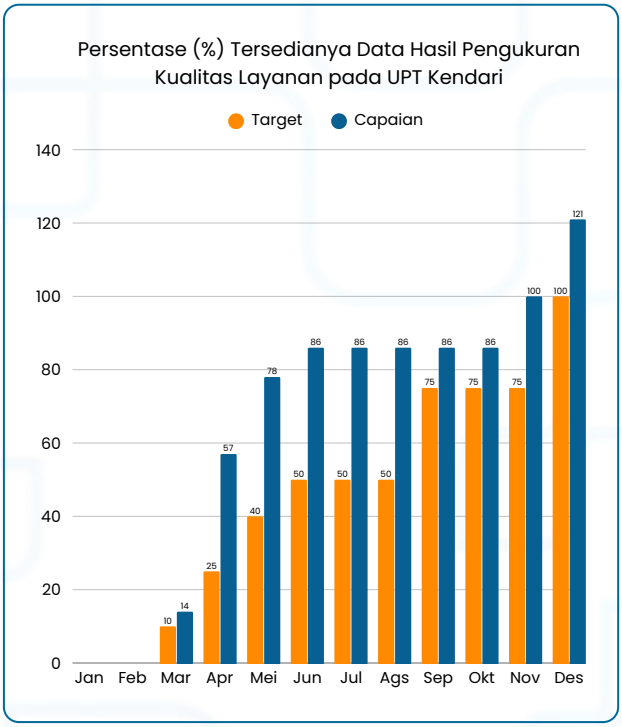
Data hasil pengukuran kualitas layanan merupakan instrumen penting dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio. Pengukuran dilakukan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai tingkat kepuasan, kepatuhan, serta kinerja layanan yang diberikan kepada masyarakat dan penyelenggara telekomunikasi. Dengan tersedianya data yang terstruktur dan terukur, instansi dapat melakukan evaluasi berbasis bukti (evidence-based evaluation) sehingga setiap kebijakan maupun tindak lanjut yang diambil memiliki dasar yang kuat.

Indikator ini menekankan pentingnya konsistensi dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data hasil pengukuran. Data yang tersedia tidak hanya berfungsi sebagai laporan capaian, tetapi juga sebagai bahan analisis untuk mengidentifikasi tren, menemukan potensi perbaikan, serta mengukur keberhasilan strategi pelayanan. Keberadaan data yang lengkap dan akurat menjadi jaminan transparansi serta akuntabilitas instansi dalam menyampaikan kualitas layanan kepada publik.

Di wilayah kerja Loka Monitor SFR Kendari, tersedianya data hasil pengukuran kualitas layanan sesuai target menunjukkan komitmen dalam menjaga mutu pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa pengawasan dan pelayanan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pencapaian administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

II. Capaian

Monitoring kualitas layanan yang dilaksanakan oleh Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari merupakan bagian dari tugas pengawasan terhadap penggunaan spektrum frekuensi agar tetap tertib, efisien, dan sesuai izin. Kegiatan ini meliputi pengukuran teknis parameter frekuensi, daya pancar, koordinat stasiun, serta penanganan gangguan interferensi yang dapat mengganggu komunikasi publik maupun layanan komersial. Selain itu, Loka Monitor juga melakukan penertiban terhadap perangkat ilegal dan memastikan kepatuhan pengguna terhadap ketentuan izin stasiun radio. Dalam tahun berjalan, wilayah kerja Loka Monitor Kendari mencakup 17 kabupaten/kota. Target kualitas layanan yang ditetapkan hanya 14 kabupaten/kota, namun melalui kerja keras dan koordinasi yang baik, seluruh 17 kabupaten/kota berhasil diselesaikan. Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.19 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan pada UPT Kendari

Keterangan Capaian:

- Kab/Kota yang sudah diukur (QoE dan QoS) : 17 Kab/Kota
- Target Kab/kota (80%) = 14 Kab. Kota
- Capaian Pengukuran Kualitas Layanan : 17/14 =121%

Pengukuran QoS :
Kota Kendari
Kab Kolaka
Kab. Kolaka Utara
Kota Baubau
Kab. Buton
Kab Buton Utara
Kab Konawe Selatan
Kab. Konawe Kepulauan
Kab. Wakatobi

Pengukuran Kualitas QoE (Aplikasi Sigmon) :
Kab Konawe
Kab. Konawe Utara
Kab. Kolaka Timur
Kab. Bombana
Kab. Muna
Kab. Muna Barat
Kab. Buton Selatan
Kab. Buton Tengah

Isu/Risiko:

- Tidak tersedia anggaran khusus untuk kegiatan Pengukuran Kualitas Layanan, sehingga beberapa kab/kota dilaksanakan secara paralel dengan kegiatan lain dan hasil pengukuran khususnya DT kurang maksimal.
- Pengukuran menggunakan QoS dilaksanakan pada Bulan September 2025 berhubung perangkat QoS baru tersedia pada Bulan Agustus 2025. Sehingga Pengukuran Kualitas Layanan Bulan Januari sd Juli 2025 menggunakan QoE dengan aplikasi Sigmon

Capaian ini menunjukkan komitmen Loka Monitor Kendari dalam menjaga kualitas layanan telekomunikasi, meningkatkan kepatuhan pengguna spektrum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi gangguan komunikasi. Keberhasilan melampaui target juga menjadi indikator positif atas efektivitas monitoring dan dedikasi ASN di lingkungan Loka Monitor Kendari.

III. Analisa

Berdasarkan grafik memperlihatkan bahwa ketersediaan data hasil pengukuran kualitas layanan di UPT Kendari sepanjang tahun selalu melampaui target yang ditetapkan. Pada awal tahun, capaian sudah menunjukkan tren positif meskipun target masih rendah, misalnya Januari dengan target 0% tetapi capaian mencapai 10%. Peningkatan signifikan terlihat pada Maret hingga April, di mana capaian melonjak jauh di atas target (57% dibanding 25%, dan 78% dibanding 40%). Memasuki Mei hingga Oktober, capaian stabil di angka 86% meskipun target bervariasi antara 50% hingga 75%, menunjukkan konsistensi kinerja. Pada November, capaian tepat menyamai target 100%, dan di Desember bahkan melampaui hingga 121%. Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan adanya progres berkelanjutan, konsistensi, serta komitmen kuat UPT Kendari dalam memastikan data kualitas layanan tersedia lebih baik dari yang direncanakan.

VI. Dampak Kinerja

Pelaksanaan Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan oleh Loka Monitor SFR Kendari memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat di wilayah kerja. Dengan adanya data yang terukur dan terdokumentasi, masyarakat memperoleh jaminan bahwa layanan komunikasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio berjalan sesuai standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah, karena mereka dapat melihat bukti nyata dari hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan.
Selain itu, ketersediaan data hasil pengukuran menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan penyelenggara layanan telekomunikasi. Mereka dapat memahami kondisi layanan secara objektif, sehingga mendorong kepatuhan terhadap regulasi dan perbaikan berkelanjutan. Dampaknya, masyarakat menikmati layanan komunikasi yang lebih stabil, merata, dan berkualitas, yang pada akhirnya mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik. Dengan demikian, tersedianya data hasil pengukuran bukan hanya sekadar laporan teknis, tetapi juga instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat tata kelola komunikasi di daerah.

V. Tindak Lanjut

Pelaksanaan Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan dengan target 100% dan berhasil direalisasikan hingga 121% menunjukkan komitmen yang kuat dalam menyediakan data yang akurat dan melampaui ekspektasi. Sebagai tindak lanjut, capaian ini perlu dijadikan momentum untuk memperkuat sistem pengelolaan data agar kualitas layanan tetap konsisten dan berkelanjutan.

Evaluasi terhadap faktor keberhasilan, seperti efektivitas metode pengukuran, kecepatan pengolahan data, serta koordinasi tim, harus dilakukan untuk memastikan praktik terbaik dapat diidentifikasi dan diterapkan kembali.
Selain itu, pencapaian yang melampaui target dapat dijadikan dasar untuk menyusun strategi peningkatan di periode berikutnya, misalnya dengan memperluas cakupan pengukuran ke wilayah atau layanan yang lebih kompleks, serta mengintegrasikan hasil pengukuran ke dalam sistem pelaporan yang lebih interaktif dan transparan. Langkah ini sekaligus menjadi bahan advokasi dalam perencanaan anggaran dan kebijakan, sehingga dukungan terhadap kegiatan pengukuran kualitas layanan semakin kuat. Hasil capaian juga perlu dipublikasikan kepada masyarakat dan stakeholder sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, serta untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Loka Monitor SFR Kendari. Dengan tindak lanjut tersebut, pencapaian 121% tidak hanya menjadi angka keberhasilan, tetapi juga pijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang spektrum frekuensi radio.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Sebagai rekomendasi perbaikan dari pelaksanaan Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan yang berhasil mencapai 121% dari target 100%, langkah ke depan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan sistem pengukuran. Pertama, dilakukan penyempurnaan metode pengukuran agar hasil data semakin akurat, konsisten, dan dapat dibandingkan lintas periode. Kedua, perlu adanya integrasi sistem data dengan platform pelaporan yang lebih interaktif, sehingga hasil pengukuran dapat diakses secara cepat oleh stakeholder dan masyarakat.
Selain itu, rekomendasi berikutnya adalah memperkuat kapasitas tim teknis melalui pelatihan berkelanjutan agar mampu mengelola data dalam skala yang lebih besar dan kompleks. Di sisi kebijakan, pencapaian ini dapat dijadikan dasar untuk advokasi anggaran, sehingga dukungan terhadap kegiatan pengukuran kualitas layanan semakin kuat dan berkesinambungan. Terakhir, hasil capaian yang melampaui target perlu dipublikasikan secara transparan sebagai bentuk akuntabilitas, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Loka Monitor SFR Kendari.



Dengan rekomendasi tersebut, pencapaian 121% tidak hanya menjadi bukti keberhasilan kuantitatif, tetapi juga pijakan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan integritas dalam pengelolaan data hasil pengukuran layanan di masa mendatang.

VII. Efisiensi

Pelaksanaan indikator kinerja Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dapat dilakukan melalui pengelolaan proses pengukuran yang terstruktur, konsisten, dan berbasis digital. Efisiensi dicapai dengan memastikan setiap kegiatan pengukuran dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, menggunakan perangkat yang terstandar, serta langsung terdokumentasi dalam sistem pencatatan terintegrasi untuk mengurangi beban kerja manual. Data hasil pengukuran kemudian dianalisis secara cepat dan ringkas, sehingga dapat segera digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maupun pelaporan kinerja. Selain itu, koordinasi antar tim dan wilayah kerja perlu diperkuat agar hasil pengukuran lebih seragam dan tidak terjadi duplikasi. Dengan langkah-langkah tersebut, ketersediaan data hasil pengukuran kualitas layanan dapat terjaga secara menyeluruh, efisien, dan transparan, sekaligus mendukung peningkatan mutu layanan publik di seluruh wilayah kerja UPT.



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

Sebagai instansi yang membawahi 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, Loka Monitor SFR Kendari berkomitmen menghadirkan data hasil pengukuran kualitas layanan yang transparan dan mudah dipahami. Data ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengetahui mutu pelayanan yang diberikan, sekaligus menjadi dasar perbaikan berkelanjutan. Dengan berorientasi pada kepuasan publik, setiap hasil pengukuran disajikan untuk mendukung pelayanan yang lebih responsif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Akuntabel

Penyediaan data hasil pengukuran kualitas layanan dilakukan secara akuntabel, melalui proses pengumpulan dan verifikasi yang sesuai standar. Setiap laporan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun teknis, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap instansi. Dengan akuntabilitas yang terjaga, Loka Monitor SFR Kendari menunjukkan integritas dalam setiap langkah pengawasan dan pelayanan publik.

Kompeten

Petugas di Loka Monitor SFR Kendari memiliki kompetensi dalam melakukan pengukuran kualitas layanan secara sistematis dan profesional. Mereka mampu mengolah data dengan metode yang tepat sehingga hasilnya valid dan relevan untuk evaluasi. Kompetensi ini memastikan bahwa data yang tersedia benar-benar mencerminkan kondisi pelayanan di seluruh wilayah kerja, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.

Harmonis

Dalam penyediaan data hasil pengukuran, Loka Monitor SFR Kendari tetap menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Data disampaikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman. Dengan sikap harmonis, instansi mampu membangun hubungan yang positif antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas layanan.

Loyal

Komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab tercermin dalam konsistensi Loka Monitor SFR Kendari menyediakan data hasil pengukuran kualitas layanan. Loyalitas ini ditunjukkan dengan menjaga integritas laporan dan memastikan bahwa setiap hasil pengukuran benar-benar mendukung kepentingan publik. Dengan sikap loyal, instansi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam mengawasi dan meningkatkan mutu layanan.

Adaptif

Loka Monitor SFR Kendari senantiasa menyesuaikan metode pengukuran dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan sistem digital dan inovasi pengolahan data menjadi bentuk adaptasi yang meningkatkan efisiensi dan akurasi. Dengan sikap adaptif, instansi mampu menghadirkan data yang relevan dan sesuai dengan dinamika pelayanan publik di wilayah kerja.

Kolaboratif

Penyediaan data hasil pengukuran kualitas layanan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Kolaborasi ini memperkuat keakuratan data sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap hasil yang disajikan. Dengan semangat kolaboratif, data yang dihasilkan tidak hanya menjadi laporan, tetapi juga menjadi alat bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di 17 kabupaten/kota wilayah kerja.



IK-1.8 Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN)

I. Latar Belakang

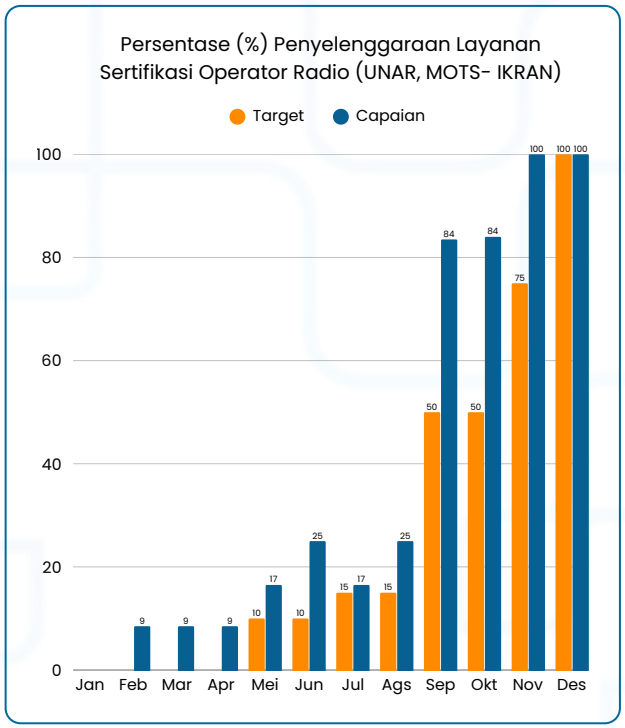
Sertifikasi operator radio merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) dan Monitoring Operator Telekomunikasi Sistem – Izin Khusus Radio Amatir (MOTS-IKRAN), pemerintah memberikan pengakuan resmi atas kemampuan teknis dan pemahaman regulasi para operator. Sertifikasi ini tidak hanya menjamin keteraturan penggunaan frekuensi, tetapi juga berfungsi sebagai upaya peningkatan kualitas layanan komunikasi publik dan komersial.
Indikator penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio menekankan pentingnya tersedianya mekanisme yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar dalam proses sertifikasi. Dengan adanya layanan ini, masyarakat maupun penyelenggara telekomunikasi dapat memperoleh kepastian hukum, sekaligus meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perangkat dan penggunaan frekuensi.



Gambar 3.20 Pelaksanaan UNAR Regular III Tahun 2025

Di wilayah kerja Loka Monitor SFR Kendari, penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan komitmen instansi dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang telekomunikasi, menjaga keteraturan penggunaan spektrum, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan publik. Keberhasilan memenuhi target juga menjadi bukti bahwa layanan sertifikasi berperan strategis dalam mendukung tata kelola spektrum frekuensi yang tertib, efisien, dan berkelanjutan.

II. Capaian



Gambar 3.21 Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

Keterangan Capaian:
1. 6 X Kegiatan Unar /6 Target Keg UNAR =6/6 = 100% (total 82 peserta)
2. 1 Keg SRC/LRC/IKRAN / 1 Target Kegiatan = 100%
Capaian (100+100)/2 = 100%
UNAR Reguler I (Kota Kendari) : 30 Peserta
UNAR Reguler II (Kota Kendari) : 15 Peserta
UNAR Reguler III (Kota Kendari) : 14 peserta
UNAR Reguler IV (Kota Kendari) : 11 peserta
UNAR Reguler V (Kota Kendari) : 12 peserta
UNAR Non Reguler (Kab Kolaka Utara) : 32 peserta

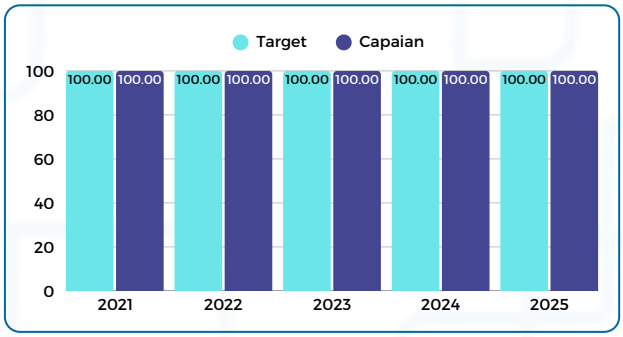
Keg Sosialisasi MOTS di Kab. Buton = 100 peserta
Keg Sertifikasi LRC di Kab Kolaka = 46 Peserta

III. Analisa

Grafik menunjukkan perkembangan capaian layanan sertifikasi operator radio sepanjang tahun berjalan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pada awal tahun, capaian layanan masih relatif rendah, yaitu 9% pada bulan Januari hingga April, sementara target belum ditetapkan. Memasuki bulan Mei, target mulai ditetapkan sebesar 10% dan capaian berhasil melampaui target dengan angka 17%. Tren positif ini berlanjut pada bulan Juni dengan capaian 25% dibanding target 10%.
Pada bulan Juli dan Agustus, target meningkat menjadi 15%, sementara capaian masing-masing mencapai 17% dan 25%, menunjukkan konsistensi peningkatan meskipun belum sepenuhnya memenuhi target bulan Agustus. Peningkatan signifikan terlihat pada bulan September dan Oktober, di mana target sebesar 50% berhasil dilampaui dengan capaian 84%.
Puncak pencapaian terjadi pada bulan November dan Desember. Target 75% di bulan November berhasil dilampaui dengan capaian 100%, dan target akhir tahun sebesar 100% di bulan Desember juga tercapai penuh. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan sertifikasi operator radio tidak hanya memenuhi target, tetapi juga mampu melampaui ekspektasi pada beberapa periode penting.
Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan adanya peningkatan kinerja yang konsisten, dengan capaian akhir tahun yang optimal. Keberhasilan mencapai 100% pada bulan November dan Desember menjadi indikator kuat bahwa strategi pelaksanaan layanan berjalan efektif dan mampu memberikan hasil maksimal.

UNAR

Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) merupakan tahapan penting dalam proses legalisasi bagi individu yang ingin menjadi Amatir Radio resmi di Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID), Kementerian Komunikasi dan Digital, melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Monitor dan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio memiliki pemahaman yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan, teknik komunikasi radio dasar, serta prosedur operasional komunikasi yang sesuai dengan etika dan tata kelola penggunaan spektrum frekuensi radio.
Peserta UNAR diuji melalui sistem berbasis Computer Assisted Test (CAT) dengan tiga materi utama : regulasi dan hukum dibidang komunikasi radio, teknik radio dasar, dan prosedur komunikasi. Ujian ini terbuka bagi calon Amatir Radio di tiga tingkatan, yaitu siaga, penggalang, dan penegak. Pelaksanaan UNAR bukan hanya bagian dari pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi, tetapi juga upaya aktif pemerintah dalam mendorong keterlibatan Masyarakat dalam penggunaan spektrum secara legal, tertib dan bertanggung jawab.
Pada tahun 2025, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari telah sukses menyelenggarakan sebanyak 6 (enam) kali kegiatan UNAR berbasis CAT dengan jumlah peserta mencapai 161 orang, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 80 peserta. Capaian ini menunjukkan tingginya minat Masyarakat serta efektivitas pelaksanaan kegiatan oleh UPT.



Gambar 3.22 Capaian Pelaksanaan UNAR dalam 5 Tahun Terakhir

MOTS-IKRAN

Dalam rangka mendukung keselamatan pelayaran, keteraturan komunikasi maritim, serta pemanfaatan spektrum frekuensi radio secara legal dan efisien, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kendari menyelenggarakan program Maritime On The Spot (MOTS) – Izin Komunikasi Radio Antar Nelayan (IKRAN) tahun 2025. Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan public langsung di lapangan, yang memberikan kemudahan

akses perizinan bagi para nelayan dalam memperoleh Izin Stasiun Radio (ISR) kapal dan IKRAN.
Program MOTS bertujuan untuk :

- Meningkatkan pemahaman Masyarakat pesisir, khususnya nelayan, tentang pentingnya penggunaan perangkat radio sesuai ketentuan.
- Mendorong kepemilikan izin resmi, seperti ISR dan IKRAN, guna mendukung keselamatan pelayaran dan efektivitas komunikasi.
- Menekan potensi gangguan pada spektrum frekuensi kritikal seperti penerbangan dan dinas keselamatan lainnya.
- Mengedukasi Masyarakat tentang pemanfaatan spektrum frekuensi secara tertib, legal, dan sesuai peruntukannya.

Kegiatan Maritime On The Spot (MOTS) - Izin Komunikasi Radio Antar Nelayan (IKRAN) dirancang secara spesifik untuk memberikan pelayanan langsung kepada Masyarakat pesisir, khususnya para nelayan, dalam hal legalisasi penggunaan perangkat komunikasi radio di laut. Fokus kegiatan ini Adalah mendorong legalitas komunikasi radio melalui penerbitan Izin Stasiun Radio (ISR) dan IKRAN secara cepat, tepat, dan langsung di titik aktivitas nelayan, seperti Pelabuhan perikanan. Hal ini menunjukkan bentuk pelayanan public proaktif yang secara Measurable (terukur), keberhasilan program terlihat dari capaian penerbitan 27 ISR dan 0 IKRAN pada tahun 2025. Angka ini menjadi indikator kuantitatif efektivitas pelayaran sekaligus menunjukkan tingkat penerimaan Masyarakat terhadap legalisasi perangkat komunikasi mereka.
Kegiatan ini juga dinilai Achievable (dapat dicapai), karena pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan langsung (On The Spot), melibatkan koordinasi dengan Pelabuhan perikanan serta didukung dengan penyuluhan dan bimbingan teknis terkait LRC (Long Range Certificate). Format ini membuat program lebih mudah diakses Masyarakat, sekaligus efisien dalam waktu dan sumber daya.
Dari sisi Relevant (Relevansi), MOTS-IKRAN sangat mendukung program nasional bidang pengendalian spektrum frekuensi radio, keselamatan pelayaran, dan mitigasi risiko gangguan komunikasi, terutama pada sektor strategis seperti perikanan dan kelautan. Hal ini juga berkontribusi terhadap ketertiban ketertiban komunikasi dan pengurangan potensi gangguan pada spektrum penerbangan dan layanan keselamatan lainnya.
Terakhir, kegiatan ini memiliki unsur Time-bound (berbatas waktu), karena dilaksanakan secara bertahap dan terjadwal selama tahun berjalan, yakni melalui empat tahap pelaksanaan Bimtek dan pelayanan di berbagai Pelabuhan di Sulawesi Tenggara, yang kemudian dievaluasi sebagai bagian dari kinerja tahunan Loka Monitor SFR Kendari.

IV. Dampak Kinerja

Pelaksanaan Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) oleh Loka Monitor SFR Kendari memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat, khususnya para pengguna frekuensi radio di wilayah kerja. Dengan adanya layanan sertifikasi ini, masyarakat memperoleh kepastian hukum dan legitimasi dalam penggunaan frekuensi, sehingga aktivitas komunikasi dapat dilakukan secara tertib dan sesuai regulasi. Sertifikasi juga memastikan bahwa operator radio memiliki kompetensi teknis yang memadai, sehingga kualitas komunikasi meningkat dan risiko gangguan dapat diminimalisir.
Selain itu, layanan sertifikasi mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan penggunaan spektrum frekuensi. Hal ini menciptakan ekosistem komunikasi yang lebih sehat, di mana masyarakat tidak hanya menggunakan frekuensi untuk kepentingan pribadi atau organisasi, tetapi juga turut menjaga keteraturan bersama. Dampaknya, masyarakat memperoleh manfaat berupa layanan komunikasi yang lebih stabil, aman, dan profesional. Dengan demikian, penyelenggaraan sertifikasi bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi juga instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap peran pemerintah dalam menghadirkan layanan telekomunikasi yang berkualitas dan berkelanjutan.

V. Tindak Lanjut

Pelaksanaan Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) dengan target 100% dan berhasil direalisasikan 100% menunjukkan keberhasilan penuh dalam memastikan terselenggaranya layanan sertifikasi sesuai standar yang ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut, capaian ini perlu dijadikan pijakan untuk memperkuat kualitas layanan dengan melakukan evaluasi pelaksanaan secara menyeluruh, sehingga faktor keberhasilan dapat diidentifikasi dan dipertahankan. Selain itu, hasil capaian dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi peningkatan layanan di periode berikutnya, misalnya dengan memperluas cakupan sertifikasi, meningkatkan aksesibilitas bagi peserta di wilayah terpencil, serta memperkuat sistem digitalisasi layanan agar proses lebih efisien dan transparan.

Langkah tindak lanjut lainnya adalah memperkuat sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholder, sehingga tingkat partisipasi dapat terus meningkat dan kepatuhan terhadap regulasi semakin terjaga. Dengan tindak lanjut tersebut, pencapaian 100% tidak hanya menjadi bukti keberhasilan kuantitatif, tetapi juga menjadi pijakan strategis untuk meningkatkan kualitas, integritas, dan keberlanjutan layanan sertifikasi operator radio di masa mendatang.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Sebagai rekomendasi perbaikan dari pelaksanaan Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) yang telah mencapai target 100%, langkah ke depan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan. Pertama, dilakukan digitalisasi proses sertifikasi mulai dari pendaftaran, verifikasi dokumen, hingga publikasi hasil agar lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh peserta. Kedua, memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya sertifikasi operator radio, sehingga partisipasi dapat meningkat dan kepatuhan terhadap regulasi semakin terjaga.

Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas tim pelaksana melalui pelatihan berkelanjutan agar kualitas layanan tetap konsisten meskipun jumlah peserta bertambah. Rekomendasi berikutnya adalah menyusun jadwal pelaksanaan yang lebih terstruktur untuk menghindari benturan kegiatan dan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai standar. Terakhir, hasil capaian yang optimal dapat dijadikan dasar untuk advokasi kebijakan dan anggaran, sehingga dukungan terhadap penyelenggaraan sertifikasi semakin kuat dan berkesinambungan.

VII. Efisiensi

Pelaksanaan Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS, IKRAN) dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dapat dilakukan melalui penerapan sistem administrasi yang terstruktur, transparan, dan berbasis digital. Proses pendaftaran dan verifikasi peserta sebaiknya dilakukan secara daring untuk mengurangi beban kerja manual serta mempercepat alur pelayanan. Efisiensi juga dicapai dengan penjadwalan ujian yang terencana dan terintegrasi, sehingga seluruh peserta dari berbagai kabupaten/kota dapat terakomodasi tanpa terjadi penumpukan. Selain itu, penggunaan perangkat ujian yang terstandar serta dokumentasi hasil secara otomatis akan mempercepat proses sertifikasi dan meminimalkan kesalahan. Koordinasi lintas unit dan wilayah kerja perlu diperkuat agar pelaksanaan layanan berjalan seragam dan konsisten. Dengan langkah-langkah tersebut, penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio dapat berlangsung lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus tetap menjamin kualitas serta kepercayaan masyarakat terhadap kinerja UPT.



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

Dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio, Loka Monitor SFR Kendari selalu berorientasi pada kepuasan masyarakat. Proses UNAR maupun MOTS-IKRAN dilaksanakan dengan memberikan informasi yang jelas, prosedur yang sederhana, serta pelayanan yang ramah. Hal ini memastikan bahwa peserta ujian maupun pemohon izin merasa terbantu dan mendapatkan pengalaman pelayanan publik yang positif. Dengan berorientasi pada pelayanan, instansi mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola spektrum frekuensi.

Akuntabel

Setiap tahapan penyelenggaraan sertifikasi operator radio dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil ujian maupun izin yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan karena melalui proses verifikasi yang ketat dan transparan. Laporan kegiatan juga disusun secara sistematis agar dapat diaudit dan ditinjau kembali bila diperlukan. Dengan akuntabilitas yang terjaga, instansi menunjukkan komitmen untuk melaksanakan tugas secara jujur dan berintegritas.

Kompeten

Petugas yang melaksanakan layanan sertifikasi operator radio dibekali dengan kompetensi teknis dan administratif yang memadai. Mereka mampu mengelola ujian, melakukan verifikasi dokumen, serta memberikan penjelasan yang tepat kepada peserta. Kompetensi ini memastikan bahwa proses sertifikasi berjalan profesional dan menghasilkan operator radio yang benar-benar memenuhi standar. Dengan SDM yang kompeten, kualitas layanan publik dapat terus ditingkatkan.

Harmonis

Dalam pelaksanaan sertifikasi, Loka Monitor SFR Kendari tetap menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat dan peserta ujian. Sikap adil, tidak diskriminatif, serta menghargai setiap peserta menjadi prinsip utama dalam pelayanan. Hal ini menciptakan suasana yang kondusif sehingga proses sertifikasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga sarana membangun hubungan positif antara pemerintah dan masyarakat.

Loyal

Penyelenggaraan sertifikasi operator radio dilaksanakan dengan penuh loyalitas terhadap tugas dan tanggung jawab negara. Petugas menunjukkan komitmen untuk menegakkan aturan dan memastikan bahwa penggunaan frekuensi dilakukan oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Loyalitas ini tercermin dalam konsistensi pelaksanaan ujian dan penerbitan izin sesuai ketentuan. Dengan sikap loyal, instansi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peran

pemerintah dalam menjaga keteraturan spektrum.

Adaptif

Loka Monitor SFR Kendari senantiasa menyesuaikan metode penyelenggaraan sertifikasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan sistem digital dalam pendaftaran maupun ujian menjadi bentuk adaptasi yang meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dengan sikap adaptif, instansi mampu menghadirkan layanan sertifikasi yang relevan dan sesuai dengan dinamika pelayanan publik di wilayah kerja.

Kolaboratif

Penyelenggaraan sertifikasi operator radio dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Kolaborasi dengan organisasi amatir radio, penyelenggara telekomunikasi, serta masyarakat memperkuat efektivitas pelaksanaan ujian dan izin. Dengan semangat kolaboratif, layanan sertifikasi tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi, tetapi juga menjadi upaya bersama dalam menjaga keteraturan penggunaan spektrum frekuensi di 17 kabupaten/kota wilayah kerja.



I. Latar Belakang

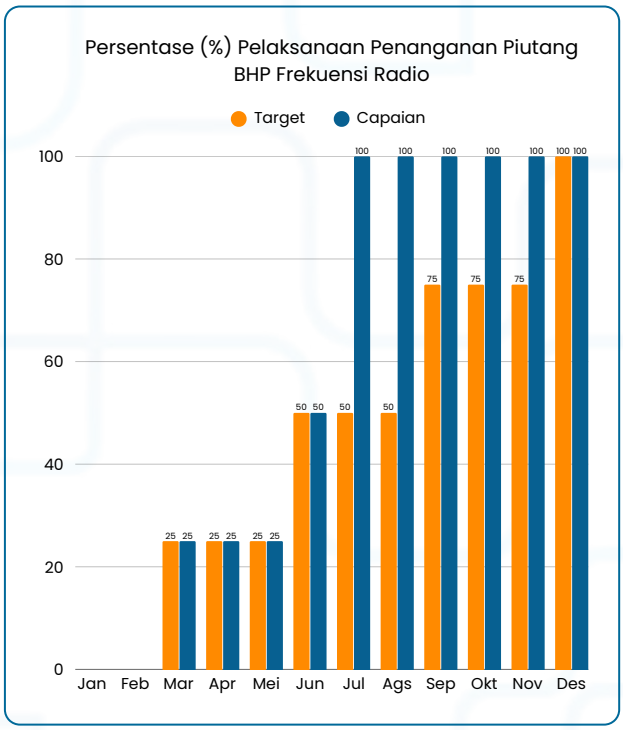
Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio merupakan salah satu bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang wajib dibayarkan oleh para pengguna spektrum sesuai izin yang diberikan. BHP frekuensi radio berfungsi sebagai instrumen pengelolaan sumber daya alam terbatas, sekaligus sebagai bentuk kontribusi pengguna dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya masih terdapat piutang BHP yang timbul akibat keterlambatan atau ketidakpatuhan pembayaran oleh penyelenggara layanan.

Indikator penanganan piutang BHP frekuensi radio menekankan pentingnya langkah-langkah aktif instansi dalam memastikan kewajiban pembayaran dapat ditagih dan diselesaikan sesuai ketentuan. Penanganan dilakukan melalui verifikasi administrasi, pemberitahuan kepada pengguna, koordinasi dengan pihak terkait, hingga tindak lanjut sesuai prosedur hukum apabila diperlukan. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan keteraturan pembayaran BHP dapat terjaga, serta penerimaan negara dari sektor telekomunikasi tetap optimal.

Di wilayah kerja Loka Monitor SFR Kendari, pelaksanaan penanganan piutang BHP frekuensi radio telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan komitmen instansi dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan PNBP, menjaga kepatuhan pengguna frekuensi, serta memperkuat peran pengawasan di daerah. Keberhasilan mencapai target juga menjadi bukti bahwa sistem penanganan piutang berjalan efektif, sekaligus mendukung transparansi dan integritas layanan publik di bidang telekomunikasi.

II. Capaian

Target PK pelaksanaan penanganan piutang BHP frekuensi radio pada tahun 2025 adalah 100% dan realisasi Loka Monitor SFR Kendari juga 100%.



Gambar 3.23 Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Keterangan Capaian:

- Jumlah Invoice yang disampaikan ke Waba : 355
- Jumlah Target Invoice : 355

Target Penanganan/Pencegahan Piutang : minimal 80%

- Pelaksanaan Koordinasi KPKNL : 4 kali kegiatan (per triwulan)
- Target Koordinasi Penanganan Piutang (KPKNL) = 1x/3 bulan = 100%



Capaian Penanganan Piutang :
= (Jumlah Invoice yang tersampaikan ke Waba/Jumlah Target Invoice) x 100%
= (355/355) * 100 = 100%

Capaian Koordinasi Penanganan Piutang :
= 1 x laporan kegiatan / 3 bulan = 100%
= 4 laporan kegiatan = 100%

Capaian Persentase Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi radio :
= (Capaian target Penanganan Piutang + Capaian Target Koordinasi Penanganan Piutang) / 2
= (100 + 100) /2 = 100%

III. Analisa

Pada tahun 2025, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari berhasil menangani sebanyak 212 piutang yang tertagih serta melaksanakan 4 kali koordinasi pelimpahan ke KPKNL, meskipun dalam kondisi tidak terdapat pelimpahan piutang secara langsung, sehingga pencapaian dianggap 100% sesuai ketentuan. Kegiatan ini tidak hanya memperlihatkan efektivitas dalam penyampaian tagihan, tetapi juga menunjukkan Upaya preventif dan komitmen terhadap pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

1. Penanganan Piutang
2. Koordinasi Pelimpahan Piutang ke KPKNL

IV. Dampak Kinerja

Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio oleh Loka Monitor SFR Kendari memberikan dampak penting bagi masyarakat dalam menjaga keteraturan dan keberlanjutan layanan komunikasi. Dengan adanya penanganan piutang, masyarakat memperoleh kepastian bahwa kewajiban finansial atas penggunaan spektrum frekuensi radio dilaksanakan secara tertib dan sesuai aturan. Hal ini mendorong penyelenggara telekomunikasi maupun pengguna frekuensi untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga penerimaan negara dari sektor ini tetap terjaga.
Dampak lainnya adalah terciptanya rasa keadilan dan transparansi dalam pengelolaan spektrum. Masyarakat mengetahui bahwa setiap kewajiban finansial diperlakukan secara konsisten dan tidak diskriminatif, sehingga menumbuhkan kepercayaan terhadap peran pemerintah. Penanganan piutang juga berfungsi sebagai instrumen edukasi, mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata berupa peningkatan kualitas layanan komunikasi, perlindungan kepentingan publik, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola frekuensi radio di daerah.

V. Tindak Lanjut

Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio dengan target 100% dan berhasil direalisasikan 100% menunjukkan keberhasilan penuh dalam memastikan kepatuhan pengguna frekuensi terhadap kewajiban finansialnya. Sebagai tindak lanjut, capaian ini perlu dijadikan pijakan untuk memperkuat sistem monitoring piutang agar keberhasilan dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan. Evaluasi terhadap faktor keberhasilan, seperti efektivitas koordinasi tim, kecepatan proses penagihan, serta transparansi administrasi, harus dilakukan untuk memastikan praktik terbaik dapat diidentifikasi dan diterapkan kembali.
Selain itu, pencapaian optimal ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi pencegahan piutang di periode berikutnya, misalnya dengan memperkuat sosialisasi kepada pengguna frekuensi mengenai kewajiban pembayaran, serta mengembangkan sistem digitalisasi penagihan agar lebih efisien dan akuntabel. Hasil capaian juga perlu dipublikasikan kepada masyarakat dan stakeholder sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Loka Monitor SFR Kendari. Dengan tindak lanjut tersebut, pencapaian 100% tidak hanya menjadi angka keberhasilan, tetapi juga pijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang spektrum frekuensi radio.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Sebagai rekomendasi perbaikan dari pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio yang telah mencapai target 100%, langkah ke depan perlu difokuskan pada penguatan sistem agar

Pertama, dilakukan digitalisasi proses penagihan dengan sistem berbasis teknologi yang memungkinkan pemantauan piutang secara real-time, sehingga transparansi dan akurasi semakin terjaga. Kedua, memperkuat mekanisme pencegahan piutang melalui sosialisasi intensif kepada pengguna frekuensi mengenai kewajiban pembayaran dan konsekuensi administratif, sehingga potensi tunggakan dapat ditekan sejak awal.

Selain itu, perlu adanya koordinasi lintas unit untuk memastikan proses penanganan berjalan lebih cepat dan tidak menimbulkan hambatan birokrasi. Rekomendasi berikutnya adalah menyusun strategi pengelolaan risiko dengan menyiapkan mekanisme cadangan atau alternatif jika terjadi kendala dalam penagihan. Terakhir, hasil capaian optimal ini dapat dijadikan dasar untuk advokasi kebijakan dan anggaran, sehingga dukungan terhadap kegiatan penanganan piutang semakin kuat dan berkesinambungan.

Dengan rekomendasi tersebut, pelaksanaan ke depan tidak hanya mempertahankan capaian 100%, tetapi juga semakin berkualitas, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan dalam mendukung ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio.

VII. Efisiensi

Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dapat dilakukan melalui penerapan sistem administrasi yang terstruktur, transparan, dan berbasis digital. Proses penanganan dimulai dari pencatatan piutang secara otomatis dalam sistem keuangan terintegrasi, sehingga meminimalkan kesalahan manual dan mempercepat verifikasi data. Selanjutnya, dilakukan analisis piutang untuk menentukan prioritas penagihan berdasarkan besaran nilai dan tingkat risiko keterlambatan, sehingga sumber daya dapat difokuskan pada kasus yang paling berdampak. Efisiensi juga dicapai dengan penyederhanaan alur komunikasi kepada pengguna frekuensi melalui pemberitahuan daring yang jelas dan terjadwal, sehingga mempercepat proses penagihan tanpa mengurangi akuntabilitas. Koordinasi lintas unit dan wilayah kerja perlu diperkuat agar tindak lanjut penanganan piutang berjalan konsisten dan seragam. Dengan langkah-langkah tersebut, penanganan piutang BHP frekuensi radio dapat dilakukan secara cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung kepercayaan publik terhadap kinerja UPT dalam menjaga keteraturan kewajiban penggunaan spektrum frekuensi radio.



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

Dalam penanganan piutang BHP frekuensi radio, Loka Monitor SFR Kendari selalu berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Proses penanganan dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas kepada pengguna frekuensi, sehingga mereka memahami kewajiban pembayaran dan prosedur yang berlaku. Dengan pendekatan yang ramah dan edukatif, masyarakat tidak hanya dikenai kewajiban, tetapi juga didorong untuk patuh demi keteraturan penggunaan spektrum.

Akuntabel

Setiap langkah penanganan piutang dilaksanakan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi. Data piutang dicatat dengan rapi, tindak lanjut dilakukan secara transparan, dan laporan disusun agar dapat dipertanggungjawabkan. Dengan akuntabilitas yang terjaga, Loka Monitor SFR Kendari menunjukkan integritas dalam mengelola kewajiban keuangan negara.

Kompeten

Petugas yang menangani piutang BHP frekuensi radio memiliki kompetensi dalam aspek teknis maupun administratif. Mereka mampu mengidentifikasi piutang, melakukan verifikasi data, serta memberikan solusi yang sesuai dengan aturan. Kompetensi ini memastikan bahwa penanganan piutang dilakukan secara profesional dan mendukung kepastian hukum bagi pengguna frekuensi.

Harmonis

Dalam pelaksanaan penanganan piutang, Loka Monitor SFR Kendari tetap menjaga komunikasi yang baik dengan pengguna frekuensi. Sikap adil, tidak diskriminatif, dan menghargai pihak yang dikenai kewajiban menjadi prinsip utama. Dengan pendekatan harmonis, proses penanganan tidak menimbulkan konflik, melainkan menjadi sarana membangun kesadaran bersama akan pentingnya kepatuhan.

Loyal

Penanganan piutang BHP frekuensi radio dilaksanakan dengan penuh loyalitas terhadap tugas dan tanggung jawab negara. Petugas menunjukkan komitmen untuk menegakkan aturan dan memastikan penerimaan negara dari sektor frekuensi tetap terjaga. Loyalitas ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam menjaga keteraturan dan keberlanjutan layanan telekomunikasi.

Adaptif

Loka Monitor SFR Kendari senantiasa menyesuaikan metode penanganan piutang dengan perkembangan teknologi dan regulasi terbaru. Pemanfaatan sistem digital dalam pencatatan dan tindak lanjut piutang menjadi bentuk adaptasi yang meningkatkan efisiensi. Dengan sikap adaptif, instansi mampu menghadirkan layanan penanganan piutang yang relevan dan sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

Kolaboratif

Penanganan piutang BHP frekuensi radio dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Kolaborasi dengan penyelenggara telekomunikasi, aparat hukum, dan masyarakat memperkuat efektivitas penegakan aturan. Dengan semangat kolaboratif, penanganan piutang tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi, tetapi juga menjadi upaya bersama dalam menjaga keteraturan penggunaan spektrum di 17 kabupaten/kota wilayah kerja.





IK-1.10 Sosialisasi Pelayanan Publik

I. Latar Belakang

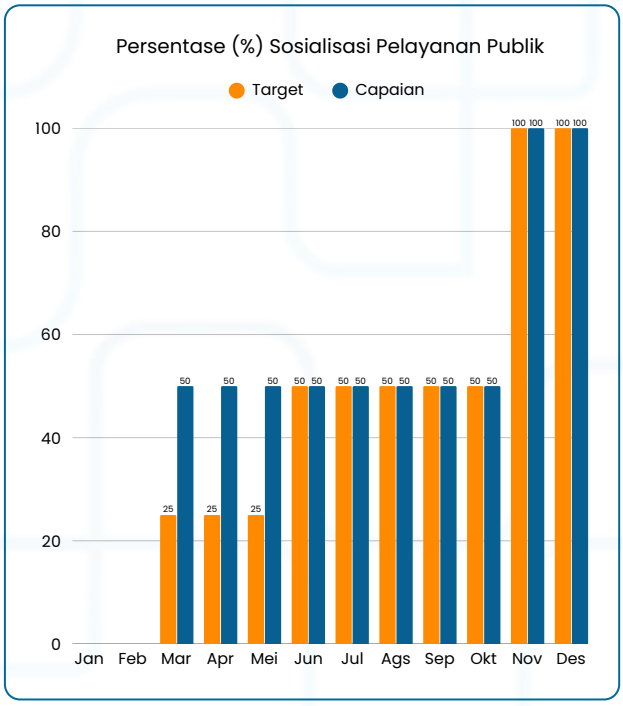
Sosialisasi pelayanan publik merupakan salah satu upaya strategis untuk memastikan masyarakat memahami hak, kewajiban, serta prosedur layanan yang disediakan oleh instansi pemerintah. Melalui kegiatan sosialisasi, informasi mengenai regulasi, mekanisme perizinan, standar pelayanan, hingga inovasi layanan dapat disampaikan secara jelas dan terbuka. Hal ini penting untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap layanan publik, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam menjaga keteraturan dan kualitas pelayanan.

Indikator ini menekankan peran sosialisasi sebagai sarana edukasi dan komunikasi dua arah antara instansi dengan masyarakat. Dengan adanya sosialisasi, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran hukum, kepatuhan terhadap aturan, serta terciptanya hubungan yang lebih akuntabel dan transparan. Sosialisasi juga berfungsi sebagai media untuk menyerap aspirasi masyarakat, sehingga layanan publik dapat terus diperbaiki sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Di wilayah kerja Loka Monitor SFR Kendari, pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik telah berjalan sesuai target. Capaian ini menunjukkan komitmen instansi dalam memperkuat keterbukaan informasi, membangun kepercayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang berintegritas. Keberhasilan sosialisasi menjadi bukti bahwa komunikasi yang efektif mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

II. Capaian

Pencapaian target PK (Perjanjian Kinerja) Sosialisasi Pelayanan Publik tahun 2025 di Loka Monitor SFR Kendari yakni 100%.



Gambar 3.24 Pencapaian Sosialisasi Pelayanan Publik Tahun 2025

Keterangan Capaian:

Kegiatan Sosialisasi kab/kota : 3 kegiatan

1. Kegiatan Sosialisasi DenHubRem di Kendari peserta : 21 Orang (maret 2025)
2. Kegiatan Sosialisasi di DSSP Power di Kab Konawe Selatan : 35 orang
3. Kegiatan Sosialisasi MOTS di Kab Buton : 100 peserta

- Target Peserta Sosialisasi: Minimal 30 Peserta
- Jumlah Peserta Sosialisasi Tahun 2025 : 156 peserta > 30 peserta
- Target Kegiatan Sosialisasi : 1 Kegiatan
- Jumlah Kegiatan Sosialisasi : 3 Kegiatan > 1 Kegiatan
- Capaian Persentase Sosialisasi Layanan Publik : 100%

III. Analisa

Berdasarkan grafik memperlihatkan bahwa pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik sepanjang tahun menunjukkan capaian yang konsisten melampaui target yang ditetapkan. Pada bulan Februari, April, dan Mei target hanya 25%, namun capaian sudah mencapai 50%, menandakan adanya kelebihan pencapaian sejak awal. Memasuki Juni hingga Oktober, target meningkat menjadi 50%, dan capaian tetap stabil di angka 50%, sehingga kinerja berada tepat sesuai target. Puncaknya terjadi pada November dan Desember, di mana target 100% berhasil dicapai sepenuhnya dengan capaian juga 100%. Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan adanya konsistensi, kesiapan, dan komitmen UPT Kendari dalam melaksanakan sosialisasi pelayanan publik, dengan capaian yang selalu memenuhi bahkan melampaui target pada sebagian besar periode.

IV. Dampak Kinerja

Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik oleh Loka Monitor SFR Kendari memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat di wilayah kerja. Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai prosedur, hak, dan kewajiban dalam mengakses layanan publik, khususnya terkait penggunaan spektrum frekuensi radio. Hal ini membantu masyarakat untuk lebih mudah memanfaatkan layanan yang tersedia secara tertib dan sesuai aturan.

Selain itu, sosialisasi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, sehingga tercipta keteraturan dalam penggunaan frekuensi dan perangkat telekomunikasi. Dampaknya, masyarakat dapat menikmati layanan komunikasi yang lebih berkualitas, stabil, dan merata. Sosialisasi juga memperkuat hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat, karena informasi disampaikan secara transparan dan inklusif. Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya sekedar penyampaian informasi, tetapi juga menjadi sarana edukasi, pemberdayaan, dan penguatan kepercayaan publik terhadap peran pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang profesional dan berintegritas.

V. Tindak Lanjut

Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik dengan target 100% dan berhasil direalisasikan 100% menunjukkan komitmen penuh dalam memberikan informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sebagai tindak lanjut, capaian ini perlu dijadikan pijakan untuk memperkuat evaluasi efektivitas sosialisasi, sehingga dapat diketahui sejauh mana masyarakat memahami dan memanfaatkan layanan publik yang tersedia. Selain itu, hasil capaian dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi peningkatan kualitas sosialisasi di periode berikutnya, misalnya dengan memperluas jangkauan sosialisasi ke wilayah terpencil, menggunakan media digital yang lebih interaktif, serta melibatkan stakeholder lokal untuk memperkuat partisipasi masyarakat.

Langkah tindak lanjut lainnya adalah memperkuat publikasi hasil sosialisasi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Loka Monitor SFR Kendari. Dengan tindak lanjut tersebut, pencapaian 100% tidak hanya menjadi bukti keberhasilan kuantitatif, tetapi juga pijakan strategis untuk menjaga keberlanjutan, kualitas, dan integritas pelayanan publik di masa mendatang.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Sebagai rekomendasi perbaikan dari pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik yang saat ini dilakukan secara door to door ke perusahaan pengguna frekuensi radio, langkah ke depan dapat difokuskan pada efisiensi, jangkauan, dan kualitas interaksi. Pertama, perlu dikembangkan strategi sosialisasi berbasis digital seperti webinar, media sosial, dan portal informasi resmi agar pesan dapat menjangkau lebih luas dengan biaya dan waktu yang lebih efisien. Kedua, tetap mempertahankan metode tatap muka namun diarahkan menjadi forum kelompok atau klasikal, sehingga interaksi lebih efektif dan dapat menampung diskusi serta masukan dari banyak pihak sekaligus.

Selain itu, perlu dilakukan evaluasi efektivitas metode door to door untuk mengukur dampak langsung terhadap pemahaman dan kepatuhan perusahaan. Rekomendasi berikutnya adalah memperkuat kolaborasi dengan asosiasi

atau komunitas agar sosialisasi lebih terkoordinasi dan memiliki daya jangkau yang lebih besar. Terakhir, hasil sosialisasi perlu didokumentasikan dan dipublikasikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Loka Monitor SFR Kendari.

Dengan rekomendasi tersebut, kegiatan sosialisasi ke depan tidak hanya mempertahankan capaian 100%, tetapi juga semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

VII. Efisiensi

Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dapat dilakukan melalui perencanaan kegiatan yang terstruktur, pemanfaatan media komunikasi yang tepat sasaran, serta penggunaan teknologi digital untuk memperluas jangkauan informasi.

Efisiensi dicapai dengan menyusun materi sosialisasi yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami, sehingga pesan inti dapat tersampaikan tanpa membebani waktu maupun biaya. Selain itu, pemanfaatan kanal daring seperti media sosial, website resmi, dan aplikasi komunikasi publik memungkinkan sosialisasi menjangkau masyarakat luas secara cepat dan seragam, sekaligus mengurangi kebutuhan tatap muka yang berulang. Koordinasi lintas unit dan wilayah kerja juga penting agar pelaksanaan sosialisasi berjalan konsisten, tidak terjadi duplikasi, dan tetap sesuai dengan standar pelayanan. Dengan langkah-langkah tersebut, sosialisasi pelayanan publik dapat berlangsung efektif, efisien, dan transparan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja UPT.



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

Dalam pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik, Loka Monitor SFR Kendari selalu berorientasi pada kebutuhan masyarakat di 17 kabupaten/kota wilayah kerja. Informasi mengenai prosedur, layanan, dan regulasi disampaikan dengan jelas agar masyarakat mudah memahami. Dengan berorientasi pada pelayanan, sosialisasi tidak hanya menjadi kegiatan formal, tetapi juga sarana edukasi yang meningkatkan kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Akuntabel

Setiap kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara akuntabel dengan dokumentasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Materi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar dan terpercaya. Dengan akuntabilitas yang terjaga, Loka Monitor SFR Kendari menunjukkan komitmen untuk memberikan layanan publik yang transparan dan berintegritas.

Kompeten

Petugas yang melaksanakan sosialisasi dibekali dengan kompetensi komunikasi dan pemahaman teknis yang memadai. Mereka mampu menjelaskan prosedur pelayanan publik secara sederhana, sehingga mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Kompetensi ini memastikan bahwa sosialisasi berjalan efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah kerja.

Harmonis

Dalam sosialisasi, Loka Monitor SFR Kendari mengedepankan sikap harmonis dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Kegiatan dilaksanakan dengan suasana yang inklusif, menghargai perbedaan, dan tidak diskriminatif. Dengan pendekatan harmonis, sosialisasi menjadi wadah membangun hubungan positif antara instansi dan masyarakat.

Loyal

Sosialisasi pelayanan publik dilaksanakan dengan penuh loyalitas terhadap tugas dan tanggung jawab negara. Petugas menunjukkan komitmen untuk menyampaikan informasi yang benar demi kepentingan masyarakat. Loyalitas ini memperkuat kepercayaan publik terhadap peran pemerintah dalam menjaga keteraturan dan kualitas layanan.

Adaptif

Loka Monitor SFR Kendari senantiasa menyesuaikan metode sosialisasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan media digital, media sosial, maupun tatap muka menjadi bentuk adaptasi agar informasi dapat menjangkau lebih luas. Dengan sikap adaptif, sosialisasi pelayanan publik tetap relevan dan efektif di tengah perubahan zaman.

Kolaboratif

Penanganan piutang BHP frekuensi radio dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Kolaborasi dengan penyelenggara telekomunikasi, aparat hukum, dan masyarakat memperkuat efektivitas penegakan aturan. Dengan semangat kolaboratif, penanganan piutang tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi, tetapi juga menjadi upaya bersama dalam menjaga keteraturan penggunaan spektrum di 17 kabupaten/kota wilayah kerja.



I. Latar Belakang

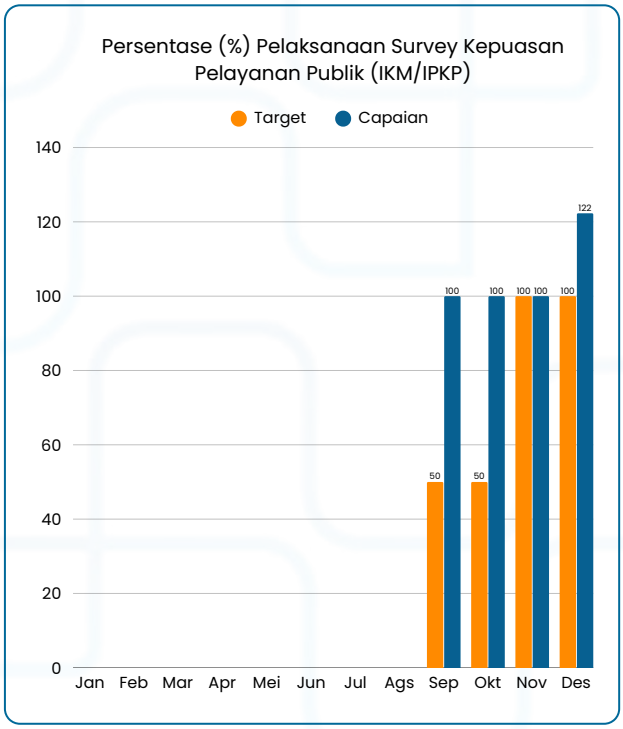
Survey Kepuasan Pelayanan Publik merupakan instrumen penting untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP), instansi memperoleh data objektif mengenai tingkat kepuasan, kejelasan prosedur, kecepatan layanan, profesionalisme petugas, serta transparansi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Indikator ini menekankan pentingnya pelaksanaan survey sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan. Data yang dihasilkan menjadi dasar untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan layanan, sekaligus memberikan masukan bagi perbaikan sistem pelayanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya survey, instansi dapat memastikan bahwa pelayanan publik tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengguna layanan.

Di wilayah kerja Loka Monitor SFR Kendari, pelaksanaan survey kepuasan pelayanan publik telah dilaksanakan sesuai target. Capaian ini menunjukkan komitmen instansi dalam menjaga kualitas layanan, memperkuat akuntabilitas, serta membangun kepercayaan masyarakat. Keberhasilan memenuhi target survey juga menjadi bukti bahwa instansi berorientasi pada peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan, sejalan dengan prinsip transparansi dan integritas pelayanan publik.

II. Capaian

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat partisipasi Masyarakat dalam proses evaluasi kinerja pelayanan. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pelayanan publik dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas layanan, serta sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.



Gambar 3.25 Pencapaian Sosialisasi Pelayanan Publik Tahun 2025

Keterangan Capaian:
Target Survey IKM/IPKP : 3,2 (skala 4)
Hasil Survey IKM/IPKP : 3.92
Jumlah Responden : 144
Capaian : 3.92 /3.2 x 100% =1 22.3%

III. Analisa

Pelaksanaan ini terbagi kedalam dua komponen utama, yaitu :

- Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Dilaksanakan secara berkala untuk mengukur Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap aspek-aspek pelayanan, termasuk kejelasan prosedur, waktu layanan, kompetensi petugas, serta kualitas sarana prasarana. Data kuantitatif yang dihasilkan menjadi dasar dalam Menyusun strategi peningkatan mutu pelayanan secara objektif dan terarah.

- Sosialisasi langsung kepada Masyarakat di Kabupaten/Kota

Diselenggarakan sebagai bentuk edukasi publik mengenai hak dan kewajiban pengguna layanan, standar pelayanan yang berlaku, serta pentingnya peran Masyarakat dalam memberikan masukan dan umpan balik terhadap kualitas layanan. Pendekatan ini diharapkan

mampu mendorong keterlibatan aktif Masyarakat sebagai mitra dalam perbaikan layanan publik.
Melalui sinergi antara pengumpulan data dan edukasi publik, kegiatan ini bertujuan membangun komunikasi dua arah yang konstruktif antara pemerintah dan Masyarakat, sekaligus memastikan bahwa kebijakan pelayanan publik didasarkan pada kebutuhan nyata dan harapan Masyarakat di lapangan.
Tahun 2025, Loka Monitor SFR Kendari melakukan 2 kali sosialisasi Penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi. Yang mana sosialisasi pertama dilakukan dengan berkerjasama dengan DENHUBREM 143 HO Kendari. Dan kedua dilakukan pada perusahaan PT. DSSP Power Kendari.
Capaian kegiatan yang diharapkan peserta

1. Menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) dan menggunakan alat / perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat.
2. Menggunakan spektrum frekuensi radio dimaksud sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan parameter teknis yang diatur dalam Izin Stasiun Radio (ISR) dan tidak menimbulkan gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (harmful interference) kepada pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio lainnya.

Bersedia dan sanggup melunasi denda administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Dampak Kinerja

Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) oleh Loka Monitor SFR Kendari memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Melalui survey ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, penilaian, dan masukan terhadap kualitas layanan yang diterima. Hal ini menciptakan rasa dilibatkan dalam proses evaluasi, sehingga masyarakat merasa dihargai dan memiliki peran dalam peningkatan mutu pelayanan publik.
Selain itu, hasil survey menjadi dasar bagi instansi untuk melakukan perbaikan yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dampaknya, layanan publik yang diberikan semakin responsif, transparan, dan berkualitas. Masyarakat pun merasakan manfaat berupa pelayanan yang lebih cepat, ramah, dan sesuai harapan. Survey ini juga memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah, karena masyarakat dapat melihat bahwa masukan mereka benar-benar digunakan untuk perbaikan. Dengan demikian, pelaksanaan IKM/IPKP bukan hanya sekedar pengumpulan data, tetapi juga instrumen penting dalam membangun komunikasi dua arah, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

V. Tindak Lanjut

Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) dengan target 100% dan berhasil direalisasikan hingga 122,30% menunjukkan keberhasilan yang melampaui ekspektasi dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Sebagai tindak lanjut, capaian ini perlu dijadikan pijakan untuk memperkuat analisis hasil survei secara mendalam, sehingga faktor-faktor yang mendukung kepuasan dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sementara aspek yang masih perlu perbaikan dapat segera ditindaklanjuti.
Selain itu, hasil survei yang melampaui target dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi peningkatan kualitas layanan di periode berikutnya, misalnya dengan memperluas cakupan responden, menggunakan metode pengumpulan data yang lebih variatif, serta mengintegrasikan hasil survei ke dalam sistem pelaporan yang transparan dan interaktif. Langkah tindak lanjut lainnya adalah memperkuat komunikasi hasil survei kepada masyarakat dan stakeholder sebagai bentuk akuntabilitas, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Loka Monitor SFR Kendari. Dengan tindak lanjut tersebut, pencapaian 122,30% tidak hanya menjadi bukti keberhasilan kuantitatif, tetapi juga pijakan strategis untuk menjaga keberlanjutan, kualitas, dan integritas pelayanan publik di masa mendatang.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Sebagai rekomendasi perbaikan dari pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) yang berhasil mencapai 122,30% dari target 100%, langkah ke depan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas metodologi dan pemanfaatan hasil survei.

Pertama, dilakukan penyempurnaan instrumen survei agar pertanyaan lebih mendalam dan mampu menggali aspek layanan yang paling relevan bagi masyarakat. Kedua, memperluas cakupan responden dengan melibatkan lebih banyak kelompok pengguna, termasuk wilayah terpencil, sehingga hasil survei lebih representatif.

Selain itu, hasil survei perlu diintegrasikan ke dalam sistem perbaikan layanan agar rekomendasi dari masyarakat langsung ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan atau inovasi layanan. Rekomendasi berikutnya adalah memperkuat pemanfaatan teknologi survei, seperti aplikasi mobile atau platform daring, untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan data dan transparansi hasil. Terakhir, hasil capaian yang melampaui target harus dipublikasikan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas publik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Loka Monitor SFR Kendari.

Dengan rekomendasi tersebut, pelaksanaan survei ke depan tidak hanya mempertahankan capaian tinggi, tetapi juga semakin berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan pelayanan publik.

VII. Efisiensi

Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dapat dilakukan melalui penerapan metode pengumpulan data yang sederhana, terstruktur, dan berbasis digital. Efisiensi dicapai dengan memanfaatkan kuesioner daring maupun aplikasi survei yang mudah diakses masyarakat, sehingga proses pengumpulan data tidak memerlukan biaya besar dan dapat menjangkau responden lebih luas. Penyusunan pertanyaan harus ringkas, jelas, dan relevan agar responden dapat memberikan jawaban dengan cepat tanpa mengurangi kualitas informasi. Selain itu, pengolahan data dilakukan secara otomatis melalui sistem terintegrasi untuk mempercepat analisis dan menghasilkan laporan yang akurat. Koordinasi lintas unit juga penting agar pelaksanaan survei berjalan seragam di seluruh wilayah kerja dan tidak terjadi duplikasi. Dengan langkah-langkah tersebut, survey kepuasan pelayanan publik dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan, sekaligus menjadi dasar peningkatan mutu layanan yang berkelanjutan.



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

Pelaksanaan survey kepuasan publik mencerminkan komitmen untuk selalu berorientasi pada pelayanan. Melalui survey ini, masyarakat diberikan ruang untuk menilai kualitas layanan yang diterima, sehingga instansi dapat memahami kebutuhan dan harapan mereka secara lebih mendalam. Dengan demikian, hasil survey menjadi dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan agar lebih responsif dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat adalah prioritas utama dalam setiap langkah pelayanan.

Akuntabel

Survey kepuasan publik dilaksanakan secara transparan dan sesuai prosedur, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Setiap data yang dikumpulkan menjadi bukti nyata bahwa instansi menjalankan tugasnya dengan jujur dan terbuka. Akuntabilitas ini memperkuat kepercayaan masyarakat karena mereka melihat bahwa masukan yang diberikan benar-benar digunakan untuk perbaikan layanan. Dengan cara ini, instansi menunjukkan integritas dalam menjalankan amanah publik.

Kompeten

Pelaksanaan survey dilakukan dengan metode yang tepat dan profesional, sehingga hasilnya dapat mencerminkan kondisi pelayanan secara objektif. Tim yang terlibat dituntut untuk memiliki kompetensi dalam mengolah data dan menindaklanjuti hasil survey dengan langkah perbaikan yang relevan. Kompetensi ini memastikan bahwa setiap masukan masyarakat tidak hanya dicatat, tetapi juga diolah menjadi strategi peningkatan layanan. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik terus berkembang seiring dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Harmonis

Survey kepuasan publik menjadi sarana untuk membangun hubungan harmonis antara instansi dan masyarakat. Melalui keterlibatan masyarakat dalam memberikan penilaian, tercipta komunikasi dua arah yang inklusif dan terbuka. Hal ini menumbuhkan rasa kebersamaan, di mana masyarakat merasa dihargai dan didengar. Hubungan harmonis ini memperkuat ikatan sosial serta menciptakan suasana pelayanan yang lebih ramah dan bersahabat.

Loyal

Pelaksanaan survey menunjukkan loyalitas instansi terhadap tugas negara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan menjaga integritas hasil survey, instansi membuktikan komitmennya untuk selalu mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Loyalitas ini tercermin dalam konsistensi menjalankan regulasi dan kebijakan yang berlaku.

Masyarakat pun merasakan bahwa instansi benar-benar setia pada amanah yang diemban.

Adaptif

Survey kepuasan publik mendorong instansi untuk selalu adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Metode survey dapat disesuaikan dengan kondisi terkini, baik secara digital maupun tatap muka, sehingga hasilnya tetap relevan. Adaptivitas ini membuat instansi lebih cepat merespons masukan masyarakat dan menyesuaikan layanan sesuai tuntutan zaman. Dengan begitu, pelayanan publik tetap dinamis dan tidak tertinggal.

Kolaboratif

Pelaksanaan survey kepuasan publik merupakan wujud kolaborasi antara instansi, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif dalam menilai layanan, sementara instansi berkomitmen untuk menindaklanjuti hasilnya dengan perbaikan nyata. Kolaborasi ini menciptakan sinergi yang kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan bekerja bersama, tercipta ekosistem pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.



IK-1.12 Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

I. Latar Belakang

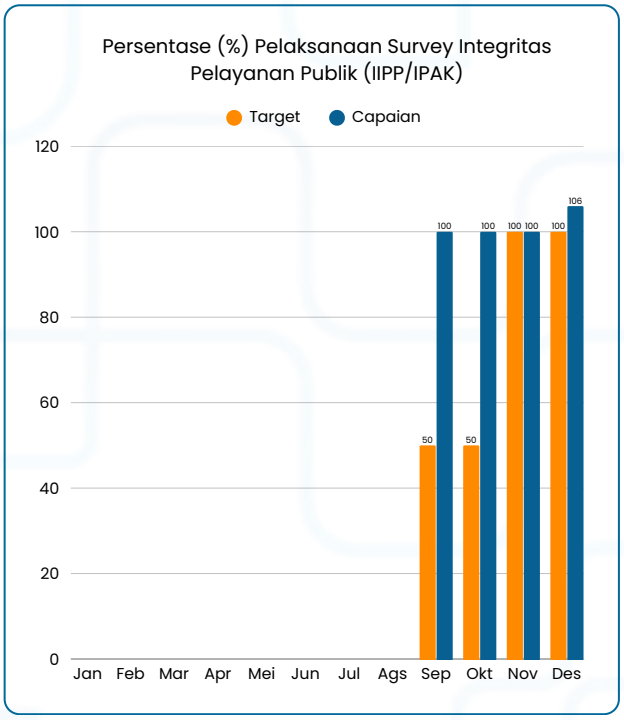
Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) merupakan instrumen penting untuk mengukur tingkat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Survei ini berfungsi sebagai alat evaluasi yang memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana layanan publik dilaksanakan sesuai dengan prinsip bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Indikator ini menekankan pentingnya pelaksanaan survei sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Melalui survei, diperoleh data mengenai persepsi masyarakat terhadap integritas layanan, potensi kerawanan, serta peluang perbaikan yang dapat dilakukan. Hasil survei menjadi dasar untuk merumuskan strategi peningkatan kualitas layanan, memperkuat budaya integritas, dan memastikan bahwa pelayanan publik berjalan sesuai dengan nilai-nilai tata kelola yang baik.

Di wilayah kerja Loka Monitor SFR Kendari, pelaksanaan survei integritas pelayanan publik telah dilaksanakan sesuai target. Capaian ini menunjukkan komitmen instansi dalam menjaga integritas layanan, memperkuat akuntabilitas, serta membangun kepercayaan masyarakat. Keberhasilan memenuhi target juga menjadi bukti bahwa instansi tidak hanya berorientasi pada pencapaian administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan publik yang berintegritas dan berkelanjutan.

II. Capaian

Realisasi/Pencapaian target PK (Perjanjian Kinerja) Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) di Loka Monitor SFR Kendari adalah 100%.



Gambar 3.26 Pencapaian Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) tahun 2025

Keterangan Capaian:
Target Survey IIPP/IPAK : 3.68 (skala 4)
Hasil Survey IIPP/IPAK : 3.89
Jumlah Responden : 58
Capaian : 3.89 / 3.6 x 100% = 106%



III. Analisa

Grafik menunjukkan perkembangan pelaksanaan survey integritas pelayanan publik sepanjang tahun 2025. Dari bulan Januari hingga Agustus belum terdapat target maupun capaian yang tercatat. Memasuki bulan September, target ditetapkan sebesar 50%, namun capaian langsung melampaui target dengan hasil 100%. Tren positif ini berlanjut pada bulan Oktober dengan target yang sama, yaitu 50%, dan capaian tetap konsisten di angka 100%.

Pada bulan November, target meningkat menjadi 100% dan berhasil dicapai penuh. Bahkan pada bulan Desember, capaian melampaui target dengan hasil 106% dibanding target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan survei integritas pelayanan publik tidak hanya memenuhi target, tetapi juga mampu melampaui ekspektasi pada akhir tahun.

Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan kinerja yang sangat baik, dengan capaian yang konsisten melampaui target sejak bulan September hingga Desember. Keberhasilan ini menjadi indikator kuat bahwa strategi pelaksanaan survei integritas berjalan efektif, serta menunjukkan komitmen instansi dalam menjaga kualitas layanan publik yang berintegritas.

IV. Dampak Kinerja

Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) oleh Loka Monitor SFR Kendari memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dalam membangun kepercayaan terhadap layanan pemerintah. Melalui survei ini, masyarakat dapat menilai sejauh mana prinsip integritas dijalankan dalam setiap proses pelayanan, mulai dari transparansi, kejujuran, hingga konsistensi dalam pelaksanaan tugas. Hal ini membuat masyarakat merasa lebih dilibatkan dan memiliki peran aktif dalam menjaga kualitas serta integritas layanan publik.

Selain itu, hasil survei menjadi cerminan komitmen instansi untuk memperbaiki dan meningkatkan tata kelola pelayanan agar lebih bersih dari praktik yang merugikan masyarakat. Dampaknya, masyarakat memperoleh kepastian bahwa layanan yang diberikan tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga berlandaskan nilai keadilan dan kejujuran. Survei ini juga memperkuat akuntabilitas pemerintah, karena masyarakat dapat melihat bahwa masukan mereka benar-benar digunakan untuk memperbaiki sistem pelayanan.

Dengan demikian, pelaksanaan IIPP/IPAK bukan hanya sekadar pengumpulan data, tetapi juga instrumen penting dalam membangun budaya integritas, memperkuat hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang berorientasi pada kepentingan bersama.

V. Tindak Lanjut

Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) dengan target 100% dan berhasil direalisasikan hingga 106% menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas layanan publik. Sebagai tindak lanjut, capaian ini perlu dijadikan pijakan untuk memperkuat analisis hasil survei integritas secara mendalam, sehingga faktor-faktor yang mendukung integritas dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sementara aspek yang masih berpotensi menimbulkan risiko dapat segera diperbaiki.

Selain itu, hasil survei yang melampaui target dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi pencegahan pelanggaran integritas di periode berikutnya, misalnya dengan memperkuat mekanisme pengawasan internal, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi, serta mengintegrasikan hasil survei ke dalam sistem pelaporan yang lebih transparan. Langkah tindak lanjut lainnya adalah memperkuat komunikasi hasil survei kepada stakeholder dan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Loka Monitor SFR Kendari.

Dengan tindak lanjut tersebut, pencapaian 106% tidak hanya menjadi bukti keberhasilan kuantitatif, tetapi juga pijakan strategis untuk menjaga keberlanjutan, kualitas, dan integritas pelayanan publik di masa mendatang.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Sebagai rekomendasi perbaikan dari pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) yang berhasil mencapai 106% dari target 100%, langkah ke depan perlu difokuskan pada penguatan kualitas survei dan pemanfaatan hasilnya. Pertama, dilakukan penyempurnaan instrumen survei agar indikator integritas

lebih tajam dan mampu mengidentifikasi potensi risiko secara detail. Kedua, memperluas cakupan responden dengan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk pengguna layanan dari wilayah terpencil, sehingga hasil survei lebih representatif.
Selain itu, hasil survei perlu diintegrasikan ke dalam sistem pengawasan internal agar rekomendasi dari masyarakat langsung ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan atau inovasi layanan. Rekomendasi berikutnya adalah memperkuat pemanfaatan teknologi survei, seperti aplikasi daring atau platform digital, untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan data dan transparansi hasil. Terakhir, hasil capaian yang melampaui target harus dipublikasikan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas publik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Loka Monitor SFR Kendari.
Dengan rekomendasi tersebut, pelaksanaan survei ke depan tidak hanya mempertahankan capaian tinggi, tetapi juga semakin berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan integritas pelayanan publik.

VII. Efisiensi

Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dapat dilakukan melalui penerapan metode pengumpulan data yang sederhana, terstruktur, dan berbasis digital. Efisiensi dicapai dengan memanfaatkan kuesioner daring maupun aplikasi survei yang mudah diakses masyarakat, sehingga proses pengumpulan data dapat menjangkau responden lebih luas tanpa memerlukan biaya besar. Pertanyaan dalam survei harus disusun secara ringkas, jelas, dan relevan agar responden dapat memberikan jawaban dengan cepat tanpa mengurangi kualitas informasi yang diperoleh. Pengolahan data dilakukan secara otomatis melalui sistem terintegrasi untuk mempercepat analisis dan menghasilkan laporan yang akurat. Selain itu, koordinasi lintas unit dan wilayah kerja perlu diperkuat agar pelaksanaan survei berjalan seragam, konsisten, dan tidak terjadi duplikasi. Dengan langkah-langkah tersebut, survei integritas pelayanan publik dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan, sekaligus menjadi dasar peningkatan mutu layanan publik yang berkelanjutan.



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik menunjukkan komitmen instansi untuk selalu berorientasi pada pelayanan yang berkualitas. Melalui survei ini, masyarakat dapat menilai sejauh mana integritas dijaga dalam setiap proses pelayanan. Hasil survei menjadi bahan evaluasi agar pelayanan semakin transparan, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kepuasan dan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah dapat terus ditingkatkan.

Akuntabel

Survei integritas dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi, di mana setiap data yang dikumpulkan diproses secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat melihat bahwa hasil survei bukan sekadar formalitas, melainkan benar-benar digunakan untuk memperbaiki sistem pelayanan. Akuntabilitas ini memperkuat kepercayaan publik karena adanya bukti nyata bahwa instansi menjalankan tugas dengan jujur dan terbuka. Dengan cara ini, instansi menunjukkan integritas dalam mengelola amanah publik.

Kompeten

Pelaksanaan survei menuntut kompetensi dari tim pelaksana agar hasil yang diperoleh valid dan objektif. Kompetensi ini mencakup kemampuan dalam merancang instrumen survei, mengolah data, serta menindaklanjuti hasil dengan langkah perbaikan yang tepat. Dengan kompetensi yang baik, hasil survei dapat mencerminkan kondisi pelayanan secara akurat. Hal ini memastikan bahwa setiap masukan masyarakat benar-benar menjadi dasar peningkatan kualitas layanan publik.

Harmonis

Survei integritas menjadi sarana untuk membangun hubungan harmonis antara instansi dan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam memberikan penilaian, tercipta komunikasi dua arah yang inklusif dan terbuka. Hal ini menumbuhkan rasa kebersamaan, di mana masyarakat merasa dihargai dan didengar. Hubungan harmonis ini memperkuat ikatan sosial serta menciptakan suasana pelayanan yang lebih ramah dan bersahabat.

Loyal

Pelaksanaan survei integritas mencerminkan loyalitas instansi terhadap tugas negara dalam menjaga kepercayaan publik. Dengan menjaga integritas hasil survei, instansi membuktikan komitmennya untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Loyalitas ini tercermin dalam konsistensi menjalankan regulasi dan kebijakan yang berlaku. Masyarakat pun merasakan bahwa instansi benar-benar setia pada amanah yang diemban.

Adaptif

Survei integritas mendorong instansi untuk selalu adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Metode survei dapat disesuaikan dengan teknologi terbaru, baik secara digital maupun tatap muka, sehingga hasilnya tetap relevan. Adaptivitas ini membuat instansi lebih cepat merespons masukan masyarakat dan menyesuaikan layanan sesuai tuntutan integritas publik. Dengan begitu, pelayanan tetap dinamis dan tidak tertinggal.

Kolaboratif

Pelaksanaan survei integritas merupakan wujud kolaborasi antara instansi, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif dalam menilai layanan, sementara instansi berkomitmen untuk menindaklanjuti hasilnya dengan perbaikan nyata. Kolaborasi ini menciptakan sinergi yang kuat dalam menjaga integritas pelayanan publik. Dengan bekerja bersama, tercipta ekosistem pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.



IK-1.13 Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)

I. Latar Belakang

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas yang harus dikelola secara tertib dan sesuai dengan izin yang diberikan. Dalam praktiknya, masih ditemukan site Izin Stasiun Radio (ISR) Microwave Link yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis maupun administratif. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan gangguan interferensi, menurunkan kualitas layanan telekomunikasi, serta merugikan masyarakat maupun penyelenggara layanan.

Indikator tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi) menekankan pentingnya langkah korektif terhadap temuan di lapangan. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian parameter teknis, lokasi, dan perangkat yang digunakan dengan izin yang telah diterbitkan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, tindak lanjut dilakukan melalui koordinasi dengan pengguna frekuensi, penyampaian rekomendasi perbaikan, hingga penegakan aturan sesuai ketentuan yang berlaku.

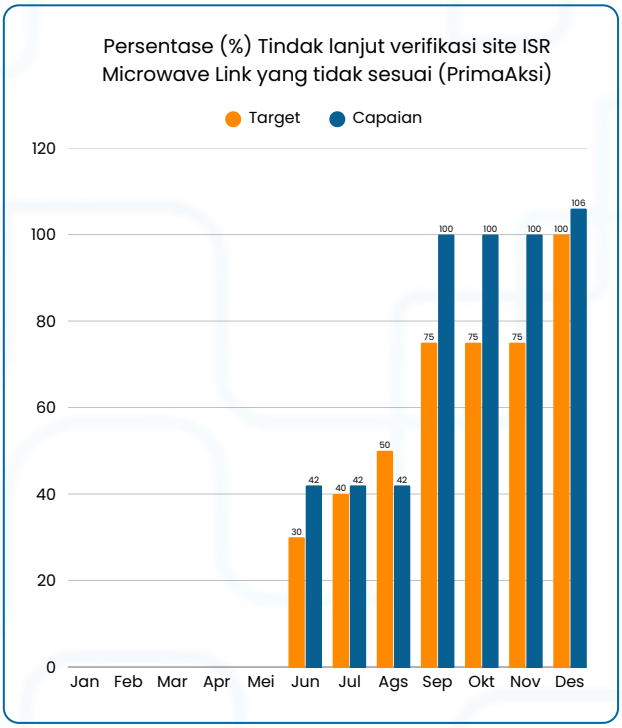
Di wilayah kerja Loka Monitor SFR Kendari, pelaksanaan tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link telah dilaksanakan sesuai target. Capaian ini menunjukkan komitmen instansi dalam menjaga keteraturan penggunaan spektrum, meningkatkan kepatuhan pengguna, serta memperkuat kualitas layanan telekomunikasi. Keberhasilan memenuhi target juga menjadi bukti bahwa sistem pengawasan dan tindak lanjut yang diterapkan berjalan efektif, sekaligus mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di bidang telekomunikasi.

II. Capaian

Verifikasi data site ISR Microwave Link merupakan salah satu elemen krusial dalam kegiatan pembenahan data Izin Stasiun Radio (ISR) khususnya dalam implementasi program Prima Aksi (Perizinan dan Informasi Monitoring yang Akurat, Simple, dan Integratif). Program ini merupakan inisiatif strategis DJID dalam Upaya meningkatkan efisiensi dan akurasi proses perizinan ISR dengan mempertimbanagkan kondisi teknis riil di lapangan.

Pada tahun 2025, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari telah melaksanakan kegiatan verifikasi data koordinat Lokasi site microwave link milik operator seluler. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian antara data koordinat yang tercantum dalam dokumen ISR dengan hasil pengukuran dan observasi aktual di lapangan. Melalui koordinasi aktif dengan operator telekomunikasi, dilakukan pemutakhiran data ISR yang mencakup validasi posisi geografis, identifikasi kesalahan input data, dan penyesuaian parameter teknis frekuensi.

Tujuan utama kegiatan ini Adalah untuk memastikan bahwa seluruh titik koordinat pemancar dan penerima microwave telah sesuai dengan kondisi faktual, guna mencegah potensi interference antar pengguna frekuensi dan untuk meningkatkan ketepatan analisis teknis pada saat proses penetapan ISR baru atau perpanjangan. Selain itu, kegiatan ini mendukung pencapaian kualitas pelayanan publik berbasis data yang akurat dan relevan.



Gambar 3.27 Pencapaian Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)

Keterangan Capaian:
Jumlah Site ISR tidak Sesuai yang Telah DiTindaklanjuti : 4350 data ISR
Jumlah Site ISR Tidak Sesuai/target Prima Aksi : 4350
Capaian : 4350/4350 x 100% = 100%
Keterangan :
Verifikasi Koordinat Site Sesuai Data ISR : 3607
Verifikasi Koordinat Site tidak Sesuai ISR : 911*
Verifikasi Koordinat Site Relokasi/Dismantle : 7
Data Tidak sesuai telah ditindaklanjuti ke operator seluler terkait
Isu/Risiko
Kegiatan Verifikasi Koordinat Site Telah ditindaklanjuti dengan Surat pemberitahuan ke masing masing operator seluler untuk segera ditindaklanjuti

III. Analisa

Grafik memperlihatkan perkembangan tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai sepanjang tahun 2025. Pada awal tahun, dari Januari hingga April, belum terdapat data target maupun capaian. Memasuki bulan Mei, target ditetapkan sebesar 30% dan capaian berhasil melampaui target dengan angka 42%. Tren capaian tetap konsisten di angka 42% pada bulan Juni hingga Agustus, meskipun target meningkat dari 40% hingga 50%.
Perubahan signifikan terjadi pada bulan September, ketika target naik menjadi 75% dan capaian langsung melesat hingga 100%. Konsistensi capaian 100% terus berlanjut pada bulan Oktober dan November, menunjukkan efektivitas tindak lanjut yang dilakukan. Pada bulan Desember, target akhir sebesar 100% bahkan berhasil dilampaui dengan capaian 106%, menandakan adanya kelebihan hasil dari target yang ditetapkan.
Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan peningkatan kinerja yang jelas, dari capaian awal yang stabil di angka 42% hingga melampaui target di akhir tahun. Keberhasilan mencapai dan bahkan melampaui target pada bulan Desember menjadi bukti komitmen dan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai.

IV. Dampak Kinerja

Pelaksanaan Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi) dengan capaian 100% memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Verifikasi ini memastikan bahwa penggunaan frekuensi radio oleh perusahaan sesuai dengan standar teknis dan regulasi yang berlaku, sehingga kualitas jaringan komunikasi tetap terjaga. Dampaknya, masyarakat memperoleh akses layanan komunikasi yang lebih stabil, aman, dan bebas dari gangguan akibat ketidaksesuaian perangkat atau site.
Selain itu, keberhasilan verifikasi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dalam mengawasi penggunaan spektrum frekuensi, karena masyarakat melihat adanya komitmen untuk menjaga integritas dan keteraturan layanan. Dengan site yang sesuai standar, risiko interferensi antar pengguna frekuensi dapat ditekan, sehingga mendukung kelancaran komunikasi di berbagai sektor, termasuk layanan darurat, bisnis, dan aktivitas sehari-hari. Secara keseluruhan, tindak lanjut ini memperkuat perlindungan kepentingan masyarakat sekaligus mendukung terciptanya ekosistem komunikasi yang lebih tertib dan berkelanjutan di wilayah Sulawesi Tenggara.

V. Tindak Lanjut

Pelaksanaan Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi) dengan target 100% dan berhasil direalisasikan 100% menunjukkan keberhasilan penuh dalam memastikan kepatuhan teknis serta keakuratan data jaringan frekuensi radio. Sebagai tindak lanjut, capaian ini perlu dijadikan pijakan untuk memperkuat evaluasi hasil verifikasi agar faktor keberhasilan dapat dipertahankan dan potensi ketidaksesuaian di masa mendatang dapat diminimalisasi.
Selain itu, hasil capaian dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi peningkatan kualitas verifikasi, misalnya dengan memperluas cakupan site yang diverifikasi, memperkuat dokumentasi teknis, serta mengintegrasikan hasil verifikasi ke dalam sistem monitoring berbasis digital agar lebih transparan dan mudah diakses. Langkah tindak lanjut lainnya adalah memperkuat koordinasi

lintas unit dan stakeholder terkait, sehingga proses verifikasi berjalan lebih cepat, konsisten, dan sesuai standar.

Dengan tindak lanjut tersebut, pencapaian 100% tidak hanya menjadi bukti keberhasilan kuantitatif, tetapi juga pijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pengawasan, integritas data, dan keandalan layanan frekuensi radio di masa mendatang.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Sebagai rekomendasi perbaikan dari pelaksanaan Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi) yang telah mencapai target 100%, langkah ke depan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas verifikasi dan keberlanjutan sistem pengawasan. Pertama, dilakukan penyempurnaan prosedur verifikasi dengan standar teknis yang lebih detail agar potensi ketidaksesuaian dapat diidentifikasi lebih cepat. Kedua, memperkuat digitalisasi sistem monitoring sehingga hasil verifikasi dapat terdokumentasi secara real-time dan transparan.

Selain itu, perlu adanya pelatihan teknis berkelanjutan bagi tim pelaksana agar kompetensi tetap terjaga meskipun kompleksitas site meningkat. Rekomendasi berikutnya adalah memperkuat koordinasi lintas unit dan stakeholder untuk memastikan tindak lanjut hasil verifikasi berjalan lebih cepat dan konsisten. Terakhir, hasil capaian optimal ini dapat dijadikan dasar untuk advokasi kebijakan dan anggaran, sehingga dukungan terhadap kegiatan verifikasi semakin kuat dan berkesinambungan.Dengan rekomendasi tersebut, pelaksanaan ke depan tidak hanya mempertahankan capaian 100%, tetapi juga semakin berkualitas, efisien, dan berorientasi pada peningkatan integritas serta keandalan layanan frekuensi radio.

VII. Efisiensi

Pelaksanaan Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi) dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dapat dilakukan melalui penerapan mekanisme kerja yang terstruktur, berbasis data, dan berorientasi pada prioritas. Efisiensi dicapai dengan memanfaatkan hasil verifikasi awal sebagai dasar penentuan site yang perlu segera ditindaklanjuti, sehingga sumber daya difokuskan pada kasus yang paling berdampak terhadap keteraturan penggunaan frekuensi. Proses tindak lanjut dilakukan dengan pencatatan digital dan pelaporan terintegrasi agar alur kerja lebih cepat serta meminimalkan kesalahan manual. Selain itu, koordinasi lintas unit dan wilayah kerja perlu diperkuat untuk memastikan konsistensi penanganan dan menghindari duplikasi pekerjaan. Dengan langkah-langkah tersebut, tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pengelolaan spektrum frekuensi radio di lingkungan UPT.



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

Dalam tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link, prinsip berorientasi pelayanan diwujudkan dengan memastikan setiap langkah yang diambil memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pengguna frekuensi. Tim harus fokus pada penyelesaian masalah secara cepat dan tepat, sehingga kualitas layanan komunikasi tetap terjaga. Pelayanan yang baik juga ditunjukkan melalui transparansi hasil verifikasi, agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan akurat. Dengan demikian, tindak lanjut tidak hanya sekadar memenuhi target teknis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja UPT.

Akuntabel

Akuntabilitas dalam tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link diwujudkan melalui pencatatan yang rapi, pelaporan yang terintegrasi, serta dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tindakan harus memiliki dasar data yang valid, sehingga hasil verifikasi dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Tim pelaksana juga perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku. Dengan akuntabilitas yang kuat, proses tindak lanjut akan lebih dipercaya dan mendukung integritas pengelolaan spektrum frekuensi radio.

Kompeten

Kompetensi tim menjadi kunci dalam melaksanakan tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link secara efisien. Hal ini dapat diwujudkan melalui pelatihan teknis berkelanjutan, sehingga kemampuan tim selalu terjaga meskipun kompleksitas site meningkat. Kompetensi juga mencakup kemampuan menggunakan sistem digital untuk mempercepat analisis dan pelaporan hasil verifikasi. Dengan tim yang kompeten, tindak lanjut dapat dilakukan secara tepat, cepat, dan sesuai standar teknis yang berlaku, sehingga kualitas hasil verifikasi tetap terjamin.

Harmonis

Prinsip harmonis diwujudkan melalui koordinasi lintas unit dan stakeholder dalam tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link. Kerja sama yang baik antar tim akan mempercepat proses penanganan dan menghindari duplikasi pekerjaan. Selain itu, komunikasi yang terbuka dan saling menghargai antar pihak akan menciptakan suasana kerja yang kondusif. Dengan keharmonisan, tindak lanjut verifikasi dapat berjalan lebih lancar, konsisten, dan menghasilkan keputusan yang diterima semua pihak.

Loyal

Loyalitas dalam tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link ditunjukkan dengan komitmen penuh terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Adaptif

Adaptif berarti mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan dinamika lapangan dalam pelaksanaan tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link. Tim harus cepat merespons perubahan kondisi, baik dari sisi teknis maupun regulasi, sehingga langkah penanganan tetap relevan dan efektif. Sikap adaptif juga ditunjukkan dengan keterbukaan terhadap masukan serta penggunaan metode baru yang lebih efisien. Dengan kemampuan beradaptasi, proses verifikasi dapat terus berjalan optimal meskipun menghadapi tantangan yang berbeda di setiap site.

Kolaboratif

Kolaboratif diwujudkan melalui kerja sama yang erat antara tim internal, unit lain, dan stakeholder eksternal dalam tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link. Sinergi antar pihak akan mempercepat proses penanganan, mengurangi potensi kesalahan, serta memastikan hasil verifikasi lebih komprehensif. Komunikasi yang terbuka dan saling mendukung menjadi kunci agar setiap pihak merasa memiliki tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi yang baik, tindak lanjut verifikasi tidak hanya efisien tetapi juga menghasilkan keputusan yang lebih kuat dan dapat diterima semua pihak.



IK-2.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai/Loka Tahun 2025

I. Latar Belakang

Pengelolaan anggaran merupakan salah satu aspek fundamental dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai/Loka. Nilai Kinerja Anggaran menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator ini tidak hanya mencerminkan kemampuan instansi dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan, tetapi juga menjadi tolok ukur akuntabilitas dan integritas pengelolaan anggaran di lingkungan kerja.

Pelaksanaan kinerja anggaran yang baik ditunjukkan melalui kesesuaian antara target dan realisasi, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, serta kualitas output yang dihasilkan. Nilai Kinerja Anggaran juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif.

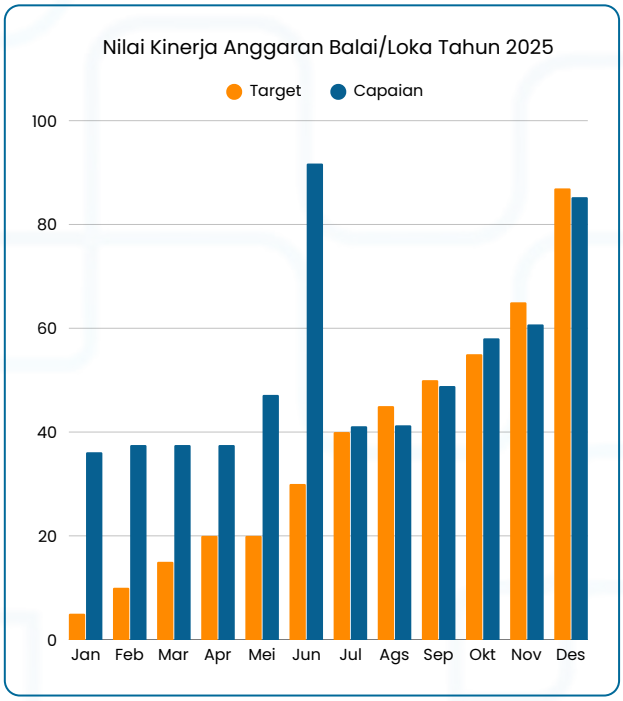
Di Loka Monitor SFR Kendari, pencapaian nilai kinerja anggaran tahun 2025 sesuai target menunjukkan komitmen instansi dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Keberhasilan ini sekaligus menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran telah mendukung pelaksanaan program kerja secara optimal, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan.

II. Capaian

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan salah satu ukuran utama dalam menilai efektivitas tata kelola keuangan negara di tingkat satuan kerja. IKPA disusun oleh Kementerian Keuangan melalui sistem evaluasi berbasis aplikasi SMART, OMSPAN, dan Monev Bappenas.

Terdapat 7 indikator utama yang digunakan dalam penilaian IKPA mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, yaitu:

7 indikator IKPA
- Revisi DIPA
- Deviasi Hal. 3 DIPA
- Penyerapan Anggaran
- Belanja Kontraktual
- Penyelesaian Tagihan
- Pengelolaan UP dan TUP
- Capaian Output



Gambar 3.28 Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Balai/Loka Tahun 2025

Keterangan Capaian:
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJID bulan Desember 2025 :
Dipa Lama :
NK Pelaksanaan Anggaran : 99.02 / (99.02x50%) = 49.51
NK Perencanaan Anggaran :
Dipa Baru :
NK Pelaksanaan Anggaran : 92 / (92x50%) = 46
NK Perencanaan Anggaran : 37.5

Capaian = NK Perencanaan + ((NK Pelaksanaan Dipa Lama + NK Pelaksanaan Dipa Baru)/2)

NKA:
= 37.5 + (49.51 + 46)/2
= 37.5 + 47.755
= 85.255
Capaian : Smart + IKPA = 85.26

Dengan pencapaian IKPA sebesar 85.26, Loka Monitor SFR Kendari telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan anggaran, meskipun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan dalam aspek perencanaan dan serapan anggaran. Evaluasi ini menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan penganggaran tahun berikutnya guna mencapai tata kelola anggaran yang semakin efektif dan efisien.

III. Analisa

Berdasarkan data Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai/Loka Tahun 2025, secara umum capaian kinerja anggaran menunjukkan hasil yang cukup baik dan progresif sepanjang tahun. Pada awal tahun, capaian kinerja sudah berada di atas target yang ditetapkan, dimana pada Januari target sebesar 5,00 berhasil mencapai 36,11 dan terus stabil hingga April di kisaran 37,50. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran pada triwulan awal telah berjalan dengan baik serta didukung oleh kesiapan perencanaan dan administrasi yang cukup optimal.

Pada periode pertengahan tahun terjadi fluktuasi capaian yang cukup signifikan. Capaian meningkat pada Mei menjadi 47,16 dan mencapai puncak pada Juni sebesar 91,74. Namun setelah itu terjadi penurunan pada Juli dan Agustus yang berada pada kisaran 41. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh adanya percepatan realisasi kegiatan strategis pada bulan Juni, sementara pada bulan berikutnya kemungkinan terdapat kendala pelaksanaan kegiatan, revisi anggaran, maupun keterlambatan administrasi sehingga mempengaruhi capaian nilai kinerja anggaran. Meskipun demikian, memasuki semester kedua hingga akhir tahun, capaian kembali menunjukkan tren peningkatan secara bertahap, mulai dari 48,87 pada September hingga mencapai 85,26 pada Desember.

Secara keseluruhan, capaian akhir sebesar 85,26 dari target 86,95 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Balai/Loka Tahun 2025 telah berjalan cukup efektif dan mendekati target yang ditetapkan. Walaupun masih terdapat sedikit selisih dari target akhir, hasil tersebut tetap mencerminkan adanya komitmen dan upaya optimal dari unit kerja dalam melaksanakan kegiatan serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. Ke depan, diperlukan peningkatan konsistensi pelaksanaan kegiatan, penguatan monitoring dan evaluasi, serta percepatan proses administrasi agar capaian kinerja anggaran dapat lebih stabil dan target tahunan dapat tercapai secara maksimal.

IV. Dampak Kinerja

Capaian nilai kinerja anggaran yang baik menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran telah berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini berdampak pada meningkatnya kualitas pelaksanaan program dan kegiatan, karena anggaran dapat dimanfaatkan sesuai target dan kebutuhan organisasi. Selain itu, tingginya capaian NKA juga mencerminkan adanya koordinasi dan pengendalian internal yang baik antar pegawai maupun unit kerja dalam mendukung realisasi kegiatan tepat waktu.

Dari sisi pelayanan, capaian kinerja anggaran yang optimal turut mendukung kelancaran operasional Balai/Loka, seperti kegiatan monitoring frekuensi radio, inspeksi perangkat telekomunikasi, pengukuran kualitas layanan telekomunikasi, hingga dukungan administrasi dan pelayanan publik lainnya. Dengan pengelolaan anggaran yang baik, kegiatan operasional dapat terlaksana secara maksimal sehingga pelayanan kepada masyarakat maupun stakeholder menjadi lebih efektif dan responsif.

Selain itu, indikator NKA juga berdampak pada peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan terhadap instansi. Nilai kinerja anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan secara bertanggung jawab, terukur, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan organisasi dalam menerapkan manajemen ASN yang profesional, transparan, dan berorientasi hasil. Namun demikian, adanya fluktuasi capaian pada beberapa periode juga memberikan dampak evaluatif bagi organisasi, khususnya terkait konsistensi pelaksanaan kegiatan dan pengendalian realisasi anggaran. Oleh karena itu, hasil indikator NKA Tahun 2025 dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas perencanaan kegiatan, memperkuat monitoring internal, serta meminimalisir keterlambatan pelaksanaan anggaran pada periode berikutnya.

V. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai/Loka Tahun 2025, diperlukan beberapa langkah strategis guna mempertahankan serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pada periode berikutnya. Salah satu tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala, baik bulanan maupun triwulanan, sehingga setiap kendala dalam realisasi kegiatan dapat segera diidentifikasi dan ditangani lebih cepat. Selain itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi antar pengelola kegiatan, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), serta pengelola keuangan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih sinkron dan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
Tindak lanjut lainnya adalah melakukan percepatan proses administrasi dan pengadaan barang/jasa guna menghindari penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun. Optimalisasi perencanaan kegiatan sejak awal tahun juga perlu diperkuat agar target kinerja dapat tercapai secara lebih konsisten tanpa mengalami fluktuasi yang signifikan pada periode tertentu. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pembinaan maupun pelatihan terkait pengelolaan anggaran dan penggunaan aplikasi pendukung keuangan juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan hasil capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai/Loka Tahun 2025, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan konsistensi pengelolaan anggaran pada periode berikutnya. Salah satu rekomendasi utama adalah memperkuat perencanaan kegiatan dan penjadwalan realisasi anggaran sejak awal tahun agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih terstruktur dan tidak menumpuk pada periode tertentu. Penyusunan target dan timeline kegiatan yang lebih realistis juga diperlukan untuk meminimalisir terjadinya fluktuasi capaian kinerja antar bulan.
Selain itu, perlu dilakukan peningkatan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap progres pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Monitoring yang dilakukan secara berkala akan membantu unit kerja dalam mendeteksi lebih awal potensi keterlambatan, kendala administrasi, maupun hambatan teknis lainnya sehingga dapat segera dilakukan langkah mitigasi. Penguatan koordinasi antara pengelola keuangan, pelaksana kegiatan, dan pimpinan juga perlu ditingkatkan agar proses pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan sinkron.
Rekomendasi lainnya adalah meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan melalui pelatihan, pembinaan, maupun pendampingan teknis terkait penggunaan aplikasi keuangan dan pengelolaan dokumen pendukung kegiatan. Selain itu, percepatan proses pengadaan barang dan jasa juga perlu menjadi perhatian untuk menghindari keterlambatan realisasi anggaran di akhir tahun. Dengan adanya langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan capaian Nilai Kinerja Anggaran pada tahun berikutnya dapat lebih optimal, stabil, dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tugas serta pelayanan publik di lingkungan Balai/Loka.

VII. Efisiensi

Pelaksanaan Nilai Kinerja Anggaran Balai/Loka Tahun 2025 dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dapat dilakukan melalui pengelolaan anggaran yang terstruktur, transparan, dan berbasis hasil. Efisiensi dicapai dengan memastikan setiap alokasi anggaran diarahkan pada program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik, sehingga tidak terjadi pemborosan pada kegiatan yang kurang relevan. Proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dilakukan secara terintegrasi dengan sistem keuangan negara, agar pencatatan dan pelaporan lebih cepat serta meminimalkan kesalahan manual. Selain itu, pengawasan internal perlu diperkuat melalui mekanisme evaluasi berkala, sehingga penggunaan anggaran dapat dikendalikan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan langkah-langkah tersebut, nilai kinerja anggaran Balai/Loka tahun 2025 dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel, sekaligus mendukung peningkatan mutu layanan publik di seluruh wilayah kerja.

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

Anggaran diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan publik. Setiap alokasi harus tepat sasaran agar manfaatnya nyata dan tidak terjadi pemborosan. Dengan orientasi pelayanan, anggaran menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kepercayaan publik.

Akuntabel

Penggunaan anggaran dicatat rapi, dilaporkan transparan, dan didokumentasikan sesuai regulasi agar dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan internal dilakukan berkala untuk mencegah penyimpangan dan memastikan kesesuaian dengan aturan. Akuntabilitas yang kuat menjadikan pengelolaan anggaran lebih dipercaya dan berintegritas.

Kompeten

Tim pengelola anggaran harus memiliki kapasitas teknis yang memadai melalui pelatihan berkelanjutan dan pemahaman regulasi. Kompetensi memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dilakukan tepat dan sesuai standar. Dengan tim yang kompeten, efisiensi penggunaan anggaran dapat terjaga optimal.

Harmonis

Koordinasi lintas unit dan komunikasi terbuka mencegah tumpang tindih program serta meningkatkan efisiensi. Keharmonisan menciptakan suasana kerja kondusif dan rasa tanggung jawab bersama. Dengan kerja sama yang baik, target kinerja anggaran lebih mudah tercapai.

Loyal

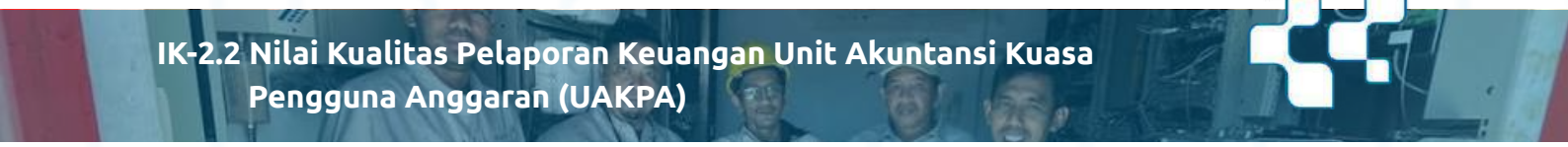
Loyalitas ditunjukkan dengan komitmen penuh terhadap aturan dan regulasi dalam pengelolaan anggaran. Integritas dijaga melalui konsistensi pelaksanaan sesuai visi dan misi organisasi. Sikap loyal memastikan anggaran menjadi kontribusi nyata bagi keberlangsungan layanan publik.

Adaptif

Tim harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan masyarakat yang berubah. Respons cepat terhadap regulasi baru menjaga relevansi penggunaan anggaran. Dengan adaptif, pengelolaan tetap efektif meski menghadapi tantangan baru.

Kolaboratif

Kerja sama erat dengan stakeholder eksternal memperkuat efektivitas penggunaan anggaran. Sinergi memastikan program sesuai kebutuhan masyarakat dan mendukung efisiensi. Kolaborasi yang baik menjadikan kinerja anggaran berkelanjutan dan berdampak luas.



IK-2.2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

I. Latar Belakang

Pelaporan keuangan merupakan salah satu aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) memiliki peran strategis dalam menyusun, menyajikan, dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Nilai kualitas pelaporan keuangan menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana laporan yang dihasilkan memenuhi prinsip ketepatan waktu, kelengkapan, keandalan, serta kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.

Indikator ini menekankan pentingnya konsistensi dan integritas dalam proses penyusunan laporan keuangan. Laporan yang berkualitas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan program, serta evaluasi kinerja instansi. Dengan demikian, kualitas pelaporan keuangan menjadi cerminan komitmen instansi terhadap akuntabilitas publik dan tata kelola yang baik.

Di Loka Monitor SFR Kendari, pencapaian nilai kualitas pelaporan keuangan sesuai target tahun 2025 menunjukkan keberhasilan dalam menjaga standar akuntansi pemerintah. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan keuangan telah berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Keberhasilan ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas instansi, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional dan berkelanjutan.

Pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu merupakan pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance. Dalam hal ini, penilaian atas Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) menjadi indikator strategis yang merefleksikan kinerja manajerial satuan kerja dalam mengelola anggaran secara tertib, efisien, dan tata aturan.

Nilai ini menunjukkan kinerja pelaporan yang sangat baik, meskipun masih terdapat selisih 5% dari target. Penurunan ini umumnya disebabkan oleh gangguan akses sistem pelaporan keuangan, seperti aplikasi SAKTI, e-Rekon-LK, atau SIMAN BMN, yang terjadi terutama menjelang masa tutup buku akhir tahun. Gangguan teknis tersebut berdampak pada proses unggah dokumen dan submit laporan, sehingga mempengaruhi penilaian atas aspek ketepatan waktu dan penyampaian data.

Ke depan, Loka Monitor SFR Kendari berkomitmen untuk meningkatkan stabilitas proses pelaporan melalui optimalisasi jadwal kerja, mitigasi risiko teknis, serta penguatan kapasitas SDM pelaporan. Dengan Langkah tersebut, diharapkan nilai pelaporan keuangan UAKPA pada tahun berikutnya dapat mencapai 100% dan semakin memperkuat akuntabilitas kinerja anggaran secara keseluruhan.

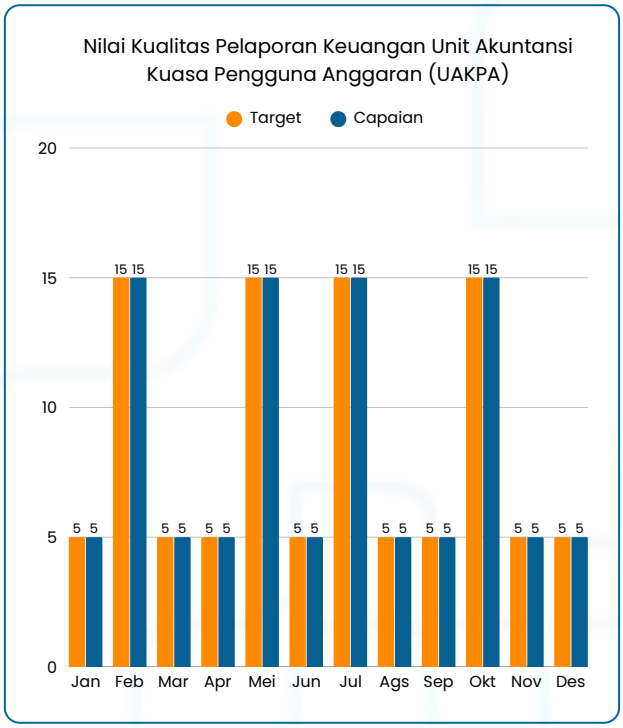
Lebih jauh, keberhasilan pencapaian kinerja dalam pelaporan keuangan ini turut ditopang oleh pengelolaan layanan administrasi internal secara terpadu, yang meliputi:

1. **Perencanaan**, melalui penyusunan RKA-K/L, revisi anggaran, dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja.
2. **Ketatausahaan**, yang menjamin tertib arsip dan dan dokumentasi seluruh proses administrasi keuangan.
3. **Kerumahtanggaan**, untuk mendukung operasional dan pengelolaan aset/inventaris agar efisien dan sesuai aturan.
4. **Kepegawaian**, sebagai fungsi strategis dalam pengelolaan SDM yang profesional, berintegritas, dan memahami proses pertanggungjawaban anggaran.

Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya menekankan kepatuhan administratif semata, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas output dan akuntabilitas institusi secara menyeluruh. Dengan pelaporan keuangan UAKPA yang berkualitas, satuan kerja mampu memberikan kontribusi yang kredibel terhadap pengelolaan anggaran negara.

II. Capaian

Berikut grafik pencapaian pelaksanaan indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) 2025



Gambar 3.29 Pencapaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Keterangan Capaian:
Dokumen Surat Hasil Rekonsiliasi Eksternal periode Desember TA 2025 Pusat Ditjen Infrastruktur Digital

Nilai Capaian Kualitas Pelaporan Keuangan Kementerian Kominfo UPT Kendari Tahun 2024 : 100

1. Perencanaan

a. Penganggaran, RKA-K/L, DIPA, Revisi
Pada Tahun Anggaran 2025, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kendari mengalami perubahan kode Satuan Kerja (Satker). Perubahan ini merupakan konsekuensi dari restrukturisasi organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital. Oleh karena itu, proses pengelolaan keuangan pada tahun anggaran tersebut berjalan menggunakan dua kode Satker.
Perencanaan anggaran dilakukan dengan menyusun rencana program kerja tahunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, serta efektivitas tata kelola organisasi.
Secara garis besar, alokasi anggaran DIPA 2025 terbagi ke dalam tiga jenis belanja utama sebagai berikut :

- **Belanja pegawai**, digunakan untuk mendukung pembiayaan gaji, tunjangan kinerja, honorarium, serta pengeluaran lain yang terkait dengan kesejahteraan dan kewajiban ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- **Belanja barang**,dialokasikan untuk operasional dan pemeliharaan kegiatan teknis pengawasan frekuensi, pengukuran kualitas layanan, pengelolaan sistem informasi, pelaksanaan UNAR, bimbingan teknis, serta pembiayaan dukungan administrasi seperti sewa, perjalanan dinas, dan logistik kantor.
- **Belanja modal**,digunakan untuk pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kerja, serta infrastruktur pendukung lainnya demi meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Anggaran yang dialokasikan ini menjadi fondasi dalam menjalankan program-program strategis Loka Monitor SFR Kendari, baik dari sisi teknis pengendalian spektrum, peningkatan kualitas pelayanan publik, maupun tata kelola organisasi yang berbasis akuntabilitas dan efisiensi. Penggunaan anggaran ini juga akan dievaluasi secara berkala melalui indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), serta dilaporkan melalui system pelaporan keuangan pemerintah untuk menjamin keterbukaan dan tranparansi.

DIPA Satuan Kerja Lama (654190)

Tabel 3.3 Dipa Satker Lama

Keterangan	Jumlah
Belanja Pegawai	1.628.369.000
Belanja Barang	2.359.341.000
Belanja Modal	56.760.000
Total Pagu	4.044.470.000

DIPA Satuan Kerja Baru (694718)

Tabel 3.4 Dipa Satker Lama

Keterangan	Jumlah
Belanja Pegawai	1.628.369.000
Belanja Barang	2.359.341.000
Belanja Modal	56.760.000
Total Pagu	4.044.470.000



Tahun 2025 untuk mencapai kinerja yang optimal dilakukan beberapa kali penyesuaian revisi DIPA dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Revisi & Usulan Revisi DIPA

Jenis Revisi	Revisi ke-	Pagu Belanja	No Dipa	Tanggal Dipa	Tanggal Revisi
DIPA_REVISI	11	7651577000	DIPA-059.09.2.694718/2025	02-12-2024	23-12-2025
USULAN_DIPA_REVISI	11	7651577000	DIPA-059.09.2.694718/2025	01-12-2024	09-12-2025
DIPA_REVISI	10	7651577000	DIPA-059.09.2.694718/2025	02-12-2024	10-12-2025
USULAN_DIPA_REVISI	10	7651577000	DIPA-059.09.2.694718/2025	01-12-2024	03-12-2025
DIPA_REVISI	9	7651577000	DIPA-059.09.2.694718/2025	02-12-2024	04-12-2025

Jenis Revisi	Revisi ke-	Pagu Belanja	No Dipa	Tanggal Dipa	Tanggal Revisi
USULAN_DIPA_REVISI	9	7651577000	DIPA-059.09.2.694718/2025	27-11-2024	26-11-2025
SATKER_REVISI	2	7651577000	DIPA-059.09.2.694718/2025	30-11-2024	30-11-2025
DIPA_REVISI	8	7651577000	DIPA-059.09.2.694718/2025	02-12-2024	01-12-2025
USULAN_DIPA_REVISI	8	7651577000	DIPA-059.09.2.694718/2025	01-12-2024	24-11-2025
DIPA_REVISI	7	7651577000	DIPA-059.09.2.694718/2025	02-12-2024	25-11-2025
USULAN_DIPA_REVISI	7	7651577000	DIPA-059.09.2.694718/2025	26-11-2024	14-11-2025
SATKER_REVISI	1	7651577000	DIPA-059.09.2.694718/2025	01-12-2024	19-11-2025
DIPA_REVISI	6	7651577000	DIPA-059.09.2.694718/2025	02-12-2024	20-11-2025
USULAN_DIPA_REVISI	6	7651577000	DIPA-059.09.2.694718/2025	30-11-2024	26-10-2025

Jenis Revisi	Revisi ke-	Pagu Belanja	No Dipa	Tanggal Dipa	Tanggal Revisi
DIPA_REVISI	5	8206060000	DIPA-059.09.2.694718/2025	02-12-2024	28-10-2025
USULAN_DIPA_REVISI	5	8206060000	DIPA-059.09.2.694718/2025	08-07-2025	30-09-2025
DIPA_REVISI	4	7787070000	DIPA-059.09.2.694718/2025	08-07-2025	30-09-2025
USULAN_DIPA_REVISI	4	7787070000	DIPA-059.09.2.694718/2025	08-07-2025	08-09-2025
DIPA_REVISI	3	7787070000	DIPA-059.09.2.694718/2025	08-07-2025	08-09-2025
USULAN_DIPA_REVISI	3	7787070000	DIPA-059.09.2.694718/2025	08-07-2025	01-09-2025
DIPA_REVISI	2	7787070000	DIPA-059.09.2.694718/2025	08-07-2025	01-09-2025
USULAN_DIPA_REVISI	2	7787070000	DIPA-059.09.2.694718/2025	08-07-2025	15-07-2025
DIPA_REVISI	1	7787070000	DIPA-059.09.2.694718/2025	08-07-2025	15-07-2025
USULAN_DIPA_REVISI	1	7787070000	DIPA-059.09.2.694718/2025	08-07-2025	09-07-2025

b. Pelaksanaan/Penyerapan Melalui Kegiatan yang Telah Direncanakan

untuk mendukung pengelolaan anggaran yang tertib, transparan, dan akuntabel, Loka Monitor SFR Kendari melaksanakan kegiatan penyerapan anggaran berdasarkan rencana program kerja yang telah ditetapkan dalam DIPA TA 2025. Penyerapan anggaran dilaksanakan secara berkala dan terpantau melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengikuti standar regulasi dari Kementerian Keuangan dan instansi pengawas lainnya.

Adapun pelaksanaan dan monitoring penyerapan anggaran dilakukan melalui aktivitas berikut:

- Pelaporan Realisasi Anggaran Bulanan

  Setiap bulan, satuan kerja melakukan pelaporan realisasi anggaran ke dalam beberapa sistem nasional, yaitu:
  1. SMART DJPb (Kementerian Keuangan) : untuk pemantauan penyerapan anggaran secara bulanan, per jenis belanja dan akun.
  2. E-Monev Bappenas : untuk memantau keterkaitan antara realisasi anggaran dengan pencapaian output program dan kegiatan strategis nasional.
  3. OM SPAN (Online Monitoring SPAN) : sebagai sistem utama monitoring belanja negara berdasarkan SPM dan SP2D yang telah diterbitkan, termasuk perbandingan antara rencana dan realisasi.
- Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Bendahara

  Setiap realisasi belanja, baik melalui mekanisme LS (langsung) maupun UP (uang persediaan), wajib dipertanggungjawabkan melalui:
  1. Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran, yang dikelola menggunakan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi).
  2. Laporan ini mencakup rincian penggunaan anggaran, bukti transaksi, serta dokumen pendamping lainnya, yang wajib disampaikan secara berkala kepada KPPN sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
- Kepatuhan Terhadap Jadwal dan Prosedur

Seluruh proses pelaksanaan anggaran berpedoman dan PMK, Perdirjen, Perbendaharaan, dan aturan pelaksanaan teknis lainnya, termasuk ketentuan batas waktu penyampaian laporan bulanan, semesteran, dan tahunan. Tingkat kepatuhan terhadap pelaporan ini sangat mempengaruhi nilai IKPA, serta menjadi indikator integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan satuan kerja.

2. Ketatausahaan

Kegiatan ketatausahaan dan rumah tangga merupakan bagian integral dari pelaksanaan fungsi pendukung administrasi perkantoran yang bertujuan menunjung efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Di Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari, kegiatan ini dikelola secara tertib dan sistematis, meliputi pengelolaan surat menyurat, pencatatan arsip, tata naskah dinas,hingga pengelolaan sarana dan prasarana kantor.

Dalam aspek ketatausahaan, kegiatan administrasi surat menyurat dilakukan sebagai bentuk komunikasi resmi antara instansi dan mitra kerja, baik internal Kementerian maupun eksternal. Surat-surat tersebut berasal dari lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara, serta dari penyelenggara dan pengguna spektrum frekuensi radio yang membutuhkan layanan teknis atau administratif.

Selama periode Januari hingga 31 Desember 2025, kegiatan ketatausahaan mencatat:

· Surat masuk
· Surat keluar
· Surat keputusan
· Surat perintah tugas

Semua surat dan dokumen tersebut dikelola dengan mengikuti ketentuan tata naskah dinas sesuai peraturan yang berlaku, serta tercatat dalam agenda surat masuk dan keluar, baik secara fisik maupun digital. Pengelolaan ini bertujuan untuk memastikan tertib arsip, kemudahan penelusuran, serta efisiensi dalam proses komunikasi dinas antar instansi.

3. Kerumahtanggaan

Pada tahun anggaran 2025, kegiatan kerumahtanggan di Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kendari

kelancaran operasional kantor serta menjaga kenyamanan dan efisien lingkungan kerja. Ruang lingkup kegiatan kerumahtanggaan mencakup pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, peralatan rumah tangga, serta perangkat pendukung teknis monitoring. Pemeliharaan Gedung yang dilakukan secara berkala guna memastikan kondisi kantor tetap aman, bersih, dan layak sebagai tempat pelayanan publik.
Selain itu, dilakukan pula pemeliharaan terhadap perangkat pendukung kegiatan monitoring yang merupakan bagian penting dari system kerja pengawasan spektrum frekuensi dan harus selalu dalam kondisi siap operasional. Tak hanya itu, perawatan juga dilakukan pada peralatan rumah tangga kantor, agar seluruh pegawai dapat bekerja dalam suasana yang nyaman dan produktif.
Kegiatan kerumahtanggaan juga mencakup pengadaan barang dan jasa, baik untuk kebutuhan rutin maupun teknis, seperti Alat Tulis Kantor (ATK), bahan habis pakai, perangkat elektronik, dan jasa pemeliharaan. Proses pengadaan dilakukan sesuai dengan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, mengacu pada prinsip efisien, transparan, dan akuntabel. Semua aktivitas tersebut didokumentasikan melalui catatan pemeliharaan, berita acara, dan laporan pelaksanaan yang terdokumentasi secara tertib. Dengan pelaksanaan kerumahtanggaan yang profesional dan terorganisir, Loka Monitor SFR Kendari berhasil memastikan keberlangsungan operasional yang mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal sepanjang tahun 2025.

- **Kebutuhan Barang dan Jasa**

Tabel 3.6 Pengadaan Barang dan Jasa

No	Nama Pengadaan	Jenis Belanja	Metode Pemilihan
1.	Sewa Jaringan Internet 1 Bulan	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
2.	Sewa Jaringan Internet Transportable Site Ambaipua 1 Bulan	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
3.	Sewa Jaringan Internet Transportable Site Baubau 1 Bulan	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
4.	Sewa Lokasi Transportable	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
5.	Sewa Jaringan Internet 11 Bulan	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
6.	Sewa Jaringan Internet Transportable Site Ambaipua 11 Bulan	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
7.	Sewa Jaringan Internet Transportable Site Baubau 11 Bulan	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
8.	Outsourcing Petugas Kebersihan dan Pramubakti	Belanja Barang	e-Purchashing
9.	Outsourcing Satpam	Belanja Barang	e-Purchashing
10.	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Halaman	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
11.	Pemeliharaan Inventaris Kantor berupa Pemindahan Lemari Besi Metal Arsip Datascript	Belanja Barang	Pengadaan Langsung

No	Nama Pengadaan	Jenis Belanja	Metode Pemilihan
12.	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Pegawai dan PPNPN	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
13.	Pemeliharaan Tower 50 Meter dan 20 Meter	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
14.	Pemeliharaan Perangkat Sistem Monitoring Spektrum Frekuensi (SMFR)	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
15.	Jasa General Medical Check UP	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
16.	Jasa General Medical Check UP - PPNPN	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
17.	Pemeliharaan Perangkat SFMR Transportable	Belanja Barang	Penunjukan Langsung
18.	Belanja Pakaian Dinas Upacara Pegawai ASN dan PPNPN berupa Baju Adat Tenun Sulawesi Tenggara	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
19.	Iklan Layanan Masyarakat Berupa Iklan Media Cetak (Billboard)	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
20.	Pengadaan Souvenir Evaluasi Hasil Pelaksanan Kegiatan dan Capaian Kinerja berupa tas Seminar Kit	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
21.	Pengadaan Seminar Kits Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Capaian Kinerja berupa Pengisi Daya Portable (Powerbank)	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
22.	Pengadaan Cetak Buku Tulis Hardcover	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
23.	Pemeliharaan Gedung Bertingkat berupa Huruf Timbul Akrilik pada gedung bertingkat	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
24.	Pemeliharaan Halaman Berupa Perbaikan Visual Gambar Signate	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
25.	Sewa Jaringan Internet Transportable Site Ambaipua 1 Bulan	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
26.	Sewa Jaringan Internet	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
27.	Sewa Jaringan Internet Transportable Site Muna/Baubau	Belanja Barang	Pengadaan Langsung

No	Nama Pengadaan	Jenis Belanja	Metode Pemilihan
28.	Sewa Lokasi Transportable	Belanja Barang	Penunjukan Langsung
29.	Sewa Jaringan Internet 11 Bulan	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
30.	Sewa Jaringan Internet Transportable Site Ambaipua 11 Bulan	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
31.	Sewa Jaringan Internet Transportable Site Muna/Baubau 11 Bulan	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
32.	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Halaman	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
33.	Pemeliharaan Inventaris Kantor berupa Pemindahan Lemari Besi Metal Arsip Datascript	Belanja Barang	Penunjukan Langsung
34.	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Pegawai dan PPNPN	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
35.	Pemeliharaan Tower 50 Meter dan 20 Meter	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
36.	Pemeliharaan Perangkat Sistem Monitoring Spektrum Frekuensi (SMFR)	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
37.	Jasa General Medical Check UP	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
38.	Pemeliharaan Perangkat SFMR Transportable	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
39.	Belanja Pakaian Dinas Upacara Pegawai ASN dan PPNPN berupa Baju Adat Tenun Sulawesi Tenggara	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
40.	Iklan Layanan Masyarakat Berupa Iklan Media Cetak (Billboard)	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
41.	Pemeliharaan Gedung Bertingkat berupa Huruf Timbul Akrilik pada gedung bertingkat	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
42.	Pengadaan Cetak Buku Tulis Hardcover	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
43.	Pemeliharaan Halaman dan Gedung Tidak Bertingkat (Halaman dan Toilet Mushollah)	Belanja Barang	Pengadaan Langsung

No	Nama Pengadaan	Jenis Belanja	Metode Pemilihan
	Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat Ruang Arsip	Belanja Barang	Pengadaan Langsung
	Pengadaan Perangkat Alat Pengolah Data Berupa Server Network Attached Storage (NAS)	Belanja Modal	e-Purchashing
	Pendampingan Surveillance ISO 9001:2015	Belanja Barang	e-Purchashing
	Pengadaan Minamoto Servomotor Stabilizer SM60K3 (60000VA) + Instalasi + Kabel 20 Meter	Belanja Modal	e-Purchashing
	Pengurusan Standar Mutu Manajemen/ISO Loka Monitor SFR Kendari (Audit Surveillance ke-2 Sistem Mutu ISO 9001:2015)	Belanja Barang	e-Purchashing
	Pengadaan Peralatan dan Inventaris Kantor berupa Earth Tester DC, Insulation Tester, Clamp Earth Tester, Arrester Teaster.	Belanja Barang	e-Purchashing
	Pengadaan Alat Monitoring dan Komunikasi Berupa Alat Pengukuran Kualitas Layanan Telekomunikasi	Belanja Modal	e-Purchashing
	Alat Pengolah Data berupa Raspberry Pi	Belanja Modal	e-Purchashing
	Pengadaan Alat Monitoring dan Komunikasi berupa Laptop Monitoring	Belanja Modal	e-Purchashing
	Alat Pengolah Data berupa Laptop	Belanja Modal	e-Purchashing
	Pengadaan Pembinaan Mental dan Disiplin Pegawai	Belanja Barang	e-Purchashing

- **Barang Milik Negara**

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian penting dalam tata kelola aset negara yang tertib, transparan, dan akuntabel. Di lingkungan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari, penatausahaan BMN dilaksanakan secara menyeluruh yang mencakup tiga aspek utama, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.
Pembukuan BMN Adalah proses pendaftaran dan pencatatan seluruh barang milik negara ke dalam daftar barang milik pengguna dan pengelola barang, yang menjadi tanggung jawab pejabat penatausahaan barang. Pembukuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap BMN tercatat secara administratif dan dapat ditelusuri secara fisik, sebagai dasar dalam mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset pemerintah. Kegiatan ini juga mendukung efisiensi pengelolaan barang, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga penghapusan.

Tabel 3.7 Daftar BMN Loka Monitor SFR Kendari Sampai Dengan T.A. 2025

Kode	Nama Barang	Kuantitas	Satuan
131111	Tanah	2.862	M2
132111	Peralatan dan Mesin	687	Unit/Buah
133111	Gedung dan Bangunan	20	Unit
134112	Irigasi	4	Unit
134113	Jaringan	4	Unit
135121	Aset Tetap Lainnya	63	Buah

Tabel 3.8 Daftar Pengadaan BMN Loka Monitor SFR Kendari T.A. 2025

Kode	Nama Barang	Kuantitas	Satuan
3100204001	Server	1	Buah
3060201004	Telephone Mobile	3	Buah
3060323020	Lightning Protector	1	Buah
3060334015	Voltage Regulator	1	Buah
3080158088	Raspberry Pi	1	Unit
3080804005	Earth / Ground Tester	2	Buah
3080804008	Insulation Tester (Alat Laboratorium ListrikDan Mekanik)	1	Buah
3100102002	Laptop	3	Buah

Tabel 3.9 Daftar Transfer Masuk BMN Loka Monitor SFR Kendari T.A. 2025

Kode	Nama Barang	Kuantitas	Satuan
3030399999	Alat Ukur Lainnya	1	Unit

Dalam rangka penatausahaan Barang Milik Negara Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari mengusulkan penghapusan peralatan dan mesin sebanyak 11 unit/buah dan juga satu paket bongkaran renovasi gedung sebagai bagian pengelolaan aset tidak bergerak, yang memerlukan pencatatan khusus terkait pemindahan dan penghapusan BMN sesuai ketentuan DJKN.
Semua proses tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, seperti peraturan menteri keuangan nomor 181/PMK.06/2016 tentang penatausahaan Barang Milik Negara, serta didukung oleh aplikasi SAKTI Modul BMN dan SIMAN-BMN untuk menjaga akurasi data dan memudahkan proses pelaporan. Hasil penatausahaan ini akan digunakan sebagai dasar pelaporan semesteran dan tahunan ke Kementerian Keuangan serta menjadi bagian integral dari laporan keuangan instansi pemerintah.
Dengan pelaksanaan penatausahaan yang tertib, Loka Monitor SFR Kendari berkomitmen mendukung pengelolaan BMN yang profesional, efisien, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

- **Kepegawaian**

Pada Tahun Anggaran 2025, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari didukung oleh total 31 (tiga puluh satu) orang SDM, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan tenaga pendukung outsourcing. Komposisi ini mencerminkan struktur organisasi yang berorientasi pada efektivitas pelaksanaan tugas teknis dan administratif di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Jabatan Struktural
- Jabatan Fungsional Umum
- Jabatan Fungsional Tertentu
- Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

Dengan struktur SDM yang ada, Loka Monitor SFR Kendari tetap mampu melaksanakan berbagai kegiatan strategis seperti monitoring spektrum, pengendalian frekuensi, bimbingan teknis, inspeksi lapangan, pelayanan publik, dan administrasi perkantoran. Meskipun secara jumlah masih terbatas, namun dengan penugasan yang proporsional, kolaborasi lintas jabatan, serta pemanfaatan teknologi kerja, satuan kerja dapat menjaga efektivitas kinerja organisasi dan merespon kebutuhan layanan Masyarakat secara optimal.
Selanjutnya, sebagai bagian dari Upaya pengembangan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kendari terus mendorong peningkatan kualitas dan jenjang karir pegawai melalui program pembinaan kepegawaian yang terencana dan berbasis kompetensi. Sepanjang tahun anggaran 2025, beberapa pegawai telah mengikuti dan memperoleh peningkatan status kepegawaian yang menjadi indikator produktivitas dan pemenuhan standar Aparatur Sipil Negara (ASN).

- Kenaikan Pangkat
- Ujian Kompetensi
- Kenaikan Gaji Berkala

Sebagai lanjutan dari pelaksanaan program kenaikan pangkat, ujian kompetensi, dan pemenuhan hak kepegawaian, pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Upaya membangun organisasi yang adaptif dan unggul. Kegiatan pengembangan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan kualitas pegawai agar mampu menjalankan perannya secara optimal seiring dengan meningkatnya tantangan kerja dan kebutuhan layanan publik yang terus berkembang.
Peningkatan kompetensi tidak hanya mencakup penguasaan terhadap aspek teknis, tetapi juga menyentuh pembentukan pola pikir, etika kerja, dan kemampuan bekerja secara kolaboratif dan inovatif. Pembekalan kemampuan yang relevan dan berkelanjutan menjadi strategi penting dalam mendukung keberhasilan organisasi mencapai target kinerja, terutama di tengah

perkembangan teknologi dan digitalisasi kerja yang semakin cepat.
Pada tahun 2025, pegawai Loka Monitor SFR Kendari telah mengikuti berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang bersifat teknis operasional, manajerial, pelayanan publik, hingga pelatihan yang mendukung implementasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK. Rangkaian kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Komdigi, Direktorat Jenderal Infradigi, maupun instansi Pembina teknis lainnya.seluruh pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kinerja pegawai secara menyeluruh.



- **Keuangan**

Pada tahun anggaran 2025, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari (65140) telah mengelola anggaran sesuai DIPA dengan pagu total sebesar Rp. 4.044.470.000 hingga tanggal 31 Juli 2025, realisasi anggaran mencapai Rp. 4.041.726.139 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10 Tabel Realisasi Anggaran Satker Lama (654190)

Keterangan	Jumlah	Realisasi	Persentase
Belanja Pegawai	1.628.369.000	1.627.027.327	99,92%
Belanja Barang	2.359.341.000	2.357.941.182	99,94%
Belanja Modal	56.760.000	56.757.630	100.00 %
Total Pagu	4.044.470.000	4.041.726.139	99,93%

Pada tahun anggaran 2025, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari (694718) telah mengelola anggaran sesuai DIPA dengan pagu total sebesar Rp. 7.651.577.000 hingga tanggal 31 Desember 2025, realisasi anggaran mencapai Rp. 6.236.514.112

Tabel 3.11 Tabel Realisasi Anggaran Satker Baru (694718)

Keterangan	Jumlah	Realisasi	Persentase
Belanja Pegawai	1.727.914.000	1.696.303.298	98,17%
Belanja Barang	5.051.613.000	4.225.103.534	83,64%
Belanja Modal	872.050.000	315.107.280	36,16%
Total Pagu	7.651.577.000	6.236.514.112	81,51%

Rincian visual atas realisasi belanja berdasarkan jenis dapat dilihat dalam bentuk grafik batang dan tabel SP2D, yang menggambarkan proporsi antara pagu, realisasi, dan sisa dana dari masing-masing jenis belanja. Grafik ini menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan anggaran yang telah mendekati optimal di semua kategori.

Tabel 3.12 Tabel Perbedaan Pagu dan Realisasi Anggaran 5 Tahun Terakhir

Tahun	Realisasi	Pagu	Capaian
2021	11.263.780.435	11.456.383.000	98,32%
2022	12.354.549.322	12,419,551,000	99,48%
2023	12.453.140.325	12.673.555.000	98,26%
2024	13.771.664.610	13.970.742.000	98,58%
2025 (654190)	4.041.726.139	4.044.470.000	99,93%
2025 (694718)	6.236.514.112	7.651.577.000	81,51%

Secara historis dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2025), tingkat serapan anggaran Loka Monitor SFR Kendari konsisten menunjukkan kinerja yang optimal dengan rata-rata diatas 98% setiap tahunnya. Namun, pada Tahun Anggaran 2025, realisasi serapan tercatat sebesar 81,51%. Penurunan ini merupakan dampak dari masa transisi penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Komunikasi dan Digital, yang berkonsekuensi pada penyesuaian administratif dan penundaan waktu pelaksanaan anggaran.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu dari 12 indikator utama yang digunakan dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) oleh Kementerian Keuangan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana satuan kerja mampu melaksanakan anggaran secara tepat waktu, tepat jumlah, serta selaras dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam sistem penilaian IKPA, indikator penyerapan anggaran memiliki bobot 20%, yang sangat mempengaruhi nilai akhir IKPA satuan kerja. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, Loka Monitor SFR Kendari memperoleh poin 88,05 yang mengindikasikan pelaksanaan anggaran berada dalam kategori sangat baik.

Capaian ini mencerminkan bahwa Loka Monitor SFR Kendari telah berhasil :
Menyerap anggaran secara efektif dan efisien,
Memenuhi ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan,
Menyesuaikan pelaksanaan program dengan rencana strategis dan kebutuhan riil di lapangan,
Menjaga kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara.

Konsistensi capaian penyerapan anggaran yang tinggi ini menjadi indikator kuat bahwa tata kelola keuangan di Loka Monitor SFR Kendari telah berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

Direktorat Jenderal
Infrastruktur Digital



BAB IV
PENUTUP

Sasaran program dan indikator kinerja Tahun 2025 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi pedoman kerja dan prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Tahun 2025 sebagai berikut : Loka Monitor SFR Kendari merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital di daerah mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian frekuensi di wilayah Sulawesi Tenggara. Kinerja Loka Monitor SFR Kendari sangat mempengaruhi keamanan dan kenyamanan terhadap pengguna spektrum frekuensi (nirkabel) yang saat ini sangat pesat perkembangannya. Oleh karena itu, Loka Monitor SFR Kendari menyadari banyaknya tantangan dalam pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi seperti perkembangan teknologi dan pengguna spektrum frekuensi radio yang cepat.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Ditjen Infrastruktur Digital Tahun 2025, telah ditetapkan 15 (Lima Belas) Indikator Kinerja yang mendukung 2 (dua) Sasaran Program Loka Monitor SFR Kendari. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di Tahun 2025, Loka Monitor SFR Kendari telah berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas dan fungsi yang diembannya.

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

1. IK-1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/kota di Wilayah Kerja dengan target 80% dengan capaian 114%
2. IK-2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio dengan target 100% dengan capaian 106%
3. IK-3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio dengan target 100% dengan capaian 100%
4. IK-4 Persentase (%) Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital target 75% dengan capaian 100%
5. IK-5 Persentase % Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT target 85% dengan capaian 95%
6. IK-6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif target 80% dengan capaian 100%
7. IK-7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan target 100% dengan capaian 121%
8. IK-8 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN) target 100% dengan capaian 100%
9. IK-9 Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio target 100% dengan capaian 100%
10. IK-10 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik target 100% dengan capaian 100%.
11. lK-11 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) target 100% dengan capaian 122.3%
12. IK-12 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)) target 100% dengan capaian 106%
13. IK-13 Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi) target 100% dengan capaian 100%

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

1. IK-1 Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 dengan target 86.95 dengan capaian 91.34
2. IK-2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan target 97.00 dengan capaian 100

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

Direktorat
Jenderal
Infrastruktur
Digital



LOKA MONITOR SFR KENDARI